



Baharuddin Siagian, S.H., M.Si
Bupati Batu Bara



Syafrizal, S.E., M.AP
Wakil Bupati Batu Bara



LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN
BATU BARA

TAHUN
2025



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
INSPEKTORAT DAERAH

DESA MANGKAI BARU – KECAMATAN LIMA PULUH
e-mail : inspektorat@batubarakab.go.id Kode Pos : 21255

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KABUPATEN BATU BARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Mangkai Baru, 9 April 2026

INSPEKTUR
KABUPATEN BATU BARA

HASRUL IRFAN, S.Kom, MM
PEMBINA Tk.I
NIP. 19831215 200804 1 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batu Bara ini disusun sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja kepada masyarakat.

LKIP ini memuat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara selama Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Penyusunan LKIP Kabupaten Batu Bara mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Batu Bara, yaitu: ***“Mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, dan Adil untuk Batu Bara yang Bahagia.”*** Visi tersebut menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak terlepas dari sinergi, kerja keras, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur masyarakat, dunia usaha, maupun jajaran aparatur pemerintah daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara yang telah menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada

seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, serta partisipasi aktif dalam penyusunan LKIP Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik.



Lima Puluh, 13 April 2025

Bupati Batu Bara

Baharuddin Siagian

IKHTISAR EKSEKUTIF

Transformasi Akuntabilitas: Menuju Batu Bara yang Tangguh dan Berdaya Saing

Laporan Kinerja (LKIP) Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 bukan sekadar dokumen kompilasi angka, melainkan pengejawantahan dari komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip "**Performance-Based Government**". Di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks, akuntabilitas kini diletakkan sebagai kompas strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran dikonversi menjadi kemanfaatan nyata bagi masyarakat.

Esensi Strategis Laporan Kinerja

Penyusunan laporan ini merupakan mekanisme evaluasi diri (*self-reflection*) untuk memotret sejauh mana visi dan misi daerah telah terakselerasi melalui sasaran-sasaran yang terukur. Laporan ini dirancang untuk:

1. **Navigasi Kinerja:** Menjamin keselarasan (*alignment*) antara perencanaan strategis dengan realisasi di lapangan.
2. **Katalisator Inovasi:** Menjadi bahan pembelajaran organisasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
3. **Instrumen Transparansi:** Memberikan gambaran yang jujur, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan atas setiap capaian indikator kinerja utama.

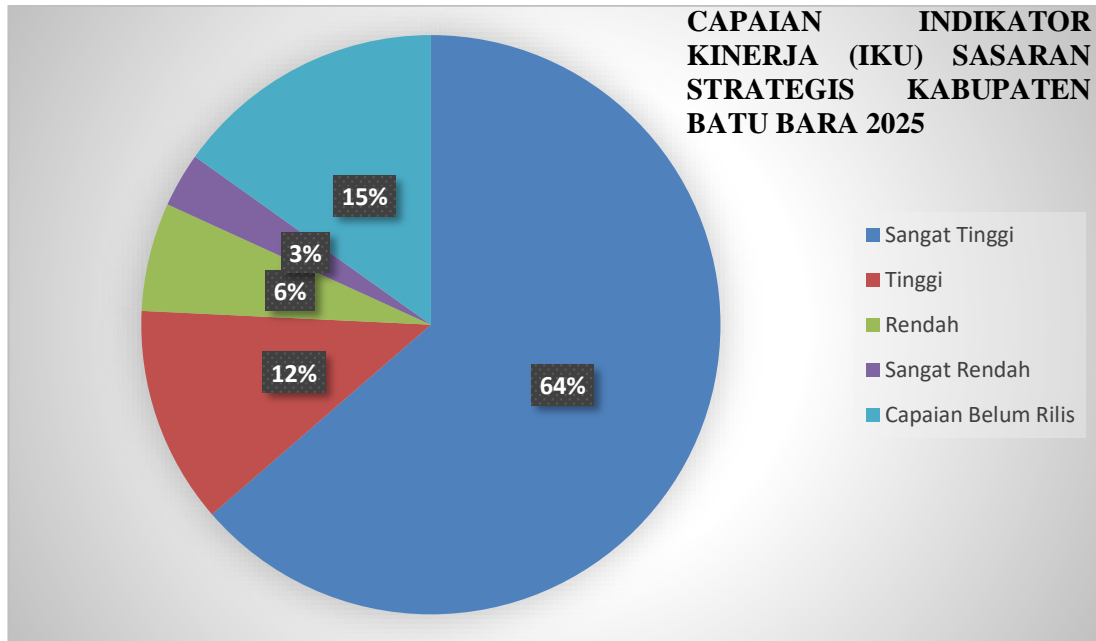
Landasan Regulasi dan Momentum Perencanaan

LKIP 2025 disusun berdasarkan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Secara khusus, tahun 2025 menjadi momentum krusial karena merupakan tahun awal implementasi **RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029** (Perda Nomor 3 Tahun 2025). Oleh karena itu, laporan ini berfungsi sebagai *baseline* (titik uji) krusial bagi keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan.

Ringkasan Capaian Strategis

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menetapkan **31 Sasaran Strategis** yang diukur melalui **33 Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Melalui integrasi program yang bersifat lintas sektoral—mulai

dari akselerasi literasi masyarakat hingga penguatan skala ekonomi UMKM—berikut adalah potret agregat capaian kinerja yang berhasil diraih:



Berdasarkan hasil pengukuran terhadap **33 Indikator Kinerja Utama** yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, sebaran tingkat capaian kinerja Kabupaten Batu Bara digambarkan sebagai berikut:

1. Dominasi Kinerja Optimal (75,7%)

Sebanyak **25 indikator** berada pada zona hijau dengan rincian:

- **Sangat Tinggi (21 Indikator):** Menunjukkan bahwa sebagian besar program strategis telah melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas tata kelola pada sektor-sektor unggulan.
- **Tinggi (4 Indikator):** Menunjukkan konsistensi kinerja yang terjaga sesuai dengan lintasan target tahunan. Secara akumulatif, **75,7%** dari total indikator menunjukkan performa yang solid dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

2. Analisis Indikator "Rendah" dan "Sangat Rendah" (9,1%)

Terdapat **3 indikator** yang berada pada kategori di bawah standar, yaitu **2 indikator Rendah** dan **1 indikator Sangat Rendah**. Penurunan pada kutub

ini diidentifikasi bukan sebagai kegagalan programatik, melainkan sebagai **anomali transisi**, khususnya:

- **Revolusi Metodologi:** Adanya perubahan instrumen pengukuran nasional (seperti pada indeks literasi/IPLM) yang mengubah orientasi penilaian dari fisik/administratif menjadi kinerja/dampak.
- **Efek Baseline Baru:** Penetapan angka realisasi sebagai titik uji baru (*new baseline*) yang mengakibatkan target awal menjadi tidak relevan secara statistik.

3. Status Indikator "Belum Rilis" (15,2%)

Terdapat **5 indikator** yang statusnya masih menunggu publikasi resmi dari kementerian, lembaga vertikal, atau Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah Kabupaten tetap mencantumkan indikator ini sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap jadwal rilis data nasional, guna memastikan akurasi pelaporan yang dapat diandalkan.

"Profil kinerja Kabupaten Batu Bara tahun 2025 menunjukkan karakteristik yang sehat dan transparan. Dengan 90% data yang telah tersedia menempati kategori Tinggi hingga Sangat Tinggi, pemerintah daerah telah membuktikan ketangguhan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Adapun tantangan pada 3 indikator yang masih rendah merupakan 'titik balik' bagi perangkat daerah untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap target dan strategi pembangunan agar lebih selaras dengan metodologi substantif yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat."

Evaluasi komprehensif terhadap data pendukung dan dinamika hambatan pada setiap sasaran strategis menunjukkan bahwa meskipun mayoritas Indikator Kinerja Utama (IKU) mencapai predikat **Sangat Tinggi**, terdapat tantangan struktural yang memerlukan atensi khusus Pemerintah Kabupaten Batu Bara di masa mendatang. Capaian angka (kuantitas) belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penyelesaian persoalan fundamental di masyarakat (kualitas), sehingga diperlukan pergeseran fokus dari sekadar pemenuhan target administratif menuju penciptaan dampak (*impact-oriented*).

Aspek krusial yang menjadi determinan keberhasilan ke depan adalah **orkestrasi koordinasi dan sinergi lintas sektor**. Pemerintah Kabupaten Batu Bara harus memperkuat kolaborasi vertikal dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta kolaborasi horizontal dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota tetangga dan pemangku kepentingan non-pemerintah (*Pentahelix*).

Tanpa sinergi yang terlembaga dan berbasis pada prinsip kemitraan yang inklusif, pencapaian sasaran pembangunan yang bersifat lintas urusan akan menghadapi hambatan birokrasi yang kompleks. Bagi internal perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, hal ini mengimplikasikan urgensi:

1. **Peningkatan Efektivitas Manajerial:** Mengalihkan pola kerja sektoral (*silo mentality*) menuju integrasi program yang terpadu untuk menjawab tantangan daerah secara holistik.
2. **Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran:** Memastikan hasil evaluasi kinerja tahun 2025 menjadi basis data utama (*evidence-based policy*) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun anggaran berikutnya.
3. **Optimalisasi Pelayanan Publik:** Menjadikan instrumen LKjIP bukan sekadar kewajiban pelaporan, melainkan alat kendali mutu untuk memastikan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas layanan dasar.

Melalui komitmen perbaikan yang berkelanjutan, setiap OPD diharapkan mampu melakukan kalibrasi strategi guna meminimalisir *gap* kinerja dan mengakselerasi pencapaian visi pembangunan Kabupaten Batu Bara yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Direviu	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
A.1. Sistematika Penyusunan	1
A.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
A.3. Maksud dan Tujuan	3
A.4. Struktur Organisasi	4
B. Gambaran Umum Kabupaten Batu Bara	5
C. Perekonomian	6
C.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7
D. Ketenagakerjaan	11
E. Kesehatan	12
F. Indeks Pembangunan Manusia	13
F.1. Perbandingan IPM Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara	13
F.2. Pencapaian Kapabilitas Dasar Manusia Batu Bara Tahun 2025	14
G. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	15
H. ISU STRATEGIS	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Pembangunan Daerah	19
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32
C. Anggaran Tahun 2025	38
BAB III Akuntabilitas Kinerja	40
A.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2025	41
A.2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis	

Capaian Kinerja	42
B. Akuntabilitas Anggaran.....	251
BAB IV Penutup	254

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1.	PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2021-2025.....	8
Tabel. 1.2.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025	9
Tabel. 1.3.	Perbandingan IPM Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	14
Tabel. 1.4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batu Bara Menurut Komponen, Tahun 2021-2025	15
Tabel. 2.1.	Persandingan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Utara dan Prioritas Kabupaten Batu Bara	25
Tabel. 2.2.	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029	26
Tabel. 2.3.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Kabupaten Batu Bara	29
Tabel. 2.4.	Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Batu Bara Tahun 2025	32
Tabel. 2.5.	Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja 2025 Pemerintah Kabupaten Batu Bara	33
Tabel. 2.6.	Anggaran Belanja 2025	39
Tabel. 3.1.	Predikat Nilai Capaian Kinerja Dalam Skala Pengukuran Ordinal	41
Tabel. 3.2.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	41
Tabel. 3.3.	Rincian sasaran dan indikator kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Batu Bara 2025.....	43
Tabel. 3.4.	Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025	46
Tabel. 3.5.	Predikat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kab. Batu Bara 2025	49
Tabel. 3.6.	IKM Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.....	53
Tabel. 3.7.	Kontribusi Program Terhadap Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	63
Tabel. 3.8.	Perbandingan Nilai SPBE Kabupaten Batu Bara	72
Tabel. 3.9.	Perbandingan Sektor Industri Pengolahan Pada Tingkat Nasional Dan Provinsi Terhadap Kabupaten Batu Bara.....	81
Tabel. 3.10.	Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Batu Bara	100
Tabel. 3.11.	Data Perkembangan Jumlah Usaha Berdasarkan Klasifikasi Skala Usaha Pada Tahun 2024 Dan 2025	106
Tabel. 3.12.	Perbandingan dengan Capaian Nasional, Provinsi, dan Daerah Lain Tahun 2025	124
Tabel. 3.13.	Perbandingan PMTB (Benchmark)	134
Tabel. 3.14.	Perkembangan nilai AKIP Kabupaten Batu Bara dari tahun 2018-2025	167
Tabel. 3.15.	Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dan 2025	168
Tabel. 3.16.	Tren TPAK Kabupaten Batu Bara	179
Tabel. 3.17.	Struktur Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025	180
Tabel. 3.18.	Perbandingan Regional	181
Tabel. 3.19.	Jenis-Jenis Inovasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.....	191
Tabel. 3.20.	Persentase Tingkat Kemiskinan 2021-2025.....	197
Tabel. 3.21.	Status Desa Berdasarkan Hasil Pengukuran Tahun 2025	200
Tabel. 3.22.	Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dan nasional.....	221
Tabel. 3.23.	Perbandingan IKA, IKU dan IKL tahun 2024 dengan Tahun 2025	221
Tabel. 3.24.	Usia harapan hidup Kabupaten Batu Bara dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten Tetangga Tahun 2025	231

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.....	6
Grafik 1.2	Persentase PDRB Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2025 (Atas Dasar Harga Berlaku)	11
Grafik 1.3	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Serta Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Periode 2021-2025 (Atas Dasar Harga Berlaku)	11
Grafik 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Batu Bara Tahun 2025	51
Grafik 3.2	Capaian Indikator Kinerja Per Sasaran Strategis Pemerintah Kab. Batu Bara Tahun 2025	51
Grafik 3.5	Perkembangan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2025	79
Grafik 3.7.	Perbandingan Sektor Perdagangan Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional tahun 2021-2025	100
Grafik 3.9.	Perbandingan TPAK dan TPT Di Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2025.....	179
Grafik 3.10.	Kemiskinan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2025	197
Grafik 3.11.	Pertumbuhan RTLS dan HLS Tahun 2021-2025	244

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kabupaten Batu Bara	5
------------	--------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Hal ini diwujudkan melalui pelaporan kinerja yang secara sistematis menyelaraskan rencana strategis dengan capaian riil di lapangan.

Landasan yuridis pelaporan ini berpijak pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, serta diperkuat oleh Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Selain itu, semangat transparansi ini sejalan dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 mengenai percepatan pemberantasan korupsi dan teknis penyusunannya dipandu oleh Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014.

Selaras dengan Pasal 22 Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Bupati memegang mandat untuk menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah kepada Presiden melalui Menteri PAN-RB, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lebih dari sekadar kewajiban administratif, laporan ini berfungsi sebagai instrumen kendali, alat evaluasi kinerja, serta katalisator dalam mewujudkan *Good Governance* dan transparansi publik yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara merupakan bagian integral dari komitmen reformasi birokrasi dan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

A.1. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan berdasarkan Dokumen Perencanaan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja, kemudian disampaikan informasi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran :

- 1) Lain-lain yang dianggap perlu

A.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan dan akuntabel;
2. Merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama tahun 2025 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.

Tujuan:

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara selama tahun anggaran 2025.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 dan sebagai bahan acuan perbaikan untuk tahun

berikutnya.

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam upaya menerapkan asas transparan dan akuntabel.

A.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Inspektorat.
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan;
 8. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata;
 16. Dinas Perpustakaan;
 17. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

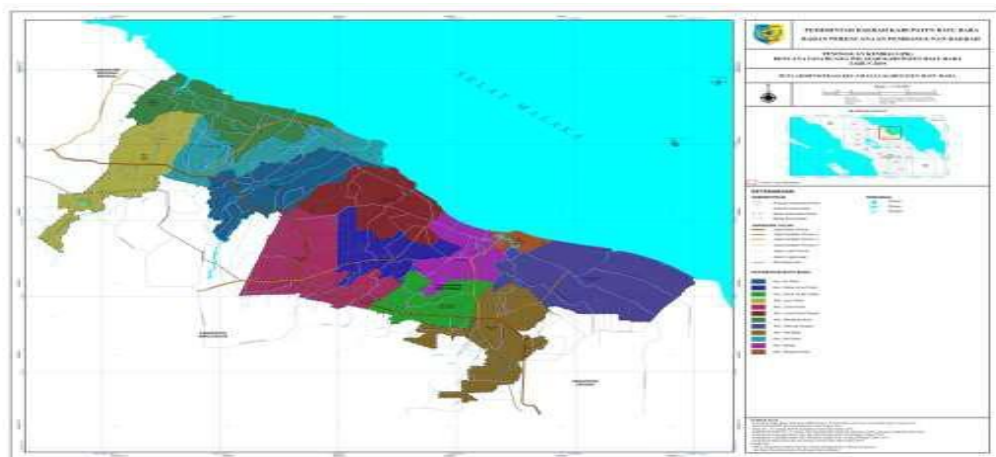
3. Badan Pendapatan Daerah;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan;
 - g. Kelurahan.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

Luas Wilayah Kabupaten Batu Bara adalah 90.496 Ha yang terdiri dari 12 Kecamatan serta 151 Desa/Kelurahan definitif yang terdiri dari 141 desa dan 10 kelurahan, dengan rincian sebagaimana dikemukakan pada Tabel berikut:

Gambar 1.1.

Peta Kabupaten Batu Bara



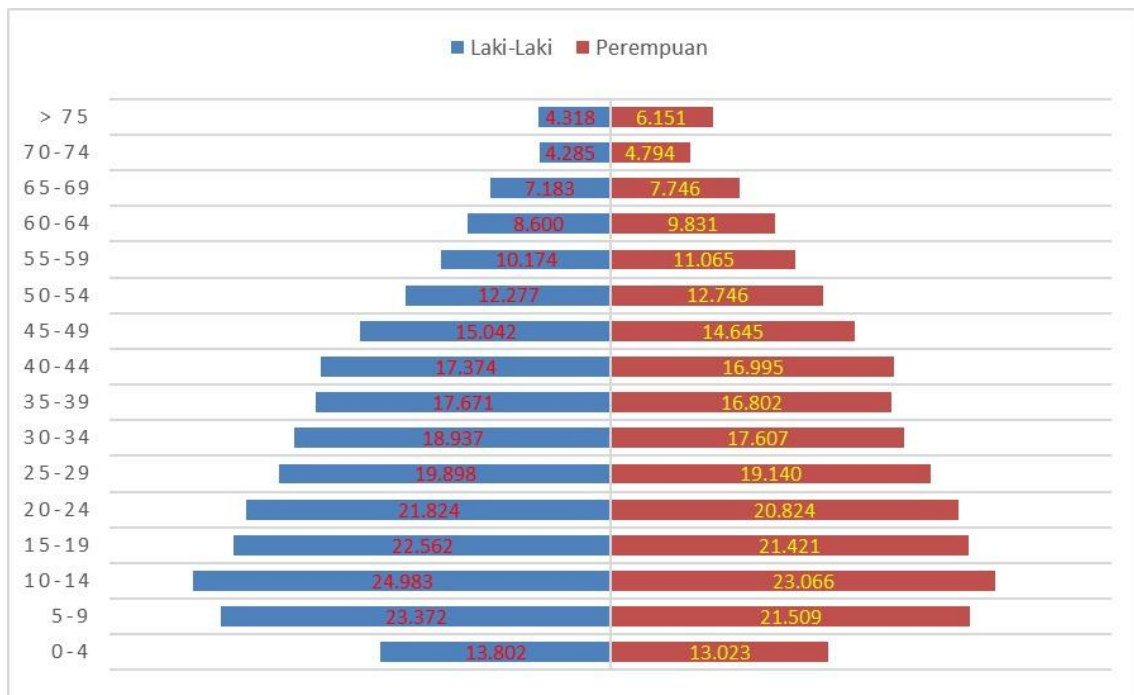
Secara geografis Kabupaten Batu Bara terletak antara 3°03' - 3°26' LU dan 99°01' - 100°00' BT. Secara Administrasi Kabupaten Batu Bara memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar Khalipah (Kabupaten Serdang Bedagai) dan Selat Malaka.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Meranti (Kabupaten Asahan) dan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Meranti Kabupaten Asahan dan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bosar Maligas, Bandar, Bandar Masilam, Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun dan Tebing

tinggi Kabupaten Serdang Bedagai.

Penduduk Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Batu Bara dalam angka 2026) sebanyak 479.667 jiwa yang terdiri atas 262.302 (50,29%) jiwa penduduk laki-laki dan 237.265 (49,71%) penduduk perempuan. Dengan kepadatan mencapai 500,07 jiwa/km² per rumah tangga 4 orang.

Grafik 1.1
Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Batu Bara Tahun 2025



Sumber Data: Badan Pusat Statistik 2026

Penduduk Kabupaten Batu Bara didominasi oleh kelompok usia produktif yaitu usia 15-64 tahun sebanyak 325.435 jiwa. Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa usia kelompok produktif yang paling banyak di kisaran kelompok usia 15-19 tahun dengan jumlah sebanyak 43.983 jiwa. Perbandingan antara kelompok usia produktif dengan usia non produktif adalah 1,9:1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif sangat kecil.

C. PEREKONOMIAN

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, kebijakan perekonomian Kabupaten Batu Bara diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fokus kebijakan tersebut meliputi:

1. Peningkatan investasi, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyederhanaan perizinan, serta penguatan infrastruktur pendukung kawasan strategis.
2. Penguatan ekonomi daerah, dengan mendorong sektor-sektor unggulan, pengembangan UMKM, serta hilirisasi potensi sumber daya lokal.
3. Penurunan tingkat pengangguran, melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penguatan link and match antara dunia usaha dan tenaga kerja lokal.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing daerah dalam skala regional maupun nasional.

C.1. Produk Domesti Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dikatakan PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, dengan kata lain menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kabupaten Batu Bara tahun 2021-

2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1.1.
PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2021-2025

KBLI	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,	5640,46	5992,67	6182,03	6305,39	6.444,95
B	Pertambangan dan pengalihan	34,46	36,05	37,37	37,39	37,65
C	Industri Pengolahan	10994,56	11.287,58	11,760,46	12.432,53	2.756,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,22	16,79	17,24	18,04	18,48
E	Pengadaan Air: Pengelolaan Sampah, limbah, daur ulang	7,20	7,23	7,38	7,54	7,70
F	Konstruksi	1507,12	1520,68	1563,74	1.557,16	1.538,74
G	Perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor	4058,01	4322,78	4578,69	4768,03	5.087,84
H	Transportasi dan pergudangan	799,63	831,34	845,79	863,05	971,10
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	267,17	278,89	299,67	316,81	334,83
J	Informasi dan komunikasi	170,33	178,09	188,91	199,49	210,57
K	Jasa keuangan dan asuransi	72,09	75,02	79,72	83,05	84,84
L	Real estate	273,99	281,01	289,1	295,78	314,22
M, N	Jasa perusahaan	21,45	22,24	23,32	23,83	25,41
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	419,47	419,13	424,98	469,92	465,41
P	Jasa Pendidikan	113,28	116,7	120,71	124,81	131,93
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan	69,22	73,05	77,81	83,22	90,67
R, S, T, U	Jasa Lainnya	21,37	22,96	25,70	27,73	29,30
	PDRB	24486,06	25482,21	26.522,68	27.614,17	28.549,99

Sumber Data BPS: BARADA 2026

Tabel.1.2.**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025**

KBLI	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,	20,25	21,08	21,91	22,54	22,93
B	Pertambangan dan pengalihan	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12
C	Industri Pengolahan	45,72	45,55	44,35	44,45	44,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
E	Pengadaan Air: Pengelolaan Sampah, limbah, daur ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	6,85	6,64	6,55	6,09	5,57
G	Perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor	17,89	17,82	18,37	18,15	18,16
H	Transportasi dan pergudangan	3,21	3,17	3,18	3,06	3,11
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,06	1,02	1,04	1,04	1,03
J	Informasi dan komunikasi	0,50	0,49	0,49	0,47	0,46
K	Jasa keuangan dan asuransi	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26
L	Real estate	1,25	1,19	1,15	1,09	1,06
M,N	Jasa perusahaan	0,11	0,10	0,11	0,10	0,10
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	1,84	1,67	1,60	1,68	1,55
P	Jasa Pendidikan	0,42	0,39	0,38	0,37	0,37
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan	0,30	0,29	0,30	0,30	0,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data BPS: BARADA 2026

Pada Tahun 2025, kontribusi gabungan ketiga sektor tersebut mencapai sekitar 85,88 persen terhadap total PDRB Kabupaten Batu Bara. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Tahun 2025 dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 44,79 persen. Meskipun tetap menjadi sektor dominan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir sektor ini menunjukkan tren yang relatif fluktuatif dan cenderung menurun dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai 45,72 persen. Hal ini mengindikasikan adanya dinamika pada sektor industri, baik akibat

faktor eksternal seperti kondisi pasar dan harga komoditas global maupun faktor internal seperti kapasitas produksi dan investasi.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 22,93 persen pada Tahun 2025 dan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak Tahun 2021 (20,25 persen). Kenaikan ini mencerminkan semakin kuatnya peran sektor primer dalam struktur ekonomi daerah, baik dari sisi produksi maupun kontribusinya terhadap nilai tambah. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Batu Bara masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor berbasis sumber daya alam.

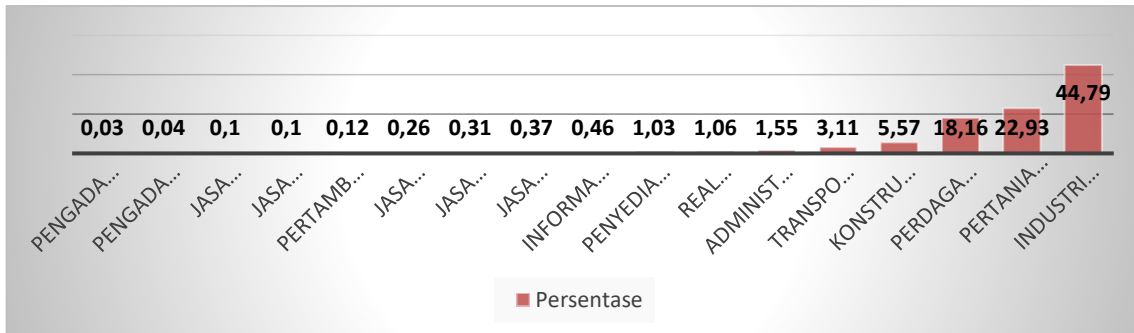
Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran (termasuk reparasi mobil dan sepeda motor) menyumbang sebesar 18,16 persen pada Tahun 2025, dengan kecenderungan relatif stabil dalam lima tahun terakhir. Stabilitas ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan tetap menjadi penggerak penting dalam menjaga sirkulasi ekonomi daerah, terutama sebagai sektor yang menghubungkan kegiatan produksi dengan konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, beberapa sektor seperti Konstruksi menunjukkan tren penurunan dari 6,85 persen pada Tahun 2021 menjadi 5,57 persen pada Tahun 2025, yang dapat mengindikasikan perlambatan aktivitas pembangunan fisik atau selesainya proyek-proyek strategis tertentu. Sektor jasa lainnya secara umum masih memberikan kontribusi yang relatif kecil dan cenderung stagnan, sehingga transformasi struktur ekonomi ke arah sektor jasa modern dan berbasis pengetahuan masih memerlukan penguatan kebijakan.

Secara keseluruhan, struktur perekonomian Kabupaten Batu Bara masih bertumpu pada sektor industri dan sektor primer, dengan dukungan perdagangan sebagai penggerak distribusi. Kondisi ini menjadi peluang untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan diversifikasi ekonomi guna mewujudkan struktur ekonomi yang lebih seimbang, tangguh, dan berkelanjutan.

Grafik 1.2 menggambarkan kontribusi kategori PDRB di Kabupaten Batu Bara tahun 2025 yang diurut dari nilai kontribusi terbesar hingga nilai kontribusi terkecil dengan menggunakan harga berlaku, sebagai berikut:

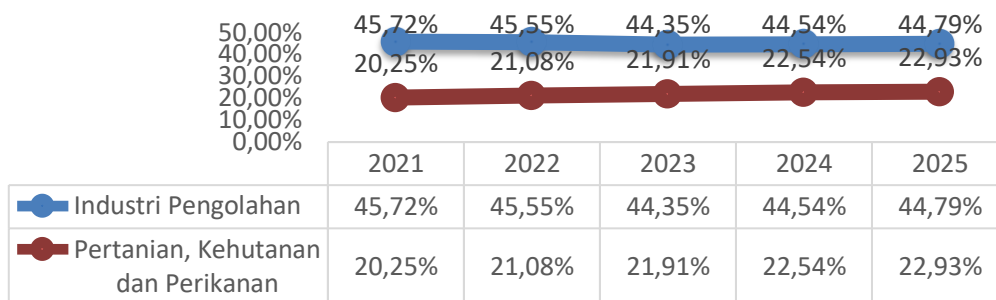
Grafik 1.2.
Persentase PDRB Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2025 (Atas Dasar Harga Berlaku)



Menyimak data diatas, pada tahun 2025, sektor industri pengolahan masih merupakan sektor tertinggi yang memberikan peranan terhadap total PDRB Kabupaten Batu Bara.

Berikut ini grafik lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi bagi PDRB Kabupaten Batu Bara dari tahun 2020-2024:

Grafik 1.3.
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Serta Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Periode 2021-2025 (Atas Dasar Harga Berlaku)



Sumber: BPS Kabupaten Batu Bara; BARADA 2026

D. KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, pada tahun 2025, Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Batu Bara merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah pertumbuhan penduduk yang mencapai 3,09 persen pada tahun 2025. Dengan jumlah penduduk mencapai 479.667 jiwa, dinamika ketenagakerjaan dipengaruhi secara signifikan oleh struktur demografi di mana angkatan kerja didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan persentase sebesar 37,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Batu Bara secara kualitas memiliki potensi besar untuk diserap dalam sektor-sektor produktif yang membutuhkan keterampilan menengah.

Sektor Industri Pengolahan tetap menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah dengan kontribusi sebesar 44,79 persen terhadap PDRB, diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,93 persen. Kondisi ini berbanding lurus dengan status pekerjaan masyarakat, di mana lebih dari sepertiga penduduk yang bekerja (31,2 persen) berstatus sebagai buruh atau karyawan.

Distribusi penyerapan tenaga kerja secara spasial menunjukkan pemusatan di wilayah-wilayah industri. Kecamatan Sei Suka tercatat sebagai wilayah dengan konsentrasi industri tertinggi, menampung 109 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja terdaftar mencapai 8.150 orang. Hal ini menegaskan peran strategis kawasan industri dalam menekan angka pengangguran di daerah.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu Bara terjaga positif pada angka 3,39 persen, tantangan dalam memfasilitasi pencari kerja tetap menjadi prioritas. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan, tercatat sebanyak 147 pencari kerja terdaftar pada tahun 2025, dengan komposisi laki-laki sebanyak 86 orang dan perempuan 61 orang. Selain itu, sektor pendukung seperti PDAM juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja teknis sebanyak 65 orang yang tersebar di berbagai kecamatan untuk mendukung infrastruktur daerah.

Secara keseluruhan, indikator ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara menunjukkan tren yang stabil dengan ketergantungan yang kuat pada sektor manufaktur dan pertanian. Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk menyelaraskan kualitas pendidikan angkatan kerja dengan kebutuhan industri, terutama dalam mengoptimalkan potensi kecamatan-kecamatan pusat pertumbuhan ekonomi guna memastikan pertumbuhan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Batu Bara.

E. KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sangat membantu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di Kabupaten Batu Bara terdapat 4 unit rumah sakit, 15 unit puskesmas, sebanyak 61 unit puskesmas pembantu, posyandu sebanyak 529 unit, Poliklinik sebanyak 28 unit serta polindes sebanyak 34 unit.

Tenaga medis yang tersedia di Kabupaten Batu Bara baik negeri maupun swasta terdiri dari 139 orang dokter umum, 73 orang dokter spesialis, 33 orang dokter gigi dan perawat 324 orang. Sementara itu tenaga medis pemerintah lainnya seperti bidan ada 567 orang, tenaga kefarmasian ada 63 orang, tenaga kesehatan masyarakat 64 orang, tenaga kesehatan lingkungan ada 15 orang, tenaga gizi 25 orang dan ahli laboratorium medis ada 2 orang.

Di Kabupaten Batu Bara, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2025 jumlah PUS bertambah menjadi 62.349 pasangan dari 59.374 pasangan pada tahun 2024.

F. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indek Pembangunan manusia di Batu Bara terus mengalami kemajuan. Pada Tahun 2025 IPM Batu Bara mencapai 73,93 atau meningkat 0,78 poin jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 73,14. Peningkatan IPM tahun 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun hidup layak. Berdasarkan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025, IPM tertinggi di Sumatera Utara adalah Kota Medan sebesar 83,74 diikuti Kota Pematangsiantar sebesar 81,71 pada posisi kedua, dan Kota Tebing Tinggi sebesar 79,26 pada posisi ketiga.

Anak-anak yang pada tahun 2025 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,13 tahun, lebih lama 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 13,12 tahun. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,71 tahun, lebih lama 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, masyarakat Batu Bara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 11.747 juta pertahun. Angka ini lebih tinggi sebesar 374 ribu jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan pengeluaran rata-rata perkapita sebesar 11.373 juta rupiah per tahun.

F.1. Perbandingan IPM Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara

IPM sebagai indikator makro pembangunan selain memiliki makna yang positif untuk mengukur seberapa besar kinerja pembangunan daerah, juga memiliki makna penting untuk melihat disparitas wilayah. Penelaahan komparatif atas disparitas dapat dilihat dengan perbandingan antar

kabupaten/kota di Sumatera Utara, maupun dengan kabupaten/ kota secara nasional.

Dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Utara, Kota Medan memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang tertinggi sebesar 83,23. Nias Barat merupakan kabupaten/kota yang memiliki IPM terendah sebesar 66,13. Berikut tabel Perbandingan IPM se Provinsi Sumatera Utara tahun 2024:

Tabel 1.3.
Perbandingan IPM Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)/ Total Population (thousand people)				
	2022 ¹	2023 ¹	2024 ¹	2025 ¹	2026 ¹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
01 Nias	149,25	153,66	155,63	157,51	159.325
02 Mandailing Natal	484,87	496,98	505,36	513,54	521.528
03 Tapanuli Selatan	307,31	312,54	316,49	320,33	324.079
04 Tapanuli Tengah	374,73	386,90	394,91	402,90	410.849
05 Tapanuli Utara	318,42	323,10	326,99	330,86	334.715
06 Toba	212,13	213,85	216,72	219,58	222.422
07 Labuhanbatu	508,02	513,83	520,55	527,04	533.334
08 Asahan	787,68	802,56	813,72	824,60	835.180
09 Simalungun	1.021,62	1.035,92	1.051,85	1.067,50	1.082.872
10 Dairi	315,46	324,75	330,59	336,40	342.229
11 Karo	414,43	420,80	426,47	432,05	437.547
12 Deli Serdang	1.953,99	2.018,16	2.048,48	2.078,05	2.106.860
13 Langkat	1.039,93	1.066,71	1.078,68	1.089,97	1.100.570
14 Nias Selatan	373,67	382,54	389,96	397,22	404.325
15 Humbang Hasundutan	202,30	204,70	207,08	209,46	211.870
16 Pakpak Bharat	54,61	55,17	56,21	57,25	58.261
17 Samosir	139,34	141,33	143,07	144,81	146.539
18 Serdang Bedagai	668,00	682,92	691,64	700,08	708.267
19 Batu Bara	416,37	430,53	437,36	444,00	450.421
20 Padang Lawas Utara	267,28	275,45	280,60	285,66	290.671
21 Padang Lawas	267,28	275,65	280,76	285,70	290.481
22 Labuhanbatu Selatan	320,32	330,80	336,58	342,23	347.767
23 Labuhanbatu Utara	390,95	401,86	408,75	415,49	422.072
24 Nias Utara	150,78	155,87	158,68	161,44	164.166
25 Nias Barat	91,35	95,33	97,25	99,12	100.960
Kota/Municipality					
71 Sibolga	90,37	91,27	91,75	92,24	92.774
72 Tanjungbalai	179,75	183,17	185,65	188,06	190.449
73 Pematangsiantar	274,06	274,84	277,05	279,20	281.250
74 Tebing Tinggi	177,79	178,91	180,98	182,97	184.883
75 Medan	2.494,51	2.474,17	2.486,28	2.498,29	2.510.147
76 Binjai	300,01	303,27	307,17	310,93	314.552
77 Padangsidimpuan	231,06	236,22	240,07	243,84	247.535
78 Gunungsitoli	137,58	142,89	145,23	147,52	149.739
Sumatera Utara	15.115,21	15.386,64	15.588,53	15.785,84	15.978.639

F.2. Pencapaian Kapabilitas Dasar Manusia Batu Bara Tahun 2025

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar

hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.4.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batu Bara Menurut Komponen, Tahun 2021-2025

Komponen	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Harapan Hidup	Tahun	67,13	67,55	72,63	72,97	73,40
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,63	13,11	13,12	13,13
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,07	8,26	8,50	8,51	8,71
Pengeluaran Perkapita	Rp.000	10539	10755	10.933	11.373	11.747
IPM		68,58	69,51	72,56	73,14	73,92
Pertumbuhan IPM	%	0,22	0,93	3,05	0,58	0,78

G. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAH

Pemerintah Kabupaten Batu Bara di pimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan pemilihan umum kepala daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah beserta jajaran dibawahnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) Perangkat Daerah, Yakni:

- a. Sekretariat Daerah dengan 9 Bagian
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas (16 dinas)
- e. Badan (7 Badan)
- f. Kecamatan (12 Kecamatan)
- g. Kelurahan (10 Kelurahan)

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal, Pemerintah Kabupaten Batu Bara didukung oleh kekuatan sumber daya aparatur sebanyak 3.878 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 3.536 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 342 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

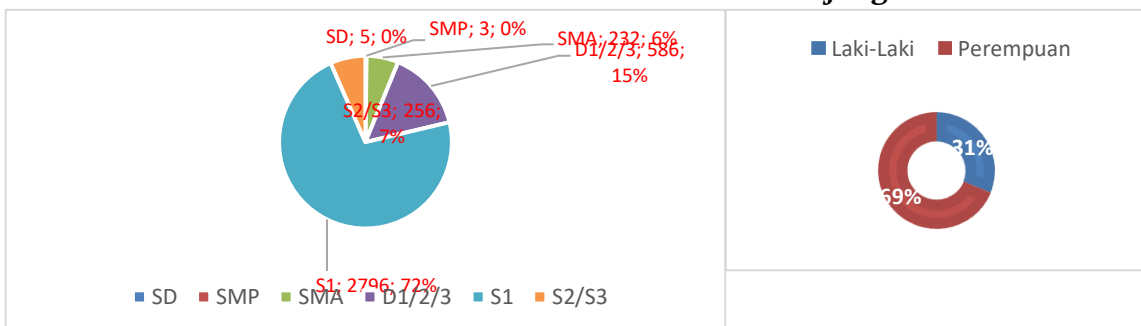
Ditinjau dari perspektif jender, profil aparatur Kabupaten Batu Bara didominasi oleh perempuan. Pada kelompok PNS, komposisi perempuan mencapai 2.396 orang (67,76%), sementara laki-laki berjumlah 1.140 orang (32,24%). Tren yang sama terlihat pada kelompok PPPK, di mana proporsi perempuan mencapai 79,53% (272 orang) dibandingkan laki-laki yang sebesar 20,47% (70 orang). Hal ini menunjukkan peran signifikan aparatur perempuan dalam roda birokrasi daerah.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara memiliki komitmen kuat dalam menciptakan birokrasi yang cerdas (*smart governance*) melalui pemenuhan kualifikasi pendidikan yang mumpuni. Secara keseluruhan (PNS dan PPPK), profil pendidikan aparatur menunjukkan dominasi tenaga profesional berpendidikan tinggi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan Tinggi (S1/S2/S3): Sebagian besar aparatur telah menempuh pendidikan sarjana (S1) sebanyak 2.796 orang (72,10%). Selain itu, terdapat 256 orang (6,60%) yang telah menyelesaikan pendidikan pascasarjana (S2/S3), yang menjadi motor penggerak inovasi dan kebijakan strategis daerah.
2. Pendidikan Diploma: Sebanyak 586 orang (15,11%) aparatur memiliki latar belakang pendidikan Diploma, yang memperkuat aspek teknis pelayanan.
3. Pendidikan Menengah dan Dasar: Sisanya terdiri dari lulusan SMA sebanyak 232 orang (5,98%), serta lulusan SD dan SMP sebanyak 8 orang (0,21%) yang menempati posisi pendukung administratif dan lapangan.

Kombinasi antara jumlah aparatur yang mencukupi dan tingkat pendidikan yang didominasi oleh lulusan sarjana (S1/S2/S3) mencapai lebih dari 78%. Hal ini merupakan modalitas penting bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi, percepatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, serta pemberian pelayanan publik yang lebih prima dan akuntabel kepada masyarakat.

Grafik 1.4 Jumlah ASN Per Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan



H. ISU STRATEGI

Manfaat Isu Strategis dalam Pembangunan Daerah Identifikasi isu strategis merupakan instrumen krusial dalam pembangunan daerah yang berfungsi sebagai jembatan antara kondisi riil di lapangan dengan visi masa depan. Dengan memetakan isu strategis, Pemerintah Kabupaten Batu Bara dapat menetapkan prioritas yang tepat guna (efektif) dan berdaya guna (efisien), sehingga sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan pada program-program yang memiliki daya ungkit (*leverage*) terbesar bagi kesejahteraan masyarakat. Isu strategis ini memberikan arah bagi birokrasi agar tidak sekadar menjalankan rutinitas, melainkan fokus pada pemecahan masalah mendasar seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif.

Isu Strategis dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029 Berdasarkan dokumen RPJMD 2025-2029, Kabupaten Batu Bara telah menetapkan fondasi strategis yang berfokus pada **Akselerasi Transformasi Ekonomi melalui optimalisasi sektor industri, pertanian, dan perikanan**. Isu utama yang menjadi perhatian adalah bagaimana bonus demografi dapat dikelola melalui **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang diukur melalui kenaikan IPM, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan Harapan Lama Sekolah**. Selain itu, **Ketahanan Lingkungan** menjadi isu kunci untuk menjaga keseimbangan antara pesatnya pembangunan kawasan industri dengan kelestarian lahan pertanian produktif, serta **Transformasi Tata Kelola Pemerintahan** yang menuntut peningkatan profesionalitas ASN dan digitalisasi pelayanan publik.

ANALISIS KESELARASAN DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah memastikan adanya konsistensi yang kuat antara visi jangka menengah (RPJMD) dengan rencana kerja tahunan. Analisis pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 menunjukkan bahwa arah kebijakan tahun berjalan merupakan derivasi langsung dari isu strategis RPJMD. Hal ini terbukti dari penetapan prioritas "Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan dan Konektivitas" yang selaras dengan isu pembangunan wilayah, serta target-target konkret dalam Perjanjian Kinerja (PK) Bupati, seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (85,02) dan Indeks Profesionalitas ASN (71). Sinkronisasi ini menegaskan bahwa kebijakan tahunan bukan merupakan entitas yang berdiri

sendiri, melainkan langkah operasional yang terukur untuk menjamin keberlanjutan capaian indikator makro daerah menuju terwujudnya masyarakat Batu Bara yang lebih sejahtera.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi daerah dan tantangan masa depan, maka isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender Dan Pemenuhan Terhadap Hak Anak, Ketangguhan Bencana Serta Pelayanan Dasar.
2. Belum optimalnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Melalui Penguatan Konektivitas Dan Pengembangan Antar Wilayah Dengan Pusat-Pusat Kegiatan Strategis Daerah Yang Berbasis Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Belum optimalnya Daya Saing, Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penguatan Dan Peningkatan Nilai Tambah Pada Sektor Industri, Pertanian, Perikanan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
4. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Serta Pelayanan Publik Berbasis Sistem Teknologi Informasi Dan Inovasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

2.1. Kerangka Logika Perencanaan Masa Transisi

Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 berada pada titik strategis transisi perencanaan. Untuk menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pasca berakhirnya periode kepemimpinan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggunakan **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026** sebagai instrumen instruktif sementara.

Namun, seiring dengan dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara terpilih pada 20 Februari 2025, tonggak perencanaan daerah kini beralih dan bersinergi dengan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029**. Keberadaan RPJMD ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang menjadi rujukan utama agenda pembangunan lima tahunan.

2.2. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Batu Bara tahun 2025-2029 menjadi pedoman tertinggi dalam mengarahkan kebijakan daerah, yaitu:

"Mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia."

Visi tersebut bukan sekadar rangkaian kata formal, melainkan sebuah pernyataan strategis (*strategic intent*) yang menegaskan arah masa depan daerah. Makna mendalam dari visi tersebut dapat dijabarkan melalui tiga aspek utama:

1. Fokus pada Sektor Unggulan sebagai Lokomotif Ekonomi

Visi ini menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat Batu Bara akan dicapai melalui **Transformasi Ekonomi** yang terukur. Penekanannya terletak pada optimalisasi sektor-sektor unggulan daerah, yakni **Industri Pengolahan, Pertanian, dan Perikanan**. Transformasi yang dimaksud adalah peralihan dari sekadar penyedia bahan baku menjadi entitas ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah (*value-added*). Dengan mengintegrasikan sektor industri di kawasan strategis

(seperti Sei Suka) dengan sektor pertanian dan perikanan di wilayah pedesaan, Kabupaten Batu Bara memosisikan diri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan tidak hanya bergantung pada bantuan pusat.

2. Optimalisasi Sektor Unggulan Berbasis Letak Geografis (Hinterland & Port)

Secara geografis, Kabupaten Batu Bara terletak di jalur perlintasan utama Pantai Timur Sumatera dan memiliki garis pantai yang panjang. Hal ini menjadikan Batu Bara sebagai **Gerbang Ekonomi Internasional** melalui keberadaan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung.

- **Transformasi Ekonomi** dalam visi ini diarahkan untuk mengintegrasikan potensi wilayah pedalaman (*hinterland*) yang kaya akan hasil pertanian dan perkebunan dengan kawasan industri pesisir.
- Geografi yang strategis ini menuntut Batu Bara tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pemain utama dalam rantai pasok global, sehingga sektor industri dan jasa logistik menjadi sektor unggulan yang diprioritaskan.

3. Identitas dan Diferensial Daerah

Kalimat ini mempertegas identitas Kabupaten Batu Bara sebagai "**Kabupaten Industri yang Berbasis Potensi Lokal**". Diferensiasi atau pembeda utama Batu Bara dengan daerah lain adalah keberanian untuk menyandingkan kemajuan teknologi industri dengan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter. Identitas ini membangun citra daerah yang terbuka terhadap investasi nasional dan global, namun tetap memegang teguh kemandirian ekonomi masyarakatnya. Batu Bara tidak hanya ingin dikenal sebagai wilayah transit, tetapi sebagai daerah tujuan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi karena keunikan integrasi antara kawasan industri besar dengan produktivitas rakyatnya.

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan daerah yang telah memiliki aspek mendasar sebagai daerah industri, perdagangan, jasa dan pertanian. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah.

Visi ini membawa harapan besar bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Batu Bara. Harapan yang ingin diwujudkan adalah lahirnya tatanan masyarakat yang:

- **Sejahtera:** Di mana kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan melalui terbukanya lapangan kerja dari hasil transformasi ekonomi.

- **Mandiri:** Masyarakat yang memiliki ketangguhan ekonomi dan mampu mengelola potensi alamnya secara cerdas.
- **Berdaya Saing:** Lahirnya generasi muda Batu Bara yang unggul, sehat, dan memiliki kompetensi global sehingga mampu menjadi tuan rumah di tanah sendiri, terutama dalam mengisi kebutuhan tenaga kerja profesional di berbagai sektor industri yang berkembang.

Visi tersebut kemudian diwujudkan melalui misi-misi strategis yang menitikberatkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani, yaitu:

1. Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Berorientasi Pelayanan dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat,
2. Menjaga Amanah dan Kepercayaan yang diberikan Masyarakat untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah,
3. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Batu Bara yang Harmonis untuk Mendorong Peran Serta Masyarakat Apapun Latar Belakangnya untuk Pembangunan Daya Saing Daerah yang Kondusif,
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Akuntabel dalam Melaksanakan Tugas dengan Jujur, Bertanggungjawab, Cermat, Disiplin, dan Berintegritas Tinggi,
5. Mewujudkan Masyarakat yang Giat Berbasis Religius, Berbudaya dan Berkarakter Kuat sebagai Pondasi Pembangunan Daerah,
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemeberantasan kemiskinan,
7. Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, disusun proses bisnis yang menguraikan aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari aspek utama, pendukung/manajerial. Namun, sebelum menyusun proses bisnis, terlebih dahulu diidentifikasi keterkaitan visi dan misi yang digambarkan dalam bagan berikut ini:

Bagan Keterkaitan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batu Bara



Ketujuh misi saling berkaitan dan membentuk strategi pembangunan yang holistik bagi Kabupaten Batu Bara, misi 1 dan 5 berfokus pada penguatan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan, misi 2 dan 6 menitik beratkan pada Transformasi ekonomi sebagai pendorong utama, misi 2 dan 7 menitikberatkan pada Penguatan kedaulatan pangan dan penurunan angka ketergantungan wilayah, misi 3, 4 dan 6 memastikan Peningkatan realisasi investasi yang lebih baik. agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Batu Bara berbasis 6 misi ini diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara penguatan ekonomi, infrastruktur, SDM, tata kelola pemerintahan, kelestarian lingkungan, dan kehidupan sosial yang harmonis. Dengan pendekatan ini, pembangunan dapat berjalan terarah, berkelanjutan, dan inklusif, guna mencapai visi daerah yang beriman, mandiri, maju, sejahtera, dan berjaya.

Jika 6 misi Kabupaten Batu Bara ditransformasikan ke dalam perencanaan pembangunan, maka secara garis besar akan terbentuk 4 pilar utama pembangunan yang saling terintegrasi:

1. Sumber Daya Manusia Unggul → Pendidikan, Kesehatan, Karakter, Religi.

2. Transformasi Ekonomi → Industri, Pertanian Modern, Inovasi.
3. Mandiri → Kedaulatan Pangan, Pemerataan Pendapatan.
4. Berdaya saing → Iklim Investasi, Akuntabilitas, Inovasi

Dengan memperhatikan 4 Pilar Pembangunan Kabupaten Batu Bara maka Prioritas pembangunan ditentukan berdasarkan dampak strategisnya terhadap pencapaian visi daerah. Urutan prioritas disusun secara bertahap dari fondasi utama hingga sektor pendukung yang memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Batu Bara pada Rencana Pembangunan Daerah dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

Pilar 1: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul dan Berkualitas

Pilar ini merupakan manifestasi dari misi peningkatan kualitas hidup dan daya saing insan di Kabupaten Batu Bara.

- **Arah Kebijakan/Prioritas:**
 - Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan masyarakat.
 - Percepatan penurunan prevalensi *stunting* dan peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak.
 - Penguatan ketahanan sosial dan budaya melalui internalisasi nilai-nilai karakter dan kearifan lokal.
 - Transformasi pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan kerja yang adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja industri.

Pilar 2: Transformasi Ekonomi Wilayah dan Penguatan Sektor Unggulan

Pilar ini berfokus pada perubahan struktur ekonomi melalui optimalisasi potensi lokal (Pertanian, Kelautan, dan Industri).

- **Arah Kebijakan/Prioritas:**
 - Akselerasi hilirisasi komoditas unggulan sektor **Pertanian** dan **Perikanan** melalui penguatan nilai tambah produk pascapanen.
 - Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM yang berdaya saing.
 - Peningkatan daya tarik investasi melalui sinkronisasi potensi daerah dengan kawasan strategis nasional (Kuala Tanjung).
 - Penguatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui program kedaulatan pangan dan perluasan lapangan kerja.

Pilar 3: Infrastruktur Strategis dan Pengembangan Wilayah Terintegrasi

Pilar ini diarahkan untuk mendukung konektivitas dan penyediaan sarana prasarana penunjang ekonomi dan sosial.

- **Arah Kebijakan/Prioritas:**
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan serta jembatan guna mendukung kelancaran distribusi logistik.
 - Pengembangan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas (air bersih, sanitasi, dan perumahan rakyat).
 - Penataan ruang wilayah yang konsisten dan berkelanjutan berbasis pada pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, khususnya pada wilayah pesisir.

Pilar 4: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif

Pilar ini merupakan *enabler* (pendukung) bagi keberhasilan tiga pilar lainnya melalui penguatan manajemen birokrasi.

- **Arah Kebijakan/Prioritas:**
 - Penguatan implementasi **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
 - Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan kualitas reformasi birokrasi yang berorientasi hasil.
 - Peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian.
 - Stimulasi inovasi daerah guna menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan.

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Batu Bara memastikan bahwa seluruh agenda prioritas daerah memiliki keterkaitan erat dengan prioritas nasional dan arah kebijakan Provinsi Sumatera Utara. Sinkronisasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi pendanaan dan efektivitas pencapaian target pembangunan makro.

Tabel. 2.1
Persandingan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Utara dan Prioritas Kabupaten Batu Bara

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Kabupaten Batu Bara
Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Sosial	SDM Unggul & Berkualitas (Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, Penurunan Stunting, dan Karakter Masyarakat).
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif	Reformasi Birokrasi & Tata Kelola Inovatif (Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN 71,00 dan Indeks SPBE).
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Sarana Prasarana dan Pembangunan Wilayah	Infrastruktur Strategis & Wilayah Terintegrasi (Konektivitas jalan distribusi pertanian dan layanan dasar air bersih/hunian).
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Mandiri	Transformasi Ekonomi Wilayah (Hilirisasi Pertanian dan Perikanan serta Sinkronisasi Kawasan Industri Kuala Tanjung).
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Aspek Lingkungan Mitigasi bencana pesisir dan penataan ruang berkelanjutan.

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah 2025-2029 Kabupaten Batu Bara dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi capaian periode sebelumnya termasuk tahapan-tahapan yang dirumuskan di dalamnya dan analisis faktor internal maupun faktor eksternal berdasarkan hasil telaah visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Analisis faktor-faktor internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sedangkan analisis faktor-faktor eksternal diperlukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Batu Bara dalam mencapai tujuan pembangunan. Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Batu Bara disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya indeks Profesionalitas ASN	Optimalisasi tata kelola pemerintah daerah dan kualitas sumberdaya ASN	
	Meningkatnya Kepatuhan Standar pelayanan Publik	Pemenuhan dan Peningkatan standar pelayanan publik	
	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Peningkatan Layanan Pemerinah Berbasis Elektronik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	
2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Peningkatan Nilai Tambah produk industri pengolahan	
	Meningkatnya Kontribusi Akomodasi dan Penyediaan Makan minum	Peningkatan Tata Kelola Akomodasi dan Penyediaan makan minum, Pariwisata	
	Meningktanya Kunjungan Wisatawan		
	Meningkatnya Kontribusi perdagangan dalam PDRB	Peningkatan Nilai Tambah Perdagangan	
	Meningkatnya Level Skala Usaha Mikro		Peningkatan Kualitas UMKM
			Peningkatan Kualitas Koperasi
	Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan perikanan		Peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas
	Meningkatnya Masyarakat Digital	Peningkatan kualitas digitalisasi untuk masyarakat	
	Meningkatnya Kontribusi Sektor transportasi dan pergudangan dalam PDRB	Peningkatan Nilai Tambah transportasi pergudangan	
		Peningkatan Infrastruktur Jalan	
	Meningkatnya Produk Modal Tetap Bruto	Peningkatan Kualitas Penanaman modal, investasi	
	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Peningkatan sektor pemukiman	
	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Optimaliasi Rasio Kapasitas Fiskal Daerah terhadap PDRB	
	Menciptakan Stabilitas Inflasi	Penguatan Stabilisasi inflasi	

3	Terjaganya Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Terjaganya stabilitas Gangguan Ketertiban Umum	Penguatan Stabilitas Sosial Kemasyarakatan
4	Meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya indeks Reformasi Hukum	Peningkatan Reformasi Hukum
		Meningkatnya Opini BPK	Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah
		Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Peningkatan Tata kelola Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
		Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan daerah	Peningkatan Pengelolaan keuangan Daerah
5	Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja
		Meningkatnya Cagar Budaya yang dilestarikan	Ketahanan budaya
6	Meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya Inovasi Daerah	Peningkatan riset, Kajian, Inovasi
7	Menurunnya Tingkat Kesenjangan	Meningkatnya Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Peningkatan Kualitas Jaminan Sosial Kesehatan
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	Peningkatan Kualitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
		Menurunnya Kemiskinan	Pengurangan beban pengeluaran, bantuan sosial dan jaminan sosial
		Meningkatnya Indeks Desa Membangun	Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa
		Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Peningkatan Kualitas Pembanunan Keluarga
		Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender	Penurunan Ketimpangan Gender
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

		Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Ketahanan Pangan
		Menurunnya Resiko Bencana	
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Akses, Infrastruktur Kesehatan dan Pola Hidup sehat
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Akses, Infrastruktur Pendidikan
		Meningkatnya Literasi Masyarakat	Peningkatan Pembangunan Literasi Masyarakat

Berdasarkan formulasi sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam tabel 6.1 RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029, dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kemudian dirumuskan IKU. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, yang selanjutnya dibreakdown dan menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah

Rincian hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Kabupaten Batu Bara

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Berorientasi Pelayanan dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN
				Meningkatnya Kualitas Standar pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
				Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks SPBE
2	Menjaga Amanah dan Kepercayaan yang diberikan Masyarakat untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
				Meningkatnya Kontribusi Akomodasi dan Penyediaan Makan minum	Nilai Kontribusi Akomodasi dan penyediaan makan minum
				Meningkatnya Kontribusi perdagangan dalam PDRB	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB
				Meningkatnya Level Skala Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro
				Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan
				Meningkatnya Masyarakat Digital	Indeks Masyarakat Digital
				Meningkatnya Kontribusi Sektor transportasi dan pergudangan dalam PDRB	Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan dalam PDRB
				Meningkatnya Produk Modal Tetap Bruto	Pembentukan Produk Modal Tetap Bruto
				Meningkatnya Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator
				Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
3	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Batu Bara yang Harmonis untuk Mendorong Peran Serta Masyarakat Apapun Latar Belakangnya untuk Pembangunan Daya Saing Daerah yang Kondusif	Terjaganya Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Terjaganya stabilitas Gangguan Ketertiban umum	Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani
4	Mewujudkan Tata Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Akuntabel dalam Melaksanakan Tugas dengan Jujur, Bertanggungjawab, Cermat, Disiplin, dan Berintegritas Tinggi	Meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum
				Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
5	Mewujudkan Masyarakat yang Giat Berbasis Religius, Berbudaya dan Berkarakter Kuat sebagai Pondasi Pembangunan Daerah.	Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja
				Meningkatnya Kelestarian Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan
6	Mendorong Inovasi dan Kreatifitas disegala bidang pembangunan untuk meningkatkan daya saing Daerah	Meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah	Indeks Daya saing Daerah	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah
7	Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Tingkat Kesenjangan	Indeks Gini	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator
				Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun
				Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga
				Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan
				Menurunnya Kualitas Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup
				Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
					Harapan Lama Sekolah
				Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat

8. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.4.
Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Batu Bara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator		Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,00
2	Meningkatnya indeks Profesionalitas ASN	2.1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	77
3	Meningkatnya Kualitas Standar pelayanan Publik	3.1	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks	93,5
4	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	4.1	Indeks SPBE	Persen	2,87
5	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	5.1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan		44,70
6	Meningkatnya Kontribusi Akomodasi dan Penyediaan Makan minum	6.1	Nilai Kontribusi Akomodasi dan penyediaan makan minum	Persen	1,16
7	Meningkatnya Kontribusi perdagangan dalam PDRB	7.1	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	18,17
8	Meningkatnya Level Skala Usaha Mikro	8.1	Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro	Persen	3,62
9	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan	9.1	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan	Persen	22,84
10	Meningkatnya Masyarakat Digital	10.1	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	45,60
11	Meningkatnya Kontribusi Sektor transportasi dan pergudangan dalam PDRB	11.1	Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan dalam PDRB	Persen	3,86
12	Meningkatnya Produk Modal Tetap Bruto	12.1	Pembentukan Produk Modal Tetap Bruto	Persen	19,76
13	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	13.1	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	0,335
14	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	14.1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin	75,00
15	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Harmonis di Kabupaten Batu Bara	15.1	Indeks Harmoni Indonesia (Kabupaten Batu Bara)	Indeks	6

16	Meningkatnya indeks Reformasi Hukum	16.1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	83
17	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	17.1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP
		17.2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	81,12
18	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	18.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	64,87
19	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	19.1	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Persen	72,50
20	Meningkatnya Kelestarian Budaya	20.1	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	50
21	Meningkatnya Inovasi Daerah	21.1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	47,26
22	Menurunnya Kemiskinan	22.1	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,68
23	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	23.1	Indeks Desa Membangun	Indeks	72,91
24	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	24.1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	61,00
25	Menurunnya Ketimpangan Gender	25.1	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,37
26	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	26.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,00
27	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Pangan	27.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,45
28	Menurunnya Kualitas Resiko Bencana	28.1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	143,20
29	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	29.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,30
30	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	30.1	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,68
		30.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,17
31	Meningkatnya Literasi Masyarakat	31.1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	75,50

Program dan anggaran perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mendukung capaian sasaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja 2025
Pemerintah Kabupaten Batu Bara

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.128.803.521	PAPBD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	27.205.513.800	PAPBD
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	863.418.800	PAPBD
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	526.628.600	PAPBD
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.382.596.299	PAPBD

6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	472.089.027	PAPBD
7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	140.430.000	PAPBD
8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.714.819.400	PAPBD
9	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	155.800.000	PAPBD
10	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	264.798.000	PAPBD
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	805.000.000	PAPBD
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.114.200.000	PAPBD
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	397.500.000	PAPBD
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.558.800.000	PAPBD
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	105.458.000	PAPBD
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.413.754.708	PAPBD
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	338.000.000	PAPBD
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5.293.455.000	PAPBD
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.666.500	PAPBD
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	53.480.000	PAPBD
21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	540.861.100	PAPBD
22	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.227.828.000	PAPBD
23	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.312.971.005	PAPBD
24	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	408.153.000	PAPBD
25	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	97.824.528.540	PAPBD
26	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.983.082.196	PAPBD
27	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	325.259.670	PAPBD

28	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	7.616.003	PAPBD
29	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	88.187.500	PAPBD
30	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.253.152.140	PAPBD
31	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	380.000.000	PAPBD
32	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	12.684.574.764	PAPBD
33	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	554.924.244	PAPBD
34	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.010.676.300	PAPBD
35	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	46.188.273	PAPBD
36	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	405.200.000	PAPBD
37	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	563.005.000	PAPBD
38	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	14.170.000	PAPBD
39	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	488.766.000	PAPBD
40	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	43.670.000	PAPBD
41	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	765.993.600	PAPBD
42	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	67.154.098	PAPBD
43	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.161.580.240	PAPBD
44	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.600.000	PAPBD
45	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.007.913.460	PAPBD
46	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	489.922.910	PAPBD
47	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.043.824.551	PAPBD
48	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.130.340.550	PAPBD
49	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	297.210.000	PAPBD
50	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	216.148.640.598	PAPBD
51	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	72.400.000	PAPBD
52	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.305.153.878	PAPBD

53	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	91.772.123.884	PAPBD
54	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	935.060.020	PAPBD
55	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.101.809.530	PAPBD
56	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.432.987.556	PAPBD
57	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	25.000.000	PAPBD
58	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.134.419.579	PAPBD
59	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	118.000.000	PAPBD
60	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	108.684.000	PAPBD
61	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.445.463.732	PAPBD
62	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	756.638.240	PAPBD
63	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	737.572.620	PAPBD
64	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	305.970.500	PAPBD
65	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	52.850.000	PAPBD
66	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.494.515.000	PAPBD
67	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	637.782.538	PAPBD
68	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	249.080.000	PAPBD
69	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	282.248.000	PAPBD
70	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	272.760.000	PAPBD
71	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	213.219.792	PAPBD
72	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.200.037.522	PAPBD
73	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	57.766.000	PAPBD
74	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.730.185.519	PAPBD
75	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.545.290.302	PAPBD
76	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	320.149.700	PAPBD
77	PROGRAM PENINGKATAN	7.153.071.500	PAPBD

	KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
78	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	214.961.980	PAPBD
79	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.710.304.000	PAPBD
80	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.362.486.000	PAPBD
81	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	303.300.000	PAPBD
82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	664.130.006.299	PAPBD
83	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.367.309.951	PAPBD
84	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.628.737.609	PAPBD
85	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	58.054.734.838	PAPBD
86	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	13.280.394.879	PAPBD
87	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	130.764.546	PAPBD
88	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	154.531.244	PAPBD
89	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	757.765.000	PAPBD
90	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	171.625.000	PAPBD
91	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	51.500.000	PAPBD
92	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.255.807.567	PAPBD
93	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.262.837.000	PAPBD
94	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.904.274.617	PAPBD
95	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	63.575.000	PAPBD
96	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	959.501.031	PAPBD
97	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.107.422.360	PAPBD

98	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	268.409.000	PAPBD
99	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.153.200.000	PAPBD
100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.830.738.220	PAPBD
101	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	375.662.150	PAPBD
102	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	54.940.000	PAPBD
103	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	9.750.000	PAPBD
	JUMLAH	1.320.277.983.100	

2.4. Keselarasan Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Batu Bara menjamin adanya konsistensi yang kuat antara visi jangka menengah (RPJMD) dengan rencana kerja tahunan (RKPD). Analisis pada dokumen **Perubahan RKPD Tahun 2025** menunjukkan bahwa arah kebijakan tahun berjalan merupakan derivasi langsung dari isu strategis daerah.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mencapai target tersebut, Bupati Batu Bara telah menetapkan **Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025** pada tanggal 5 November 2025. Perjanjian kinerja ini memuat target-target indikator strategis yang harus dicapai, di antaranya:

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat:** Ditargetkan sebesar **85,02** (sebagai perwujudan peningkatan kualitas pelayanan publik).
2. **Indeks Profesionalitas ASN:** Ditargetkan sebesar **71** (sebagai upaya transformasi tata kelola birokrasi).

Dengan adanya keselarasan dari level perencanaan makro (RPJMD) hingga ke tingkat operasional (PK), diharapkan setiap rupiah anggaran yang tertuang dalam APBD dapat dipertanggungjawabkan keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara secara berkelanjutan.

9. ANGGARAN TAHUN 2025

Selama tahun 2025 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk meraih target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara dengan total anggaran belanja Operasi sebesar Rp. 990.364.043.875,00 atau 74,79% dari total anggaran Rp. 1.324.277.983.100,00.

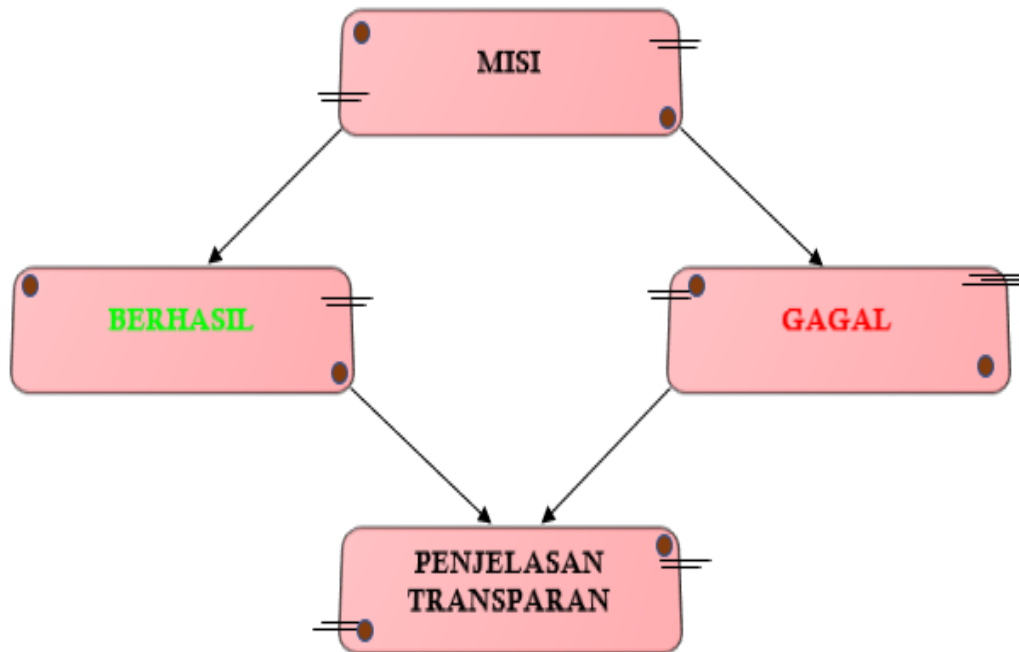
Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025, komposisi belanja APBD Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Anggaran Belanja 2025

No	Uraian	Rencana Belanja (Rp)	Persentase
1	Belanja Operasi	990.364.043.875,00	74,79%
2	Belanja Modal	120.005.722.308,00	9,06%
3	Belanja Tidak Terduga	2.103.392.527,00	0,16%
4	Belanja Transfer	211.804.824.390,00	15,99%
	Jumlah	1.324.277.983.100,00	100,00%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Pemerintah Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab ini menyajikan gambaran mengenai capaian kinerja instansi selama tahun anggaran berjalan yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Predikat Nilai Capaian Kinerja Dalam Skala Pengukuran Ordinal

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100	Tidak tercapai	
= 100	Tercapai sesuai target	
> 100	Melebihi target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01	Sangat Tinggi
2	75,01 - 90	Tinggi
3	65,01 - 75	Sedang
4	50,01 - 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

Tahun 2025 menjadi tahun yang krusial dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Batu Bara. Berbagai program dan kebijakan strategis yang telah dirancang sebelumnya mulai menunjukkan hasil nyata dalam berbagai sektor,

mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi daerah, hingga penguatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Capaian kinerja utama tahun ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi unggulan daerah. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, berbagai indikator utama pembangunan mengalami kemajuan yang signifikan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Laporan ini akan menguraikan pencapaian utama sepanjang tahun 2025, menyoroti progres terhadap target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi tantangan yang masih perlu diatasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Penghitungan persentase capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$= \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$= \frac{\textit{Target}}{\textit{Realisasi}} 100\%$$

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, hal utama yaitu memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

A.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kinerja pemerintah Kabupaten Batu Bara selalu berupaya untuk dioptimalkan Sesuai dengan perkembangan, dinamika dan tuntutan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan derajat pelayanan. Oleh karena itu, segala

program pembangunan pemerintah daerah selalu diarahkan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dengan merencanakan berbagai macam program dan kegiatan untuk mencapai target-target indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berupaya memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2025-2029. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Batu Bara Tahun 2025, telah ditetapkan 30 (tiga puluh) sasaran dengan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.

**Rincian sasaran dan indikator kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
Bupati Batu Bara 2025**

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	1 Indikator
2	Meningkatnya indeks Profesionalitas ASN	1 Indikator
3	Meningkatnya Kualitas Standar pelayanan Publik	1 Indikator
4	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	1 Indikator
5	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	1 Indikator
6	Meningkatnya Kontribusi Akomodasi dan Penyediaan Makan minum	1 Indikator
7	Meningkatnya Kontribusi perdagangan dalam PDRB	1 Indikator
8	Meningkatnya Level Skala Usaha Mikro	1 Indikator
9	Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan perikanan	1 Indikator
10	Meningkatnya Masyarakat Digital	1 Indikator

11	Meningkatnya Kontribusi Sektor transportasi dan perdagangan dalam PDRB	1 Indikator
12	Meningkatnya Produk Modal Tetap Bruto	1 Indikator
13	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	1 Indikator
14	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	1 Indikator
15	Terjaganya stabilitas Gangguan Ketertiban umum	1 Indikator
16	Meningkatnya indeks Reformasi Hukum	1 Indikator
17	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Indikator
18	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1 Indikator
19	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	1 Indikator
20	Meningkatnya Kelestarian Budaya	1 Indikator
21	Meningkatnya Inovasi Daerah	1 Indikator
22	Menurunnya Kemiskinan	1 Indikator
23	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	1 Indikator
24	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	1 Indikator
25	Menurunnya Ketimpangan Gender	1 Indikator
26	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indikator
27	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Pangan	1 Indikator
28	Menurunnya Kualitas Resiko Bencana	1 Indikator
29	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Indikator
30	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	2 Indikator
31	Meningkatnya Literasi Masyarakat	1 Indikator

Secara umum Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Bupati Batu Bara nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.4.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

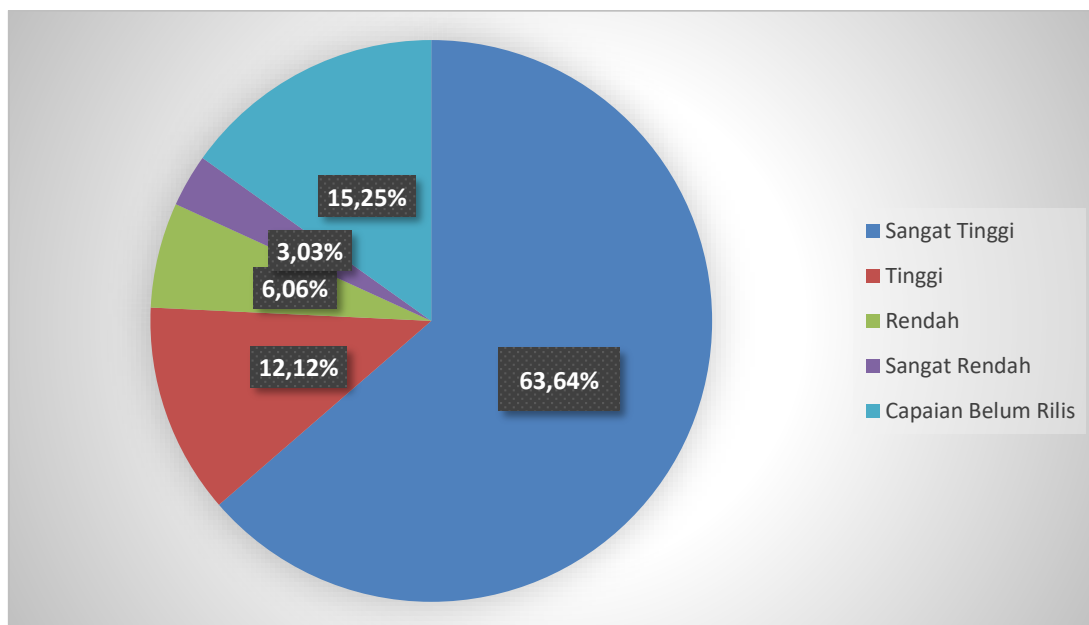
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2025	capaian	% capaian	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,00	88,91	104,58%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77	80,32	104,31	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Standar pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	93,5	Tidak menjadi lokus pada tahun 2025	-	-
4	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks SPBE	Indeks	2,87	2,74	95,47	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	44,70	44,79	100,20	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Kontribusi Akomodasi dan Penyediaan Makan minum	Nilai Kontribusi Akomodasi dan penyediaan makan minum	Persen	1,16	1,03	88,79	Tinggi
7	Meningkatnya Kontribusi perdagangan dalam PDRB	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	18,17	18,16	99,94	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Level Skala Usaha Mikro menjadi skala kecil	Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro menjadi skala kecil	Persen	3,62	1,88	51,93	Rendah
9	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan dalam PDRB	Persen	22,84	22,93	100,39%	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya Masyarakat Digital	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	45,60	41,92	91,93	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Kontribusi Sektor transportasi dan pergudangan dalam PDRB	Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan dalam PDRB	Persen	3,86	3,11	80,75	Tinggi
12	Meningkatnya Produk Modal Tetap Bruto	Pembentukan Produk Modal Tetap Bruto	Persen	19,76	17,44	88,26	Tinggi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2025	capaian	% capaian	Predikat
13	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	0,335	0,370	110,45	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Point	75,00	Belum Rilis	-	-
15	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Harmonis di Kabupaten Batu Bara	Indeks Harmoni Indonesia (Kabupaten Batu Bara)	Indeks	6	Pelaksanaan Baru akan dilaksanakan tahun 2026 oleh Kemendagri	-	-
16	Meningkatnya indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	83	96,96	116,82	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	Belum Rilis disebabkan masih dalam proses audit BPK	-	-
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	81,12	46,66	57,52	Rendah
18	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	64,87	64,35	99,20	Sangat Tinggi
19	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Persen	72,50	70,31	96,98	Sangat Tinggi
20	Meningkatnya Kelestarian Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Pesen	50	50	100	Sangat Tinggi
21	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	47,26	57,64	121,96%	Sangat Tinggi
22	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,68	10,10	105,35%	Sangat Tinggi
23	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa	Persen	72,91	72,91	100%	Sangat Tinggi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2025	capaian	% capaian	Predikat
24	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	61,00	61,90	101,48	Sangat Tinggi
25	Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,37	Capaian Belum dirilis	-	-
26	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,00	73,61	103,68%	Sangat Tinggi
27	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Pangan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,45	69,31	88,35	Tinggi
28	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	143,20	143,20	100%	Sangat Tinggi
29	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,30	73,40	100,14	Sangat Tinggi
30	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,68	8,71	100,35%	Sangat Tinggi
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,17	13,13	99,70%	
31	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	75,50	9,89	13,10	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran di atas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun 2025 sebagaimana grafik berikut:

Grafik 3.2.
Capaian Indikator Kinerja
Per Sasaran Strategis Pemerintah Kab. Batu Bara Tahun 2025



Tabel.3.5.
Predikat Pencapaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Pemerintah Kab. Batu Bara 2025

NO	Rata-rata % capaian	Predikat	Jumlah Indikator
1	≥ 90,01	Sangat Tinggi	21
2	75,01 - 90	Tinggi	4
3	65,01 - 75	Sedang	0
4	50,01 - 65	Rendah	2
5	≤ 50	Sangat Rendah	1
6	-	Belum Rilis	5

Adapun pengukuran kinerja dilakukan terhadap target tahunan yang dilakukan analisis terkait program dan kegiatan yang mendukung atau menghambat keberhasilannya serta permasalahan dan solusi atas keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut:

EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	85,51	99,43	87,00	88,91	104,58%

Sasaran ini merupakan muara dari seluruh rangkaian proses birokrasi di Kabupaten Batu Bara. Pelayanan publik yang prima bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen utama dalam menjalankan fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat (*public servant*). Fokus utama pada sasaran ini adalah memastikan bahwa setiap interaksi antara pemerintah dan warga negara menghasilkan nilai tambah, kemudahan, dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. IKM menjadi potret riil atas persepsi publik terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Pencapaian target IKM sebesar **85,02** pada tahun 2025 merupakan target ambisius yang mencerminkan komitmen daerah dalam mengimplementasikan **Pilar 4: Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi**.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, target IKM ditetapkan sebesar **86**, dengan realisasi sebesar **85,51**, sehingga capaian kinerja mencapai **99,43%**.

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar **85,02**, dengan realisasi sebesar **88,91**, sehingga capaian kinerja mencapai **95,62%**. Jika dilihat dari nilai realisasi indeks, terjadi **peningkatan sebesar 3,40 poin** dari Tahun 2024 ke Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Penurunan persentase capaian dari **99,43% menjadi 95,62%** tidak menunjukkan penurunan kinerja, melainkan dipengaruhi oleh perbedaan penetapan target tahunan. Secara substantif, nilai indeks yang lebih tinggi pada Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan tingkat kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Target akhir RPJMD Kabupaten Batu Bara untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat ditetapkan sebesar **88,56**. Berdasarkan capaian Tahun 2025 yang mencapai **88,91**, maka kinerja indikator ini telah **melampaui target RPJMD sebesar 0,35 poin**. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat telah berhasil dicapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Capaian ini juga menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Secara nasional, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada instansi pemerintah umumnya berada pada kisaran **88–90** yang termasuk dalam kategori **“Sangat Baik”** berdasarkan pedoman Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan capaian sebesar **88,91**, nilai IKM Kabupaten Batu Bara berada pada kategori **Sangat Baik** dan relatif sejalan dengan capaian rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah memenuhi standar pelayanan yang baik dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat sebagai penerima layanan. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Batu Bara telah berjalan secara efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web yaitu **si sukma** (sistem informasi survei kepuasan masyarakat) yang dapat diakses melalui <https://bagianorganisasi.batubarakab.go.id/skm/site/home>. Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan.

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat melibatkan seluruh perangkat daerah. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ini menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah dan didukung beberapa Perangkat Daerah seperti Inspektorat

Kabupaten Batu Bara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pendaftaran Penduduk
6. Program Pencatatan Sipil
7. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
8. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program-program tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan transparansi informasi, penguatan layanan administrasi kependudukan, peningkatan pelayanan perizinan dan investasi, serta peningkatan kualitas komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain:

1. **Penyempurnaan standar pelayanan publik** pada unit pelayanan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. **Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan** melalui pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
3. **Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik**, termasuk pengembangan sistem pelayanan berbasis digital.
4. **Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik**, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
5. **Peningkatan transparansi informasi pelayanan**, termasuk penyediaan informasi terkait prosedur pelayanan, persyaratan, dan waktu penyelesaian layanan.

6. **Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah** untuk memastikan integrasi pelayanan publik berjalan secara optimal.
7. **Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat** guna meningkatkan responsivitas pemerintah dalam menindaklanjuti keluhan dan masukan masyarakat.

Meskipun capaian indikator menunjukkan hasil yang baik, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Belum meratanya kualitas pelayanan publik pada seluruh perangkat daerah penyelenggara layanan.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan pada beberapa unit layanan publik.
3. Kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital.
4. Tingkat literasi masyarakat terhadap sistem pelayanan berbasis teknologi yang masih beragam.
5. Keterbatasan dukungan anggaran untuk pengembangan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan.

Berdasarkan Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan aplikasi SI-SUKMA, yang melibatkan seluruh unit kerja diperoleh hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,28 dan dengan jumlah korespondensi sebanyak 21.196 orang.

Tabel 3.6.

IKM Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	RESPONDEN	NILAI IKM
1	SEKRETARIAT DAERAH	109	86,67
2	SEKRETARIAT DPRD	75	92,20
3	INSPEKTORAT	69	80,48
4	DINAS PENDIDIKAN	48	95,10
5	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	42	85,56
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	4	88,11
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	30	96,66
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	32	82,90
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	87	94,96

10	DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	77,70
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPIIL	123	98,32
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	171	80,67
13	DINAS PERHUBUNGAN	0	0
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15	96,39
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	377	94,19
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	151	88,41
17	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0	0
18	DINAS PERPUSTAKAAN	421	82,15
19	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	0	0
20	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	296	84,10
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	88,80
22	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	130	80,43
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	210	89,95
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	229	83,21
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33	79,72
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13	97,34
27	KECAMATAN SEI BALAI	94	80,15
28	KECAMATAN NIBUNG HANGUS	32	84,81
29	KECAMATAN TANJUNG TIRAM	574	90,07
30	KECAMATAN TALAWI	461	89,96
31	KECAMATAN DATUK TANAH DATAR	375	90,51
32	KECAMATAN LIMA PULUH	212	97,64
33	KECAMATAN DATUK LIMA PULUH	6	83,71
34	KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR	180	84,58
35	KECAMATAN AIR PUTIH	1118	99,90
36	KECAMATAN SEI SUKA	594	86,89
37	KECAMATAN LAUT TADOR	733	98,11
38	KECAMATAN MEDANG DERAS	94	87,94
39	KELURAHAN PAGURAWAN	17	97,61
40	KELURAHAN PANGKALAN DODEK BARU	31	99,90
41	KELURAHAN PANGKALAN DODEK	52	90,13
42	KELURAHAN PERK SIPARE-PARE	83	82,06
43	KELURAHAN INDRAPURA	15	79,55
44	KELURAHAN INDRASAKTI	23	84,09
45	KELURAHAN LIMA PULUH KOTA	0	0
46	KELURAHAN LABUHAN RUKU	90	98,02

47	KELURAHAN TANJUNG TIRAM	231	82,07
48	KELURAHAN BAGAN ARYA	30	83,25
49	PUSKESMAS INDRAPURA	901	85,90
50	PUSKESMAS KEDAI SIANAM	3310	86,18
51	PUSKESMAS LABUHAN RUKU	462	85,79
52	PUSKESMAS LALANG	2218	93,13
53	PUSKESMAS LAUT TADOR	462	86,58
54	PUSKESMAS LIMA PULUH	186	88,00
55	PUSKESMAS PAGURAWAN	885	92,48
56	PUSKESMAS PEMATANG PANJANG	244	89,40
57	PUSKESMAS PETATAL	669	90,88
58	PUSKESMAS SEI BALAI	576	80,20
59	PUSKESMAS SEI BEJANGKAR	594	80,96
60	PUSKESMAS SEI SUKA	1437	87,54
61	PUSKESMAS SIMPANG DOLOK	133	91,45
62	PUSKESMAS TANJUNG TIRAM	407	85,89
63	PUSKESMAS UJUNG KUBU	114	93,33
64	RSUD BATU BARA	886	87,57

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Loker pelayanan ditambah dan dipercepat, input data bisa dengan menggunakan pelayanan internet.
2. Pelayanan sangat lama dan harus bolak balik”.
3. Untuk proses layanan pembuatan KTP lebih dipercepat lagi, untuk tahun ini sudah lebih cepat dari tahun kemarin.
4. Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan.
2. Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Penerapan **Mal Pelayanan Publik (MPP)** di Kabupaten Batu Bara telah terlaksana pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi. MPP bertujuan untuk menyatukan berbagai layanan pemerintah dalam satu lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam pengurusan berbagai dokumen dan administrasi publik.

Meskipun penerapan MPP menjanjikan berbagai manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain:

- **Integrasi Sistem Teknologi:** Agar berbagai layanan dapat diakses secara terintegrasi, perlu adanya sistem teknologi yang kuat dan terstandarisasi di seluruh instansi pemerintah yang terlibat.
- **Pelatihan dan Pengembangan SDM:** Petugas yang melayani masyarakat perlu dilatih agar dapat bekerja secara profesional, efisien, dan ramah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat.
- **Sosialisasi kepada Masyarakat:** Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang cara mengakses layanan di MPP dan keuntungan dari adanya sistem satu atap ini.

Capaian kinerja nyata dari sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik sebesar 104,58% dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	59,14	-	77	80,32	104,31%

Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Pengukuran indikator ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018** tentang Indeks Profesionalitas ASN serta **Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019** tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan empat dimensi utama, yaitu **kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin**. Keempat dimensi tersebut menggambarkan tingkat profesionalitas ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik serta mendukung terciptanya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi.

Indikator **Indeks Profesionalitas ASN** merupakan indikator baru yang mulai digunakan sebagai indikator kinerja pada Tahun 2025. Oleh karena itu, nilai indeks pada Tahun 2024 digunakan sebagai **baseline** untuk melihat perkembangan tingkat profesionalitas ASN pada tahun berikutnya.

Pada Tahun 2025, target Indeks Profesionalitas ASN ditetapkan sebesar **77** poin, dengan realisasi sebesar **80,32** poin, sehingga capaian kinerja mencapai **104,31%** dari target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2024, nilai Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2025 mengalami **peningkatan sebesar 21,18 poin**, dari **59,14 menjadi 80,32**. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Batu Bara untuk indikator **Indeks Profesionalitas ASN** ditetapkan sebesar **88,56**. Dengan capaian Tahun 2025 sebesar **80,32**, maka tingkat pencapaian terhadap target RPJMD telah mencapai sekitar **90,70%** dari target yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menunjukkan progres yang cukup baik dalam meningkatkan profesionalitas ASN. Meskipun demikian, masih diperlukan berbagai upaya lanjutan untuk meningkatkan nilai indeks agar dapat mencapai target RPJMD secara optimal pada akhir periode perencanaan.

Secara umum, nilai Indeks Profesionalitas ASN di berbagai instansi pemerintah di Indonesia masih berada pada kisaran **70–80** yang termasuk dalam kategori **sedang hingga tinggi**. Dengan capaian sebesar **80,32**, nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah berada pada kategori **tinggi** dan relatif sejalan dengan capaian rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di Kabupaten Batu Bara telah mengalami peningkatan yang cukup baik dan mampu mendukung penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih profesional dan berkinerja tinggi. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas birokrasi daerah serta mencapai target RPJMD, masih diperlukan berbagai langkah strategis dalam pengembangan kompetensi ASN, peningkatan kualitas manajemen kepegawaian, serta penguatan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara.

Pengukuran indikator ini dilakukan melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis digital yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batu Bara melalui aplikasi **SIAP (Sistem Indeks Profesional ASN)**.

Adapun proses bisnis pengukuran Indeks Profesionalitas ASN meliputi tahapan sebagai berikut:

1. **Pengumpulan dan pembaruan data ASN** yang bersumber dari sistem informasi kepegawaian daerah.
2. **Pengisian data profesionalitas oleh ASN** melalui aplikasi SIAP yang mencakup data kualifikasi pendidikan, riwayat pengembangan kompetensi, capaian kinerja, serta data disiplin ASN.
3. **Verifikasi dan validasi data oleh admin perangkat daerah** untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang diinput.
4. **Pengolahan data oleh BKPSDM** berdasarkan indikator dan bobot penilaian masing-masing dimensi profesionalitas ASN.
5. **Perhitungan nilai indeks secara sistematis melalui aplikasi** untuk menghasilkan nilai Indeks Profesionalitas ASN.
6. **Penyusunan laporan hasil pengukuran indeks** yang digunakan sebagai bahan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur.

Pada Tahun 2025 jumlah ASN yang berpartisipasi dalam pengisian data melalui aplikasi SIAP sebanyak **3.297 ASN** dari total **3.464 ASN** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Dengan demikian, tingkat partisipasi ASN dalam pengukuran indeks mencapai sekitar **95,18%**, yang menunjukkan tingkat keterlibatan aparatur yang cukup tinggi dalam proses pengukuran profesionalitas ASN.

Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. **Komitmen Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Profesionalitas ASN**

Pemerintah Kabupaten Batu Bara menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas aparatur sipil negara melalui berbagai kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Komitmen ini tercermin dari pelaksanaan program pengembangan kompetensi ASN, penguatan sistem manajemen kepegawaian, serta pembinaan disiplin aparatur secara berkelanjutan.

2. Implementasi Sistem Manajemen Kinerja ASN

Penerapan sistem manajemen kinerja ASN yang lebih terukur dan berbasis target kinerja individu memberikan dampak positif terhadap peningkatan profesionalitas ASN. Melalui sistem ini, setiap ASN didorong untuk bekerja secara lebih efektif dan bertanggung jawab dalam mencapai target kinerja organisasi.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kepegawaian melalui aplikasi **SIAP (Sistem Indeks Profesional ASN)** memberikan kemudahan dalam pengumpulan dan pengolahan data profesionalitas ASN secara lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

4. Tingginya Partisipasi ASN dalam Pengukuran Indeks

Berdasarkan data Tahun 2025, sebanyak **3.297 ASN** dari total **3.464 ASN** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah berpartisipasi dalam pengisian data pada aplikasi SIAP. Dengan demikian, tingkat partisipasi ASN dalam pengukuran indeks mencapai sekitar **95,18%**, yang menunjukkan tingkat kesadaran aparatur yang cukup tinggi dalam mendukung pengukuran profesionalitas ASN.

5. Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi ASN

Peningkatan kompetensi ASN melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik teknis, manajerial, maupun fungsional, turut berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.

6. Pembinaan dan Pengawasan Disiplin ASN

Upaya pembinaan dan pengawasan terhadap kedisiplinan ASN juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan profesionalitas aparatur, terutama dalam memastikan ASN menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan kinerja yang baik, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan profesionalitas ASN di masa mendatang.

Beberapa permasalahan strategis tersebut antara lain:

1. **Kualifikasi pendidikan ASN yang belum merata** pada seluruh perangkat daerah, terutama pada jabatan tertentu yang membutuhkan kompetensi khusus.
2. **Kesempatan pengembangan kompetensi ASN yang masih terbatas**, sehingga belum seluruh ASN memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan.
3. **Pemutakhiran data kepegawaian yang belum sepenuhnya optimal**, yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran indeks profesionalitas ASN.
4. **Perubahan kebutuhan kompetensi ASN yang semakin dinamis**, terutama dalam menghadapi era digitalisasi pemerintahan dan transformasi birokrasi.
5. **Keterbatasan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur**, yang berdampak pada keterbatasan pelaksanaan program peningkatan kompetensi ASN secara menyeluruh.

Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Profesionalitas ASN hingga mencapai target akhir RPJMD, diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara, antara lain:

1. **Peningkatan Program Pengembangan Kompetensi ASN**
Pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi ASN, baik melalui pelatihan teknis, manajerial, maupun pelatihan fungsional yang relevan dengan kebutuhan organisasi.
2. **Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN**
Perlu didorong peningkatan kualifikasi pendidikan ASN melalui pemberian kesempatan kepada ASN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur.
3. **Penguatan Sistem Merit dalam Manajemen ASN**
Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN perlu terus diperkuat, terutama dalam proses pengembangan karier, promosi jabatan, serta pengelolaan talenta ASN secara lebih objektif dan transparan.
4. **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pengembangan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi perlu terus dilakukan untuk mendukung pengelolaan data ASN secara lebih akurat dan real-time, sehingga dapat mendukung proses pengukuran profesionalitas ASN secara lebih optimal.

5. Peningkatan Disiplin dan Budaya Kerja ASN

Pemerintah daerah perlu terus mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui pembinaan disiplin ASN secara berkelanjutan.

6. Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap Profesionalitas ASN

Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian Indeks Profesionalitas ASN guna memastikan bahwa berbagai program pengembangan sumber daya manusia aparatur berjalan secara efektif dan memberikan dampak terhadap peningkatan profesionalitas ASN.

Untuk mencapai target RPJMD sebesar **88,56**, diperlukan strategi peningkatan indeks secara bertahap melalui roadmap peningkatan profesionalitas ASN sebagai berikut:

Tahun 2025

Fokus pada penguatan sistem pengukuran indeks profesionalitas ASN melalui pemanfaatan aplikasi SIAP serta peningkatan partisipasi ASN dalam pengisian data profesionalitas.

Tahun 2026

Fokus pada peningkatan kompetensi ASN melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara lebih luas serta penguatan sistem manajemen kinerja ASN.

Tahun 2027

Fokus pada penguatan sistem merit dalam manajemen ASN serta peningkatan kualitas pengelolaan talenta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Tahun 2028

Fokus pada konsolidasi dan optimalisasi seluruh kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur guna mencapai target Indeks Profesionalitas ASN sebesar **88,56**.

Pencapaian indikator **Indeks Profesionalitas ASN** pada Tahun 2025 yang mencapai nilai **80,32** tidak terlepas dari kontribusi berbagai program yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya program yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan pengelolaan kepegawaian daerah.

Program-program tersebut berperan dalam meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta profesionalitas ASN sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan berkinerja tinggi.

Adapun kontribusi program terhadap pencapaian indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan profesionalitas ASN, terutama pada dimensi **kompetensi dan kualifikasi ASN**.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, antara lain:

- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis bagi ASN.
- Pelatihan manajerial bagi pejabat struktural.
- Pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional.
- Kegiatan bimbingan teknis dan workshop peningkatan kapasitas aparatur.

Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.

Selain itu, program ini juga mendukung peningkatan kualifikasi pendidikan ASN melalui pemberian kesempatan bagi ASN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dengan meningkatnya kompetensi dan kualifikasi ASN, maka profesionalitas aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik juga mengalami peningkatan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN.

2. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah juga memiliki peran yang penting dalam mendukung peningkatan profesionalitas ASN, terutama pada dimensi **kinerja dan disiplin ASN**.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian secara lebih profesional, antara lain:

- Pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan terintegrasi.
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap disiplin ASN.
- Peningkatan kualitas manajemen kinerja ASN.
- Pemutakhiran data kepegawaian secara berkala.
- Pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi.
- Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan aplikasi **SIAP (Sistem Indeks Profesional ASN)** dalam pengukuran profesionalitas ASN. Aplikasi ini memudahkan proses pengumpulan dan pengolahan data profesionalitas ASN secara lebih sistematis dan akurat.
- Pengelolaan data kepegawaian yang lebih baik serta penerapan sistem manajemen kinerja ASN secara konsisten memberikan kontribusi terhadap peningkatan disiplin, kinerja, dan profesionalitas aparatur.

Jika dikaitkan dengan dimensi penilaian Indeks Profesionalitas ASN, maka kontribusi program terhadap peningkatan indeks dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 3.7. Kontribusi Program Terhadap Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN

Dimensi Indeks Profesionalitas ASN	Program yang Mendukung	Bentuk Kontribusi
Kualifikasi	Program Pengembangan SDM	Peningkatan jenjang pendidikan ASN
Kompetensi	Program Pengembangan SDM	Pendidikan dan pelatihan aparatur
Kinerja	Program Kepegawaian Daerah	Penguatan manajemen kinerja ASN
Disiplin	Program Kepegawaian Daerah	Pembinaan dan pengawasan disiplin ASN

Berdasarkan hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua program yang dilaksanakan memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam meningkatkan profesionalitas ASN secara menyeluruh.

Efektivitas kinerja menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2025, target Indeks Profesionalitas ASN ditetapkan sebesar **71**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **80,32**, sehingga

tingkat capaian kinerja mencapai **104,31%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan profesionalitas ASN telah berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam melampaui target yang telah ditetapkan.

Selain itu, jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2024 yang sebesar **59,14**, maka nilai indeks pada Tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar **21,18 poin**. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan profesionalitas ASN.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2025 berada dalam kategori **sangat efektif**, karena mampu melampaui target yang telah ditetapkan serta menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan efisiensi kinerja menggambarkan hubungan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Dalam konteks peningkatan Indeks Profesionalitas ASN, efisiensi dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai indeks secara signifikan melalui pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan kepegawaian.

Peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN dari **59,14 pada Tahun 2024 menjadi 80,32 pada Tahun 2025** menunjukkan bahwa berbagai program yang dilaksanakan telah memberikan hasil yang cukup optimal dalam meningkatkan profesionalitas ASN.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi **SIAP (Sistem Indeks Profesional ASN)** juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi pengukuran indikator. Sistem ini memungkinkan proses pengumpulan dan pengolahan data profesionalitas ASN dilakukan secara lebih cepat, sistematis, dan akurat dibandingkan dengan metode manual.

Tingginya tingkat partisipasi ASN dalam pengisian data melalui aplikasi SIAP yang mencapai **95,18%** juga menunjukkan bahwa sistem pengukuran indikator telah berjalan secara cukup efektif dan efisien dalam menjangkau seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Namun demikian, capaian kinerja yang melebihi target juga dapat menunjukkan bahwa target yang ditetapkan masih relatif **konservatif atau belum sepenuhnya mencerminkan potensi capaian yang dapat diraih**. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap penetapan target indikator agar lebih realistis sekaligus menantang bagi organisasi.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas dan efisiensi tersebut, terdapat beberapa implikasi penting yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan kinerja pada periode berikutnya, antara lain:

1. **Penetapan target kinerja perlu disesuaikan dengan potensi capaian organisasi**, sehingga target yang ditetapkan dapat menjadi tantangan sekaligus mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
 2. **Penguatan program pengembangan kompetensi ASN** perlu terus dilakukan untuk menjaga tren peningkatan profesionalitas aparatur.
 3. **Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian berbasis digital** perlu terus dikembangkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia aparatur.
 4. **Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap profesionalitas ASN** perlu dilakukan untuk memastikan bahwa peningkatan nilai indeks benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas kinerja aparatur.
- peningkatan kinerja pada satu periode belum tentu menjamin keberlanjutan kinerja pada periode berikutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis keberlanjutan untuk menilai apakah tren peningkatan tersebut dapat dipertahankan hingga mencapai target akhir RPJMD sebesar **88,56**.

Analisis keberlanjutan ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu **konsistensi kebijakan, keberlanjutan program pengembangan ASN, kesiapan sistem manajemen kepegawaian, serta potensi risiko yang dapat mempengaruhi capaian indikator di masa mendatang**.

Berdasarkan hasil analisis keberlanjutan, peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Batu Bara memiliki potensi untuk terus dipertahankan hingga mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem manajemen

kepegawaian, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan ASN.

Dengan penguatan berbagai kebijakan dan program yang mendukung peningkatan profesionalitas ASN, diharapkan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dapat terus meningkatkan kualitas aparatur sipil negara sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta pelayanan publik yang berkualitas.

Capaian kinerja nyata dari sasaran Meningkatnya indeks Profesionalitas ASN sebesar 104,31% dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Standar pelayanan Publik

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks	-	92,15	-	93,5	-	-

Indikator Kepatuhan Standar Pelayanan Publik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap indikator ini umumnya dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui kegiatan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang meliputi aspek ketersediaan standar pelayanan, sistem mekanisme pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk layanan, sarana prasarana pelayanan, serta pengelolaan pengaduan masyarakat.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029, indikator Kepatuhan Standar Pelayanan Publik ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Target indikator ini pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **93,5** dan secara bertahap meningkat hingga **95,5 pada tahun 2029**.

Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia, nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2024 mencapai **92,15**. Nilai ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Batu Bara telah berada pada kategori **kepatuhan tinggi (zona hijau)**.

Pada Tahun 2025 target indikator Kepatuhan Standar Pelayanan Publik ditetapkan sebesar **93,5**. Namun demikian, nilai realisasi indikator pada tahun tersebut tidak dapat diketahui karena Kabupaten Batu Bara **tidak menjadi lokus penilaian Ombudsman pada Tahun 2025** berdasarkan surat Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor: **T/063/PC.01.04-02/X/2025** tentang Undangan Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.

Dengan tidak dilakukannya penilaian oleh Ombudsman pada Tahun 2025, maka capaian indikator pada tahun tersebut tidak dapat dihitung secara resmi. Namun demikian, capaian Tahun 2024 yang telah mencapai nilai **92,15** dapat dijadikan sebagai gambaran awal bahwa tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten Batu Bara telah berada pada kategori tinggi.

Target akhir RPJMD untuk indikator Kepatuhan Standar Pelayanan Publik adalah **88,56**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar **92,15**, maka nilai tersebut telah **melampaui target RPJMD sebesar 3,59 poin**. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah mampu mencapai bahkan melampaui target RPJMD pada indikator ini sebelum akhir periode perencanaan. Capaian tersebut mencerminkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Batu Bara telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap standar pelayanan publik.

Secara nasional, hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan bahwa nilai kepatuhan pemerintah daerah umumnya berada pada rentang **70 hingga 90** dengan kategori penilaian zona merah, zona kuning, dan zona hijau.

Dengan capaian sebesar **92,15**, Kabupaten Batu Bara telah berada pada **kategori zona hijau**, yang menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik. Capaian ini relatif sejalan bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian beberapa pemerintah daerah lainnya di tingkat provinsi.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Batu Bara, peningkatan kepatuhan standar pelayanan publik dilakukan melalui berbagai langkah strategis, antara lain:

1. **Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP)** untuk meningkatkan integrasi layanan kepada masyarakat.

2. **Percepatan digitalisasi pelayanan publik** melalui penguatan proses bisnis layanan pemerintah serta pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. **Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan** agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan akurat.
4. **Integrasi pelayanan publik antar perangkat daerah** guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
5. **Peningkatan respon terhadap pengaduan masyarakat** melalui penyediaan call center pengaduan dan mekanisme penanganan keluhan masyarakat.
6. **Penegakan regulasi perizinan** untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. **Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik** pada unit layanan pemerintah daerah.

Langkah-langkah tersebut merupakan implementasi dari strategi **pemenuhan dan peningkatan standar pelayanan publik** sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Penerapan standar pelayanan publik pada unit layanan pemerintah daerah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
4. Penguatan sistem pengaduan masyarakat.
5. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Beberapa permasalahan strategis yang masih dihadapi antara lain:

1. Standar pelayanan pada beberapa perangkat daerah masih perlu disempurnakan.
2. Sarana dan prasarana pelayanan publik belum merata pada seluruh unit layanan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik belum optimal.
4. Pemahaman aparatur terhadap standar pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.
5. Sistem monitoring dan evaluasi pelayanan publik masih perlu diperkuat.

Analisis Kontribusi Program terhadap Indikator

1. **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Program ini berkontribusi dalam penguatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini mendukung penguatan tata kelola pelayanan publik, termasuk penyusunan standar pelayanan dan peningkatan kualitas layanan pada perangkat daerah.

3. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini berkontribusi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat.

4. Program Pencatatan Sipil

Program ini mendukung pelayanan administrasi kependudukan seperti pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perubahan data kependudukan.

Dari sisi efektivitas, capaian nilai kepatuhan standar pelayanan publik sebesar **92,15** menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari sisi efisiensi, pelaksanaan program pelayanan publik mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dengan pemanfaatan sumber daya yang relatif optimal. Keberlanjutan peningkatan kualitas standar pelayanan publik sangat bergantung pada konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan standar pelayanan publik pada seluruh unit layanan.

Adapun upaya keberlanjutan yang perlu dan akan dilakukan antara lain:

- penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelayanan publik
- peningkatan digitalisasi pelayanan publik
- peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik
- penguatan sistem pengaduan masyarakat

Dengan langkah tersebut diharapkan kualitas pelayanan publik dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Untuk mencapai target RPJMD, diperlukan strategi peningkatan secara bertahap melalui roadmap sebagai berikut:

Tahun	Rencana Aksi Road Map
2025	Penguatan standar pelayanan publik dan pemenuhan komponen standar pelayanan pada unit layanan utama.

2026	Peningkatan kualitas pelayanan melalui digitalisasi pelayanan publik dan pengembangan SPBE.
2027	Penguatan integrasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik.
2028	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik.
2029	Pemantapan kualitas pelayanan publik untuk mempertahankan tingkat kepatuhan tinggi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas standar pelayanan publik, pemerintah daerah melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, antara lain Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pendaftaran Penduduk, serta Program Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan program-program tersebut menghasilkan **output**, antara lain tersedianya standar pelayanan pada unit layanan, meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, serta tersedianya sistem pengaduan masyarakat.

Output tersebut kemudian menghasilkan **outcome**, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, serta meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pelayanan publik.

Outcome tersebut pada akhirnya memberikan **impact** berupa meningkatnya nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik serta terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sasaran Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks SPBE	Indeks	-	2,67	-	2,87	2,74	95,47

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian

SPBE dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mengukur berbagai aspek, antara lain kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, serta layanan publik berbasis elektronik.

Indeks SPBE menjadi salah satu indikator penting dalam transformasi digital pemerintahan, karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Batu Bara, indikator Indeks SPBE ditetapkan sebagai indikator baru pada tahun 2025 dengan target akhir RPJMD sebesar **3,57**.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE, nilai Indeks SPBE Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2024 tercatat sebesar **2,67**. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan SPBE di Kabupaten Batu Bara telah berada pada kategori **baik**, namun masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek integrasi sistem, tata kelola data, dan layanan digital terintegrasi.

Pada Tahun 2025, target Indeks SPBE ditetapkan sebesar **2,87**, sementara realisasi yang dicapai adalah **2,74**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **95,47%**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai SPBE pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar **0,07 poin** (dari 2,67 menjadi 2,74). Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, meskipun peningkatan tersebut masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Target akhir RPJMD Kabupaten Batu Bara untuk indikator Indeks SPBE adalah **3,57**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2025 sebesar **2,74**, maka masih terdapat **gap sebesar 0,83 poin** yang perlu dicapai dalam periode pembangunan selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu melakukan berbagai upaya percepatan transformasi digital pemerintahan, terutama dalam hal integrasi layanan digital, penguatan tata kelola SPBE, serta peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi.

Berdasarkan data nilai SPBE nasional dan kategori instansi pemerintah, diperoleh perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3.8. Perbandingan Nilai SPBE Kabupaten Batu Bara

No	Kategori	Nilai SPBE
1	Nasional	3,23
2	Kementerian	4,09
3	Lembaga Non Kementerian	3,34
4	Provinsi	3,55
5	Kabupaten	2,99
6	Kota	3,52
7	Kabupaten Batu Bara (2025)	2,74

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar **3,23**, nilai SPBE Kabupaten Batu Bara masih berada di bawah rata-rata nasional. Demikian pula jika dibandingkan dengan rata-rata pemerintah provinsi sebesar **3,55**, capaian Kabupaten Batu Bara masih relatif lebih rendah. Nilai SPBE Kabupaten Batu Bara juga masih sedikit berada di bawah rata-rata kabupaten secara nasional yang sebesar **2,99**, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penerapan SPBE di daerah.

Dalam rangka meningkatkan nilai SPBE, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain:

1. Pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
2. Penguatan tata kelola keamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian daerah.
3. Pengembangan sistem integrasi data melalui penyelenggaraan statistik sektoral.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
5. Penguatan infrastruktur teknologi informasi pada perangkat daerah.
6. Pengembangan portal layanan publik berbasis digital.
7. Integrasi aplikasi pelayanan publik antar perangkat daerah.

Langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui beberapa program utama, yaitu Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan nilai SPBE di Kabupaten Batu Bara antara lain:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.
2. Tersedianya program pengembangan aplikasi dan sistem informasi pemerintahan.
3. Dukungan kebijakan nasional terkait penerapan SPBE.
4. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengembangan sistem digital pemerintahan.
5. Mulai berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Beberapa permasalahan strategis yang masih dihadapi antara lain:

1. Integrasi sistem informasi antar perangkat daerah belum optimal.
2. Infrastruktur teknologi informasi di beberapa perangkat daerah masih terbatas.
3. Kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi masih perlu ditingkatkan.
4. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pemerintah daerah.
5. Sistem keamanan informasi masih perlu diperkuat.

Analisis Kontribusi Program terhadap Indikator

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini berkontribusi dalam meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah serta melindungi data pemerintahan dari potensi ancaman siber.

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini menjadi program utama dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang mendukung pelayanan publik digital.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan daerah secara terintegrasi sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Dari sisi efektivitas, capaian sebesar **95,47%** menunjukkan bahwa program-

program yang dilaksanakan pemerintah daerah telah cukup efektif dalam mendorong peningkatan nilai SPBE. Namun demikian, dari sisi efisiensi masih diperlukan optimalisasi penggunaan sumber daya teknologi informasi, terutama dalam hal integrasi aplikasi, penguatan tata kelola data, serta peningkatan kapasitas SDM teknologi informasi.

Keberlanjutan penerapan SPBE sangat bergantung pada konsistensi pemerintah daerah dalam mengembangkan infrastruktur teknologi informasi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Upaya keberlanjutan yang perlu dilakukan antara lain:

1. Penguatan kebijakan dan regulasi terkait SPBE.
2. Peningkatan integrasi sistem informasi pemerintahan.
3. Pengembangan pusat data pemerintah daerah.
4. Peningkatan literasi digital aparaturnya.
5. Penguatan sistem keamanan informasi.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan penerapan SPBE dapat terus berkembang dan mendukung transformasi digital pemerintahan secara berkelanjutan. Beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan nilai SPBE antara lain:

1. Meningkatkan integrasi aplikasi pelayanan publik.
2. Mengembangkan arsitektur SPBE pemerintah daerah.
3. Menguatkan tata kelola data melalui sistem satu data daerah.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
5. Memperkuat sistem keamanan informasi pemerintah daerah.

Untuk mencapai target RPJMD, diperlukan strategi peningkatan secara bertahap melalui roadmap sebagai berikut:

Tahun	Rencana Aksi Road Map
2025	Penguatan tata kelola SPBE dan pengembangan aplikasi pelayanan publik.
2026	Integrasi sistem informasi pemerintahan antar perangkat daerah.
2027	Penguatan pengelolaan data daerah melalui implementasi satu data daerah.
2028	Peningkatan layanan publik berbasis digital secara terintegrasi.
2029	Pemantapan transformasi digital pemerintahan untuk mencapai target SPBE sebesar 3,57 .

Transformasi layanan publik berbasis digital dilaksanakan melalui berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan daerah. Pelaksanaan program-program tersebut menghasilkan **output**, antara lain tersedianya aplikasi pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya sistem keamanan informasi pemerintah daerah, serta tersedianya sistem pengelolaan data statistik sektoral.

Output tersebut kemudian menghasilkan **outcome**, yaitu meningkatnya kualitas layanan publik berbasis digital, meningkatnya efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatnya integrasi sistem informasi pemerintahan.

Outcome tersebut pada akhirnya memberikan **impact**, yaitu terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital serta meningkatnya nilai Indeks SPBE Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan analisis terhadap keempat domain SPBE, dapat disimpulkan bahwa penerapan SPBE di Kabupaten Batu Bara telah menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek utama, khususnya pada integrasi sistem informasi, penguatan tata kelola SPBE, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan penguatan pada keempat domain tersebut secara simultan dan berkelanjutan, diharapkan nilai SPBE Kabupaten Batu Bara dapat terus meningkat hingga mencapai target akhir RPJMD sebesar **3,57**.

Dalam rangka mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital serta mencapai target Indeks SPBE Kabupaten Batu Bara sebesar **3,57 pada akhir periode RPJMD**, diperlukan langkah percepatan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Strategi percepatan SPBE dilakukan melalui penguatan empat aspek utama, yaitu **kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE**:

1. Penguatan Kebijakan SPBE

Strategi pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan kerangka kebijakan yang menjadi dasar dalam implementasi SPBE di daerah. Langkah percepatan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Menyusun **Arsitektur SPBE Kabupaten Batu Bara** sebagai pedoman pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi.

- b. Menyusun **Roadmap SPBE daerah** sebagai arah pengembangan transformasi digital pemerintahan secara bertahap.
- c. Mengembangkan kebijakan **Satu Data Daerah** untuk mendukung integrasi dan pemanfaatan data pembangunan daerah.
- d. Menyusun regulasi daerah terkait tata kelola SPBE, keamanan informasi, serta integrasi sistem informasi pemerintahan.
- e. Mengintegrasikan kebijakan SPBE ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra perangkat daerah.

Penguatan kebijakan ini penting agar implementasi SPBE memiliki arah yang jelas serta dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah.

2. Penguatan Tata Kelola SPBE

Tata kelola SPBE yang baik menjadi faktor penting dalam memastikan koordinasi dan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Strategi percepatan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Membentuk **Tim Koordinasi SPBE Daerah** yang bertugas mengoordinasikan pengembangan dan implementasi SPBE di seluruh perangkat daerah.
- b. Mengembangkan **arsitektur sistem informasi pemerintahan terintegrasi** sehingga pengembangan aplikasi tidak dilakukan secara parsial.
- c. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan.
- d. Melakukan evaluasi dan pemetaan terhadap seluruh aplikasi yang telah dikembangkan oleh perangkat daerah.
- e. Mengurangi duplikasi aplikasi dengan melakukan integrasi sistem informasi yang memiliki fungsi serupa.

Dengan tata kelola SPBE yang lebih terintegrasi, pengembangan sistem digital pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

3. Penguatan Manajemen SPBE

Penguatan manajemen SPBE bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang mendukung penerapan SPBE. Strategi percepatan pada aspek manajemen antara lain:

- a. Mengembangkan **pusat data pemerintah daerah (data center)** untuk mendukung pengelolaan data pemerintahan secara terintegrasi.

- b. Meningkatkan kapasitas **infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi** pada perangkat daerah.
- c. Mengembangkan sistem **keamanan informasi pemerintah daerah** melalui penyelenggaraan persandian daerah.
- d. Meningkatkan kompetensi **sumber daya manusia di bidang teknologi informasi** melalui pelatihan dan sertifikasi.
- e. Mengembangkan sistem pengelolaan data pembangunan daerah melalui implementasi **statistik sektoral dan satu data daerah**.

Penguatan manajemen SPBE sangat penting agar implementasi sistem digital pemerintahan dapat berjalan secara berkelanjutan dan aman.

4. Pengembangan Layanan SPBE

Strategi percepatan berikutnya adalah pengembangan layanan pemerintahan berbasis elektronik yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Mengembangkan **portal layanan publik terintegrasi** yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan.
- b. Melakukan digitalisasi layanan administrasi pemerintahan secara bertahap.
- c. Mengintegrasikan berbagai aplikasi pelayanan publik yang dimiliki oleh perangkat daerah.
- d. Mengembangkan layanan pemerintahan berbasis **mobile service** untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik.
- e. Meningkatkan literasi digital masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan digital pemerintah secara optimal.

Pengembangan layanan digital ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat transformasi digital pemerintahan.

5. Strategi Akselerasi Integrasi Sistem Pemerintahan Digital

Selain penguatan pada empat domain SPBE, percepatan peningkatan nilai SPBE juga perlu dilakukan melalui integrasi sistem pemerintahan digital. Langkah akselerasi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Membangun **Government Service Bus (GSB)** atau sistem integrasi aplikasi pemerintahan.
- b. Mengembangkan **portal data daerah** untuk mendukung implementasi satu data daerah.

- c. Mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.
- d. Mengembangkan sistem manajemen layanan publik berbasis elektronik.
- e. Meningkatkan interoperabilitas sistem informasi antar perangkat daerah.

Integrasi sistem pemerintahan digital akan meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat proses administrasi pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan strategi percepatan yang terarah dan konsisten, diharapkan penerapan SPBE di Kabupaten Batu Bara dapat terus meningkat hingga mencapai kategori **sangat baik** pada akhir periode RPJMD.

Capaian kinerja nyata dari sasaran Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital sebesar 95,47% dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	45,55	44,54	97,78	44,70	44,79	100,20

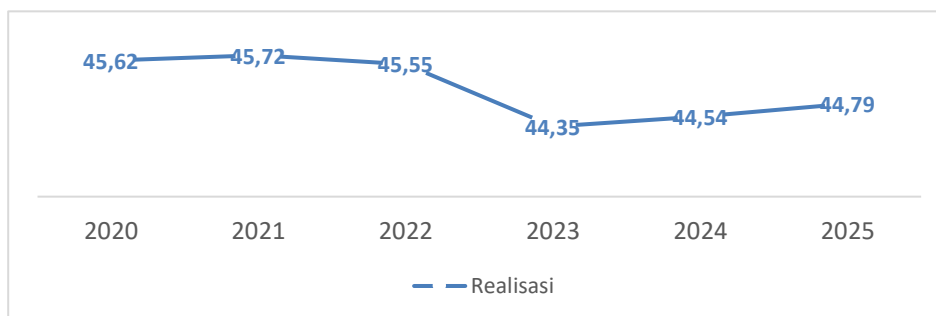
Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur peran sektor industri dalam struktur perekonomian daerah. Semakin besar kontribusi sektor industri pengolahan, maka semakin kuat struktur ekonomi daerah dalam mendukung proses industrialisasi dan peningkatan nilai tambah produk ekonomi.

Sektor industri pengolahan memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Batu Bara, indikator kontribusi PDRB industri pengolahan ditetapkan dengan target akhir sebesar **45,12 persen**.

Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian diukur dengan indikator Kontribusi PDRB Industri Pengolahan. Grafik berikut menggambarkan perjalanan struktur ekonomi Kabupaten Batu Bara yang semakin bergeser ke arah industrialisasi:

Grafik 3.5.
Perkembangan Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2025



Berdasarkan grafik PDRB yang disajikan, fluktuasi kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan dinamika yang menantang bagi perekonomian Kabupaten Batu Bara:

- **Periode 2020 - 2022 (Pertumbuhan Pasca-Pandemi):** Sektor industri sempat menunjukkan performa yang kuat dan mencapai titik puncaknya pada tahun 2022. Hal ini didorong oleh tingginya permintaan komoditas olahan global saat rantai pasok mulai pulih.
- **Periode 2022 - 2023 (Penurunan/Kontraksi):** Terlihat jelas pada grafik bahwa terjadi **penurunan kontribusi**. Penurunan ini mengindikasikan adanya hambatan serius, seperti fluktuasi harga pasar internasional untuk produk aluminium dan sawit, atau adanya masa transisi operasional pada perusahaan-perusahaan besar di Kawasan Industri.
- **Periode 2024 - 2025 (Masa Pemulihan):** Grafik menunjukkan upaya *rebound* atau pemulihan. Pemerintah Kabupaten Batu Bara merespons penurunan tahun sebelumnya dengan kebijakan akselerasi investasi yang tertuang dalam **PK Perubahan 2025**, sehingga realisasi tahun 2025 mulai menunjukkan tren positif kembali menuju target jangka panjang.

Pengukuran capaian indikator Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB menggunakan data yang dikeluarkan oleh BPS. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Batu Bara, kontribusi sektor industri pengolahan pada Tahun 2024 tercatat sebesar **44,54 persen** dengan target yang ditetapkan sebesar **45,55 persen**, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar **97,78 persen**.

Pada Tahun 2025, target kontribusi sektor industri pengolahan ditetapkan sebesar **44,70 persen**, sementara realisasi yang dicapai sebesar **44,79 persen**,

sehingga tingkat capaian mencapai **100,20 persen** atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan antara Tahun 2024 dan Tahun 2025, kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan sebesar **0,25 persen** (dari 44,54 persen menjadi 44,79 persen). Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan masih menjadi sektor dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Batu Bara.

Penetapan target kontribusi industri pengolahan pada Tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor strategis dalam dinamika struktur perekonomian daerah. Beberapa alasan yang melatarbelakangi penurunan target tersebut antara lain:

1. **Pendekatan perencanaan yang lebih realistis**, dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan sektor ekonomi lainnya yang juga mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB daerah.
2. **Adanya fluktuasi ekonomi global dan nasional** yang dapat mempengaruhi kinerja sektor industri pengolahan, terutama yang berkaitan dengan industri berbasis komoditas.
3. **Diversifikasi struktur ekonomi daerah**, dimana pemerintah daerah juga mendorong pertumbuhan sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan sektor pertanian.
4. **Pendekatan baseline data terbaru PDRB**, yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sehingga target yang ditetapkan lebih rasional dan terukur.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, target Tahun 2025 ditetapkan lebih moderat agar lebih realistis dan dapat dicapai secara optimal.

Target akhir RPJMD Kabupaten Batu Bara untuk indikator kontribusi industri pengolahan adalah **45,12 persen**. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 sebesar **44,79 persen**, maka masih terdapat selisih sebesar **0,33 persen** untuk mencapai target akhir RPJMD. Namun demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Batu Bara sudah berada sangat dekat dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Jika dibandingkan dengan kontribusi sektor industri pengolahan pada tingkat nasional dan provinsi, maka posisi Kabupaten Batu Bara menunjukkan kinerja yang sangat kuat.

Tabel 3. 9. Perbandingan Sektor Industri Pengolahan Pada Tingkat Nasional Dan Provinsi Terhadap Kabupaten Batu Bara

No	Wilayah	Kontribusi Industri Pengolahan
1	Nasional	19,07 %
2	Provinsi Sumatera Utara	18,39 %
3	Kabupaten Batu Bara	44,79 %

Dari data tersebut terlihat bahwa kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Batu Bara **lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata nasional maupun provinsi**, yang menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan dalam perekonomian daerah.

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu tumpuan Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Selain didukung dengan bahan baku yang cukup memadai dan tenaga kerja yang cukup potensial, berbagai upaya juga dilakukan untuk melakukan perbaikan, terutama pada industri menengah, industri kecil dan rumah tangga.

Terdapat 2 (dua) Perangkat daerah utama yang bertanggungjawab terhadap peningkatan pertumbuhan industri, yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan dengan Program Hubungan Industrial, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro, Program Pengembangan UMKM.

Untuk mendorong pertumbuhan sektor industri, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan berupaya meningkatkan beberapa faktor kunci, seperti **akses permodalan, infrastruktur, pengembangan SDM, akses pasar, dan inovasi teknologi**. Dengan melakukan peningkatan pada faktor-faktor ini, sektor industri dapat berkembang lebih cepat, meningkatkan kontribusinya terhadap **PDRB**, dan

menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Skema kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri terhadap **PDRB** dapat disusun melalui beberapa program strategis yang berfokus pada pengembangan hubungan industrial, perencanaan dan pembangunan industri, serta pengembangan UMKM. Berikut adalah skema kebijakan dan rencana aksi yang dapat dilakukan.

1. Program Hubungan Industrial

Meningkatkan kemitraan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri. Adapun Rencana Aksi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan Kerja Sama antara Pengusaha dan Serikat Pekerja:
 - Kegiatan: Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pengusaha dan serikat pekerja untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif.
 - Output: Penurunan jumlah konflik di sektor industri, meningkatnya kerjasama produktif dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan.
- b. Pelatihan dan Pembinaan Tenaga Kerja:
 - **Kegiatan:** Melakukan pelatihan bagi tenaga kerja terkait hak dan kewajiban, serta keterampilan teknis yang dibutuhkan industri.
 - **Output:** Peningkatan keterampilan tenaga kerja yang dapat mendukung efisiensi dan kualitas produksi.
- c. Penyuluhan Mengenai Kebijakan Ketenagakerjaan:
 - **Kegiatan:** Menyediakan program penyuluhan tentang kebijakan ketenagakerjaan yang menguntungkan pengusaha dan pekerja.
 - **Output:** Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban di tempat kerja serta mencegah terjadinya perselisihan yang dapat mengganggu produktivitas.

2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Merencanakan dan membangun infrastruktur serta mendukung sektor industri untuk dapat berkembang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB. Bentuk rencana aksi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Pembangunan Infrastruktur Industri yang Terintegrasi:
 - **Kegiatan:** Mempercepat pembangunan dan peningkatan **infrastruktur kawasan industri**, termasuk akses transportasi, energi, dan teknologi informasi.
 - **Output:** Terwujudnya kawasan industri yang lebih efisien, mengurangi biaya produksi, dan memfasilitasi akses pasar.
- b. Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Lokal:
 - **Kegiatan:** Membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan pemanfaatan sumber daya alam daerah, seperti bahan baku pertanian, perikanan, dan kehutanan.
 - **Output:** Meningkatkan daya saing produk lokal melalui penggunaan bahan baku dari sektor-sektor yang ada di daerah.
- c. Program Penyuluhan untuk Industri Baru dan yang Sudah Ada:
 - **Kegiatan:** Menyediakan pelatihan dan penyuluhan tentang inovasi dan pengembangan produk untuk pelaku industri kecil dan menengah (IKM).
 - **Output:** Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri lokal, mendorong inovasi, serta memperkenalkan teknologi terbaru.

3. Program Pengembangan UMKM

Mendorong pertumbuhan **UMKM** di sektor industri untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat basis ekonomi daerah, yang akhirnya akan mendukung pertumbuhan PDRB. Rencana Aksinya adalah:

- a. Pemberian Akses Permodalan yang Mudah dan Terjangkau:
 - **Kegiatan:** Memfasilitasi **akses permodalan** melalui program kredit usaha rakyat (KUR), kemitraan dengan bank, atau lembaga pembiayaan mikro untuk UMKM.
 - **Output:** Meningkatkan kapasitas produksi UMKM, memperluas pasar, dan mendorong pertumbuhan sektor industri.
- b. Penguatan Keterampilan Manajerial dan Teknis UMKM:
 - **Kegiatan:** Menyediakan pelatihan keterampilan manajerial, pengelolaan keuangan, dan teknologi produksi bagi pelaku UMKM.
 - **Output:** UMKM yang lebih efisien, kompetitif, dan mampu bertahan dalam persaingan pasar.

- c. Pendampingan untuk Peningkatan Kualitas dan Inovasi Produk:
 - o **Kegiatan:** Menyediakan pendampingan dan bimbingan dalam hal inovasi produk, standar kualitas, dan branding produk.
 - o **Output:** Peningkatan daya saing produk UMKM, baik di pasar lokal maupun internasional, serta memperkuat industri pengolahan.
- d. Fasilitasi Pemasaran Produk UMKM:
 - o **Kegiatan:** Menyediakan platform pemasaran online atau kerja sama dengan asosiasi perdagangan untuk memperluas jaringan distribusi UMKM.
 - o **Output: Peningkatan** volume penjualan UMKM dan akses ke pasar yang lebih luas.

Melalui kebijakan yang mengintegrasikan program Hubungan Industrial, Perencanaan dan Pembangunan Industri, serta Pengembangan UMKM, Kabupaten Batu Bara dapat mendorong sektor industri untuk berkontribusi lebih besar terhadap PDRB. Rencana aksi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Dinas UMKM akan fokus pada:

1. Peningkatan Infrastruktur untuk industri, baik dari sisi fisik maupun teknologi.
2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, serta pengelolaan sektor industri dan UMKM.
3. Pemberian Akses Pasar dan Pembiayaan untuk sektor industri dan UMKM, guna meningkatkan kapasitas dan daya saing.
4. Inovasi dan Teknologi sebagai pendorong efisiensi dan produktivitas sektor industri dan UMKM.

Meskipun telah dirancang skema kebijakan yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan sektor industri, ada sejumlah kendala yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Kendala-kendala ini berkaitan dengan aspek permodalan, keterampilan, pemasaran, kreativitas, inovasi, teknologi, dan tata kelola yang masih dihadapi oleh pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro. Berikut adalah analisis kendala-kendala yang perlu diatasi serta solusi alternatif yang menjadi tindaklanjut kedepan:

1. **Kurangnya Permodalan Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)**

Banyak pelaku IKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan **akses**

permodalan yang memadai untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini terutama terjadi karena keterbatasan **jaminan** yang dimiliki oleh pelaku IKM, serta ketatnya persyaratan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan. Persoalan ini mengakibatkan keterbatasan dana untuk memperluas kapasitas produksi, membeli teknologi baru, dan melakukan inovasi produk yang dapat meningkatkan daya saing di pasar.

Solusi yang diperlukan dan sedang diupayakan adalah:

- Penyediaan program pembiayaan alternatif, seperti kredit mikro, kemudahan pembiayaan berbasis kelompok, dan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro.
- Membuka akses pendanaan dari investor atau lembaga pengelola dana yang berfokus pada sektor industri kecil.

2. Kurangnya Kemampuan Skill dan Kemampuan Teknis Pelaku IKM

Banyak pelaku IKM di Kabupaten Batu Bara yang kurang memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam proses produksi dan manajemen industri, baik dalam aspek pengolahan bahan baku, kontrol kualitas, maupun pengelolaan sumber daya manusia. Kurangnya keterampilan ini menyebabkan rendahnya efisiensi produksi dan kualitas produk yang dihasilkan, yang berimbas pada daya saing yang lemah.

Solusi yang diperlukan antara lain:

- Pelatihan keterampilan teknis dan manajerial secara berkelanjutan bagi pelaku IKM, terutama yang berkaitan dengan standar kualitas, teknologi produksi, dan manajemen keuangan.
- Kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memberikan akses pelatihan dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

3. Kurangnya Akses Pelaku IKM untuk Memasarkan Produknya

Pelaku IKM sering kali mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka secara luas, terutama di pasar lokal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran, serta terbatasnya akses ke platform digital atau jaringan pemasaran. Tidak jarang, produk IKM yang berkualitas tinggi terhambat untuk mencapai konsumen karena terbatasnya jaringan distribusi dan pemasaran yang dimiliki pelaku usaha mikro dan kecil.

Solusi alternatif yang diperlukan adalah:

- Peningkatan akses pemasaran melalui platform e-commerce dan pemasaran digital, serta penyediaan program pendampingan pemasaran yang melibatkan pelaku IKM dalam kegiatan pameran dan ekspor.
- Kolaborasi dengan sektor perdagangan dan asosiasi perdagangan untuk mempermudah pemasaran produk IKM secara global.

4. Kurangnya Kreativitas dan Inovasi Pelaku Industri Kecil dan Menengah

Kurangnya kreativitas dan inovasi dalam hal desain produk, variasi, serta proses produksi menyebabkan produk IKM menjadi kurang menarik di pasar yang semakin kompetitif. Banyak pelaku IKM yang masih menjalankan bisnis mereka dengan metode tradisional dan tidak mengikuti perkembangan tren pasar. Hal ini berisiko menyebabkan rendahnya permintaan terhadap produk-produk yang ditawarkan.

Solusi yang diperlukan:

- Memperkenalkan **desain produk** yang lebih modern dan menarik.
- Pendampingan dalam riset pasar dan penerapan strategi inovatif, baik dalam desain maupun dalam proses produksi yang lebih efisien.

5. Kurangnya Penggunaan Teknologi dan Peralatan Produksi yang Efektif dan Efisien

Banyak pelaku IKM yang masih mengandalkan teknologi tradisional dalam proses produksi, yang mengakibatkan proses produksi menjadi tidak efisien dan biaya produksi tinggi. Ketidaktahuan dalam penerapan teknologi terbaru atau digitalisasi menyebabkan mereka tertinggal dari para pesaing.

Solusi yang diperlukan antara lain:

- Pelatihan mengenai penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi, misalnya melalui penggunaan mesin otomatis, teknologi pengolahan digital, dan sistem manajemen produksi berbasis teknologi.

6. Kurangnya Kemampuan Tata Kelola Pelaku Usaha Mikro

Pelaku usaha mikro sering kali kurang memiliki pemahaman dalam mengelola operasional usaha mereka secara profesional, baik dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, maupun pengambilan keputusan strategis. Ketidakteraturan dalam tata kelola ini menyebabkan usaha mikro sering kali mengalami kesulitan dalam bertahan dan mengembangkan usaha mereka.

Solusi yang diperlukan:

- Penyuluhan dan pelatihan tata kelola usaha bagi pelaku usaha mikro, termasuk dalam manajemen keuangan, perencanaan bisnis, dan pengelolaan sumber daya manusia.
- Bantuan dalam pembuatan rencana bisnis yang realistis dan berkelanjutan.

7. Kurangnya Akses Teknologi Informasi Bagi Pelaku Usaha Mikro di Era Digital

Ketergantungan pada cara pemasaran dan manajemen konvensional menghambat potensi pelaku usaha mikro untuk berkembang di era digital.

Solusi yang diperlukan:

- Penyediaan pelatihan teknologi informasi untuk pelaku usaha mikro agar dapat menggunakan platform digital dan e-commerce dalam pemasaran serta software manajemen bisnis untuk meningkatkan efisiensi.
- Meningkatkan akses internet dan teknologi informasi di daerah pedesaan untuk membantu pelaku usaha mikro.

8. Kurangnya Jiwa Kewirausahaan

Banyak pelaku usaha mikro yang masih bergantung pada usaha tradisional dan kurang memiliki jiwa kewirausahaan yang mampu membawa inovasi, menanggapi tantangan pasar, dan melakukan diversifikasi usaha. Kurangnya keberanian untuk berinovasi dan mengambil risiko menghambat pertumbuhan usaha mikro.

Solusi yang diperlukan:

- Pelatihan kewirausahaan yang tidak hanya fokus pada teknik produksi, tetapi juga pada mindset kewirausahaan, keberanian untuk berinovasi, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis.
- Membuka peluang kemitraan antara pelaku usaha mikro dan usaha besar agar mereka dapat belajar dari pengusaha yang lebih berpengalaman.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku IKM dan usaha mikro di Kabupaten Batu Bara, seperti keterbatasan permodalan, keterampilan teknis, akses pasar, kreativitas, inovasi, dan penggunaan teknologi, memerlukan perhatian dan upaya nyata dari pemerintah dan lembaga terkait. Untuk mendorong pertumbuhan sektor industri yang lebih besar terhadap PDRB, diperlukan kebijakan yang dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, seperti pemberian akses permodalan, pelatihan

keterampilan, pemasaran produk, serta penerapan teknologi dan inovasi yang lebih efektif.

Program **Perencanaan dan Pembangunan Industri** memiliki kontribusi penting dalam mendukung peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah. Program ini berperan dalam:

- merumuskan arah pengembangan industri daerah,
- mengidentifikasi potensi investasi sektor industri,
- serta mendukung pengembangan kawasan industri sebagai pusat kegiatan industri pengolahan.

Dengan adanya perencanaan industri yang terarah, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan sektor industri secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Jika dilihat dari sisi efektivitas, capaian indikator pada Tahun 2025 sebesar **100,67 persen** menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan industri telah berjalan secara efektif dalam mendukung peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah.

Dari sisi efisiensi, program pembangunan industri juga menunjukkan kinerja yang cukup baik karena dengan sumber daya yang tersedia mampu menghasilkan peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah.

Keberlanjutan pengembangan sektor industri pengolahan sangat bergantung pada beberapa faktor utama, yaitu keberlanjutan investasi, ketersediaan infrastruktur industri, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Untuk memastikan keberlanjutan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah, pemerintah daerah perlu terus mendorong pengembangan kawasan industri, meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung industri, serta memperkuat ekosistem industri daerah. Selain itu, pengembangan industri yang berkelanjutan juga perlu memperhatikan aspek lingkungan, efisiensi energi, serta pemanfaatan teknologi dalam proses produksi industri. Beberapa rekomendasi strategis yang akan dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan antara lain:

1. Mengembangkan kawasan industri secara terintegrasi.
2. Meningkatkan promosi investasi sektor industri pengolahan.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor industri.
4. Mengembangkan industri hilir berbasis sumber daya alam daerah.
5. Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan investor.

Pelaksanaan **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** menghasilkan berbagai output, antara lain tersusunnya dokumen perencanaan industri daerah, meningkatnya promosi investasi sektor industri, serta berkembangnya kawasan industri.

Output tersebut kemudian menghasilkan outcome berupa meningkatnya investasi sektor industri pengolahan serta meningkatnya aktivitas industri di daerah. Outcome tersebut pada akhirnya memberikan dampak (impact) berupa meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah serta memperkuat struktur perekonomian Kabupaten Batu Bara.

Capaian kinerja nyata dari sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan sebesar 100,20% dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran Meningkatkan Kontribusi Akomodasi dan Penyediaan Makan minum

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai Kontribusi Akomodasi dan penyediaan makan minum	Persen	-	1,04		1,16	1,03	88,79

Sektor akomodasi dan penyediaan makan minum merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis pariwisata dan jasa. Sektor ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan layanan penginapan, restoran, rumah makan, serta berbagai usaha jasa yang mendukung kegiatan pariwisata dan mobilitas masyarakat.

Peningkatan kontribusi sektor akomodasi dan penyediaan makan minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan berkembangnya aktivitas pariwisata, meningkatnya kunjungan wisatawan, serta tumbuhnya usaha jasa di daerah.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Batu Bara, indikator ini merupakan **indikator baru** dengan target akhir sebesar **1,20 persen**. Berdasarkan data PDRB

Kabupaten Batu Bara yang dirilis oleh BPS, kontribusi sektor akomodasi dan penyediaan makan minum pada Tahun 2024 tercatat sebesar **1,04 persen**. Pada tahun tersebut belum ditetapkan target kinerja karena indikator ini baru mulai digunakan dalam pengukuran kinerja pembangunan daerah.

Pada Tahun 2025, target kontribusi sektor akomodasi dan penyediaan makan minum ditetapkan sebesar **1,16 persen**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **1,03 persen**, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar **88,79 persen**.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, kontribusi sektor akomodasi dan penyediaan makan minum mengalami sedikit penurunan dari **1,04 persen menjadi 1,03 persen**. Penurunan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum belum mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam periode tersebut.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Batu Bara untuk indikator ini adalah **1,20 persen**, dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 sebesar **1,03 persen**, maka masih terdapat selisih sebesar **0,17 persen** yang perlu dicapai dalam periode pembangunan selanjutnya.

Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata dan jasa pendukungnya agar kontribusi sektor akomodasi dan penyediaan makan minum terhadap perekonomian daerah dapat meningkat secara optimal.

Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, salah satu isu strategis yang dihadapi Kabupaten Batu Bara adalah **belum optimalnya daya saing daerah, kesempatan kerja dan berusaha melalui penguatan serta peningkatan nilai tambah pada sektor industri, pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif**. Isu strategis ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor-sektor primer dan sektor industri yang berbasis pada pengolahan sumber daya, sementara sektor jasa yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih luas masih belum berkembang secara optimal.

Dalam konteks tersebut, sektor akomodasi dan penyediaan makan minum memiliki peran yang sangat penting sebagai **sektor pendukung (enabler) bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah**. Sektor ini menjadi penghubung antara aktivitas ekonomi berbasis produksi dengan aktivitas ekonomi berbasis jasa yang mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi

perekonomian daerah. Ketika sektor ini berkembang, maka aktivitas ekonomi tidak hanya berhenti pada proses produksi atau industri, tetapi juga berkembang ke sektor jasa yang memberikan multiplier effect terhadap sektor lainnya.

Peningkatan kontribusi sektor akomodasi dan penyediaan makan minum terhadap PDRB daerah juga menjadi indikator penting bahwa **perekonomian Kabupaten Batu Bara mulai bergerak menuju struktur ekonomi yang lebih terdiversifikasi**. Diversifikasi ekonomi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Dengan berkembangnya sektor jasa seperti akomodasi dan kuliner, maka sumber pertumbuhan ekonomi daerah akan menjadi lebih beragam dan lebih tahan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Selain itu, pengembangan sektor ini juga berperan dalam **mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif berbasis potensi lokal**, seperti pengembangan kuliner khas daerah, penyelenggaraan event budaya, serta pengembangan destinasi wisata berbasis kearifan lokal. Ekosistem ekonomi kreatif tersebut akan memperkuat identitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya tarik Kabupaten Batu Bara sebagai destinasi wisata dan investasi.

Dengan demikian, penguatan sektor akomodasi dan penyediaan makan minum bukan hanya sekadar peningkatan kontribusi satu sektor ekonomi, tetapi merupakan bagian dari **strategi transformasi ekonomi daerah menuju struktur ekonomi yang lebih modern, berdaya saing, dan berkelanjutan**.

Kabupaten Batu Bara memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi kawasan, khususnya dengan keberadaan beberapa kawasan industri besar seperti kawasan industri Kuala Tanjung serta aktivitas industri yang berkaitan dengan PT Inalum. Keberadaan kawasan industri tersebut membawa dampak ekonomi yang signifikan, termasuk meningkatnya mobilitas tenaga kerja, pelaku usaha, serta investor yang datang ke daerah.

Kondisi ini secara langsung menciptakan kebutuhan yang semakin besar terhadap layanan akomodasi dan penyediaan makan minum. Para pekerja industri, tamu perusahaan, pelaku usaha, maupun investor yang datang ke kawasan industri membutuhkan fasilitas penginapan, restoran, serta layanan kuliner yang memadai selama berada di daerah tersebut.

Namun demikian, apabila sektor akomodasi dan penyediaan makan

minum di Kabupaten Batu Bara tidak berkembang secara memadai, maka potensi ekonomi yang muncul dari aktivitas industri tersebut akan cenderung mengalir ke daerah lain yang memiliki fasilitas layanan yang lebih lengkap, seperti Kota Medan atau Kota Tebing Tinggi. Hal ini menyebabkan **kebocoran ekonomi daerah**, dimana manfaat ekonomi dari aktivitas industri tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Oleh karena itu, penguatan sektor akomodasi dan penyediaan makan minum menjadi strategi penting untuk **menangkap nilai tambah ekonomi dari keberadaan kawasan industri strategis di wilayah Kabupaten Batu Bara**. Dengan tersedianya fasilitas akomodasi dan kuliner yang memadai di daerah, maka aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari keberadaan industri dapat lebih banyak berputar di dalam wilayah Kabupaten Batu Bara dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Secara konseptual, pengembangan sektor akomodasi dan penyediaan makan minum memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur daerah, pengembangan kawasan industri, serta penguatan sektor pariwisata akan meningkatkan mobilitas orang yang datang ke daerah, baik untuk kepentingan pekerjaan, investasi, maupun kegiatan wisata.

Meningkatnya mobilitas tersebut secara langsung akan meningkatkan kebutuhan terhadap layanan akomodasi dan penyediaan makan minum. Apabila sektor ini berkembang secara baik, maka peningkatan aktivitas ekonomi tersebut akan menghasilkan nilai tambah ekonomi yang dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.

Sebaliknya, apabila sektor akomodasi dan penyediaan makan minum tidak berkembang secara memadai, maka Kabupaten Batu Bara berpotensi hanya menjadi **wilayah perlintasan aktivitas ekonomi**, dimana manfaat ekonomi dari pembangunan infrastruktur dan kawasan industri lebih banyak dinikmati oleh daerah lain yang memiliki fasilitas layanan yang lebih lengkap.

Oleh karena itu, penguatan sektor akomodasi dan penyediaan makan minum merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memastikan bahwa **nilai ekonomi yang dihasilkan**

dari pembangunan daerah dapat tetap berputar di dalam wilayah daerah dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Meskipun capaian indikator kontribusi sektor akomodasi dan penyediaan makan minum pada tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan berbagai langkah strategis yang memberikan fondasi penting bagi penguatan sektor pariwisata daerah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui intervensi kebijakan yang terintegrasi antara pengembangan destinasi wisata, promosi pariwisata daerah, serta penguatan aktivitas ekonomi kuliner masyarakat. Berbagai intervensi yang telah dilakukan tersebut secara bertahap mulai mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi pariwisata yang menjadi penopang bagi sektor akomodasi dan penyediaan makan minum di daerah.

Pertama, Pemerintah Kabupaten Batu Bara secara konsisten melaksanakan penataan dan pengembangan destinasi wisata daerah melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Intervensi ini diwujudkan melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas penunjang wisata seperti penyediaan sarana kebersihan, perbaikan fasilitas umum, penataan kawasan wisata, serta peningkatan kenyamanan lingkungan pada sejumlah lokasi wisata daerah. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung serta meningkatkan daya tarik wisata daerah sebagai tujuan kunjungan masyarakat.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga secara aktif melaksanakan kegiatan promosi pariwisata daerah melalui Program Pemasaran Pariwisata. Upaya promosi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan festival budaya daerah, event pariwisata, serta partisipasi dalam kegiatan promosi wisata pada tingkat regional. Melalui kegiatan tersebut, potensi wisata Kabupaten Batu Bara mulai diperkenalkan secara lebih luas kepada masyarakat serta komunitas wisata, sehingga secara bertahap meningkatkan eksposur dan daya tarik destinasi wisata daerah.

Ketiga, perkembangan usaha kuliner masyarakat pada berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Batu Bara menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Pemerintah daerah melalui program pengembangan kebudayaan dan penguatan ekonomi kreatif telah mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha kuliner

berbasis potensi lokal. Pertumbuhan usaha kuliner tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mulai memperkuat ekosistem pariwisata daerah melalui penyediaan berbagai pilihan kuliner yang menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung.

Keempat, Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga telah mendorong penguatan potensi wisata berbasis karakteristik wilayah daerah, khususnya potensi wisata pesisir dan potensi budaya lokal. Wilayah pesisir yang dimiliki Kabupaten Batu Bara memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan rekreasi keluarga. Selain itu, kekayaan budaya lokal daerah juga mulai dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya daerah yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Kelima, berbagai langkah yang telah dilakukan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam membangun fondasi pengembangan sektor pariwisata daerah secara bertahap dan berkelanjutan. Walaupun kontribusi sektor akomodasi dan penyediaan makan minum terhadap PDRB daerah masih relatif terbatas, berbagai upaya yang telah dilaksanakan telah mulai mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi pendukung pariwisata di tingkat lokal. Kondisi ini menjadi modal awal yang penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah di masa yang akan datang.

Meskipun berbagai intervensi kebijakan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam rangka mendorong pengembangan sektor pariwisata dan subsektor akomodasi serta penyediaan makan minum, capaian indikator pada tahun 2025 masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Realisasi kontribusi sektor akomodasi dan penyediaan makan minum tercatat sebesar **1,03**, lebih rendah dibandingkan target tahun 2025 sebesar **1,16**, sehingga tingkat capaian kinerja hanya mencapai **88,79 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kontribusi sektor ini secara signifikan terhadap struktur perekonomian daerah.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya capaian indikator ini adalah **masih terbatasnya skala dan daya tarik destinasi wisata yang**

dimiliki oleh Kabupaten Batu Bara. Meskipun daerah memiliki sejumlah potensi wisata, khususnya wisata pesisir dan wisata berbasis budaya lokal, sebagian besar destinasi tersebut masih berada pada tahap pengembangan awal dan belum sepenuhnya didukung oleh fasilitas wisata yang memadai. Kondisi ini menyebabkan tingkat kunjungan wisatawan ke daerah masih relatif terbatas sehingga belum mampu menciptakan permintaan yang cukup besar terhadap layanan akomodasi dan usaha penyediaan makan minum.

Selain itu, **aksesibilitas menuju beberapa kawasan wisata masih menjadi kendala dalam pengembangan sektor pariwisata daerah.** Sebagian destinasi wisata belum didukung oleh infrastruktur akses yang memadai, seperti kualitas jalan menuju lokasi wisata, fasilitas transportasi, serta ketersediaan sarana pendukung lainnya. Keterbatasan aksesibilitas tersebut secara langsung mempengaruhi minat kunjungan wisatawan, sehingga aktivitas ekonomi yang diharapkan dapat berkembang di sekitar kawasan wisata, termasuk usaha akomodasi dan kuliner, belum tumbuh secara optimal.

Faktor lain yang turut mempengaruhi capaian indikator adalah **masih terbatasnya jumlah dan kapasitas usaha akomodasi formal di Kabupaten Batu Bara.** Ketersediaan hotel, penginapan, maupun fasilitas akomodasi lainnya masih relatif terbatas apabila dibandingkan dengan daerah yang memiliki sektor pariwisata yang lebih berkembang. Kondisi ini menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke daerah cenderung tidak tinggal dalam jangka waktu yang lama atau memilih untuk menginap di daerah lain yang memiliki fasilitas akomodasi lebih lengkap.

Di sisi lain, **aktivitas promosi pariwisata daerah masih perlu diperkuat agar mampu menjangkau pasar wisata yang lebih luas.** Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan promosi dan event budaya, eksposur destinasi wisata Kabupaten Batu Bara di tingkat regional maupun nasional masih relatif terbatas. Hal ini menyebabkan potensi wisata yang dimiliki daerah belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat luas, sehingga belum mampu menarik kunjungan wisatawan secara signifikan.

Selain faktor-faktor tersebut, **struktur perekonomian Kabupaten Batu Bara yang masih didominasi oleh sektor industri pengolahan juga mempengaruhi rendahnya kontribusi sektor akomodasi dan penyediaan makan minum terhadap**

PDRB daerah. Dominasi sektor industri menyebabkan proporsi kontribusi sektor pariwisata dalam struktur ekonomi daerah menjadi relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Batu Bara masih berada pada tahap perkembangan awal dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan perannya sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, capaian indikator yang belum mencapai target pada tahun 2025 menjadi evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memperkuat strategi pengembangan sektor pariwisata secara lebih terintegrasi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengembangan destinasi wisata, peningkatan aksesibilitas kawasan wisata, penguatan promosi pariwisata, serta pengembangan usaha akomodasi dan kuliner masyarakat dapat berjalan secara sinergis sehingga mampu meningkatkan kontribusi sektor akomodasi dan penyediaan makan minum terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata berkontribusi dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah, yang secara tidak langsung mendorong peningkatan permintaan terhadap layanan akomodasi dan usaha kuliner.

Program pemasaran pariwisata berperan dalam memperluas jangkauan promosi destinasi wisata daerah sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Sementara itu, program pengembangan kebudayaan mendukung penguatan identitas budaya daerah yang dapat menjadi daya tarik wisata berbasis budaya.

Dari sisi efektivitas, capaian indikator sebesar **88,79 persen** menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan pariwisata telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, meskipun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Dari sisi efisiensi, program-program yang dilaksanakan telah mampu mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di sektor jasa, namun masih diperlukan peningkatan sinergi program serta penguatan promosi pariwisata agar dampak ekonomi yang dihasilkan dapat lebih optimal.

Keberlanjutan pengembangan sektor akomodasi dan penyediaan makan minum sangat bergantung pada keberlanjutan pengembangan sektor pariwisata daerah.

Untuk memastikan keberlanjutan sektor ini, pemerintah daerah perlu terus mendorong pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata, serta penguatan promosi wisata daerah. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata juga perlu memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan serta melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata.

Pelaksanaan program pembangunan pariwisata menghasilkan berbagai output, antara lain meningkatnya jumlah destinasi wisata yang tertata, terselenggaranya kegiatan promosi pariwisata, serta berkembangnya kegiatan budaya daerah. Output tersebut kemudian menghasilkan outcome berupa meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Batu Bara serta meningkatnya aktivitas usaha di sektor jasa pariwisata. Outcome tersebut pada akhirnya memberikan dampak (impact) berupa meningkatnya kontribusi sektor akomodasi dan penyediaan makan minum terhadap PDRB daerah serta berkembangnya ekonomi berbasis pariwisata di Kabupaten Batu Bara.

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, pengembangan pariwisata di Kabupaten Batu Bara masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Infrastruktur pariwisata yang masih terbatas.
2. Jumlah fasilitas akomodasi yang masih relatif sedikit.
3. Promosi pariwisata daerah yang belum optimal.
4. Pengelolaan destinasi wisata yang masih perlu ditingkatkan.
5. Keterbatasan sumber daya manusia di sektor pariwisata.

Tantangan tersebut perlu diatasi melalui berbagai kebijakan pembangunan yang mendukung pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan kontribusi sektor akomodasi dan penyediaan makan minum terhadap PDRB daerah, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mengembangkan destinasi wisata unggulan daerah.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata.
3. Mendorong investasi di sektor perhotelan dan usaha kuliner.
4. Mengembangkan paket wisata berbasis budaya dan kuliner.

5. Meningkatkan promosi pariwisata daerah melalui media digital.

Dengan strategi tersebut diharapkan sektor pariwisata dapat berkembang lebih pesat dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor akomodasi dan penyediaan makan minum.

Capaian kinerja nyata dari sasaran Meningkatnya Kontribusi Akomodasi dan Penyediaan Makan minum sebesar 88,79% dengan predikat tinggi.

Sasaran Meningkatnya Kontribusi perdagangan dalam PDRB

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	18,50	18,15	98,11	18,17	18,16	98,16

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, rumah makan/restoran dan perhotelan.

Sasaran meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan, memiliki indikator:

Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB

Pencapaian kinerja pada indikator ini diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Target PDRB Sektor Perdagangan}} \times 100\% \\ &= \frac{18,16}{18,17} \times 100\% \\ &= 99,94\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2025, sektor perdagangan Kabupaten Batu Bara mencatat realisasi kontribusi sebesar 18,16%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 18,17%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 99,94%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor perdagangan masih menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam struktur PDRB daerah, namun target yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dapat dicapai.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 sebesar **18,15%**, terjadi peningkatan yang sangat kecil yaitu sebesar **0,01%** pada tahun 2025. Peningkatan yang relatif stagnan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Batu Bara belum mengalami akselerasi yang signifikan, sehingga kontribusinya terhadap PDRB cenderung stabil namun belum mampu meningkat secara optimal.

Apabila dibandingkan dengan capaian sektor perdagangan di tingkat **Provinsi Sumatera Utara**, yang pada tahun 2025 mencapai **18,97%**, maka kontribusi sektor perdagangan Kabupaten Batu Bara masih berada sedikit di bawah capaian provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika sektor perdagangan di Kabupaten Batu Bara masih memerlukan penguatan kebijakan dan intervensi pembangunan agar mampu mengejar capaian rata-rata provinsi serta meningkatkan daya saing sektor perdagangan daerah.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian **nasional**, kontribusi sektor perdagangan Kabupaten Batu Bara masih berada pada posisi yang lebih tinggi. Berdasarkan data nasional, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar **13,07%**. Dengan demikian, kontribusi sektor perdagangan Kabupaten Batu Bara yang mencapai **18,16%** menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor perdagangan masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.

Di sisi lain, jika dibandingkan dengan **target akhir RPJMD Kabupaten Batu Bara sebesar 18,95%**, maka capaian tahun 2025 masih memiliki selisih sebesar **0,79%**. Selisih tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mempercepat pertumbuhan sektor perdagangan agar target pembangunan jangka menengah daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih matang dan strategi yang lebih tepat untuk memastikan bahwa sektor perdagangan dapat mencapai target akhir RPJMD pada tahun 2029.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pencapaian sektor perdagangan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik, meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian ini masih

lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional dan sudah mendekati capaian Provinsi Sumatera Utara. Namun, untuk mencapai target jangka panjang pada tahun 2029, sektor perdagangan di Kabupaten Batu Bara perlu dioptimalkan melalui inovasi, peningkatan kapasitas pasar, dan penguatan sektor perdagangan agar dapat mengejar selisih dengan capaian provinsi dan memenuhi target RPD yang telah ditetapkan.

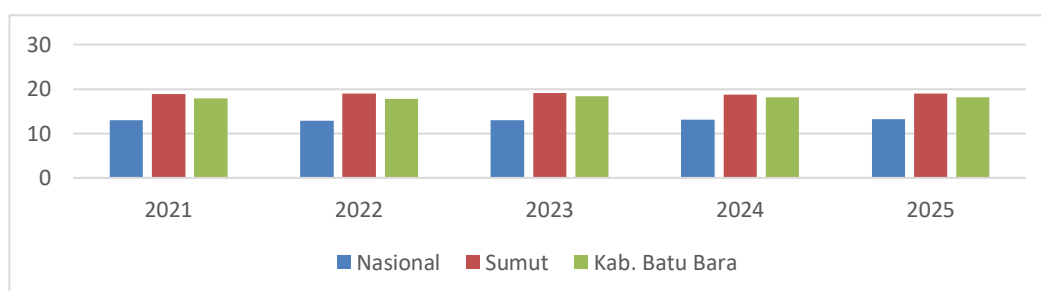
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara yang tercantum dalam publikasi **Batu Bara Dalam Angka 2025**, perkembangan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran selama periode **2020–2024** menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif.

Tabel 3.10.
Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Batu Bara

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
Perdagangan besar dan eceran	17,89	17,82	18,37	18,15	18,16
Peningkatan	-	-	0,55	-	0,01
Penurunan	0,07	0,07	-	0,22	-

Grafik berikut ini menggambarkan perbandingan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) antara Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dan tingkat nasional pada tahun 2025. Data ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana sektor perdagangan berperan dalam perekonomian masing-masing wilayah. Sektor perdagangan di Kabupaten Batu Bara, yang memiliki posisi strategis dan akses ke pelabuhan internasional, menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB daerah, meskipun dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan tingkat nasional, terdapat perbedaan yang mencerminkan dinamika dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Grafik 3.7.
Perbandingan Sektor Perdagangan Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional tahun 2021-2025



Letak geografis Kabupaten Batu Bara memainkan peran strategis dalam perkembangan sektor perdagangan di daerah ini. Dengan lokasi yang menghubungkan berbagai kawasan penting di Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara memiliki potensi besar dalam aktivitas perdagangan, baik lokal maupun internasional. Kabupaten Batu Bara memiliki akses langsung ke Laut Malaka, yang merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat sibuk. Pelabuhan Laut yang ada di Batu Bara memberikan kesempatan besar untuk perdagangan internasional. Meskipun Batu Bara tidak memiliki tambang batu bara, pelabuhan ini tetap menjadi pusat penting untuk distribusi barang lainnya, seperti produk pertanian, hasil industri, dan komoditas lokal lainnya. Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan ekspor dan mendukung sektor perdagangan dalam skala global.

Meskipun Kabupaten Batu Bara memiliki potensi besar dalam hal akses ke Laut Malaka dan pelabuhan laut, beberapa faktor seperti keterbatasan infrastruktur pelabuhan, kurangnya fasilitas logistik, kualitas produk yang belum optimal, kurangnya promosi internasional, dan hambatan regulasi masih menjadi kendala utama dalam merealisasikan potensi perdagangan internasional. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas produk, serta kemudahan regulasi ekspor agar Kabupaten Batu Bara bisa memaksimalkan akses ke pasar global.

Untuk meningkatkan potensi sektor perdagangan terutama potensi perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Batu Bara, kebijakan yang diimplementasikan perlu melibatkan berbagai aspek yang saling mendukung. Berikut adalah skema kebijakan yang dapat diambil untuk mendorong potensi sektor perdagangan di Kabupaten Batu Bara:

1. Pengembangan Infrastruktur Perdagangan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdagangan, seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, serta fasilitas distribusi lainnya. Pengembangan fasilitas logistik untuk memperlancar distribusi barang, seperti pergudangan dan sistem transportasi yang efisien.

Rencana Aksi:

- Pembangunan atau renovasi pasar tradisional dan modern yang dapat meningkatkan daya tampung serta kenyamanan pembeli dan pedagang.
- Peningkatan akses transportasi melalui pembangunan jalan, perbaikan akses pelabuhan, dan fasilitas angkutan barang.
- Pembangunan atau peningkatan fasilitas logistik, termasuk gudang dan jalur distribusi barang.

2. Digitalisasi Sektor Perdagangan

Mendorong digitalisasi dalam sektor perdagangan untuk meningkatkan akses pasar melalui platform e-commerce dan sistem pembayaran digital.

Rencana Aksi:

- Menyediakan pelatihan dan bimbingan untuk pelaku UMKM dan pedagang agar bisa memanfaatkan platform e-commerce dalam memasarkan produk mereka.
- Memperkenalkan dan mengintegrasikan sistem pembayaran digital untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan efisiensi perdagangan.
- Fasilitasi akses internet bagi pedagang di kawasan yang sulit dijangkau dengan teknologi untuk memastikan pemerataan digitalisasi.

3. Pemberdayaan UMKM dan Pelaku Usaha Mikro

Memberikan dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM dalam sektor perdagangan dan eceran.

Rencana Aksi:

- Menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM dalam hal manajemen bisnis, pemasaran, dan penggunaan teknologi.
- Mendorong UMKM untuk memperkenalkan produk mereka melalui pameran atau bazar yang melibatkan perdagangan lokal dan luar daerah.

4. Penyediaan Akses Pasar yang Lebih Luas

Memperluas jaringan distribusi dan akses pasar untuk produk lokal melalui pengembangan pusat perdagangan dan pemasaran, serta kerjasama dengan pasar regional atau internasional.

Rencana Aksi:

- Mengadakan program promosi dan pemasaran produk lokal untuk meningkatkan penetrasi pasar luar daerah.

- Meningkatkan peran pasar tradisional dengan modernisasi fasilitas dan meningkatkan kualitas produk yang dijual untuk menarik pembeli lebih banyak.
- Memfasilitasi UMKM dan sektor perdagangan lokal dalam hal akses ekspor dengan memperkenalkan produk-produk unggulan Kabupaten Batu Bara ke pasar internasional.

5. Peningkatan Keterampilan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kapasitas SDM di sektor perdagangan dan eceran agar lebih kompetitif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar.

Rencana Aksi:

- Menyelenggarakan pelatihan dan workshop yang fokus pada pengelolaan bisnis, pemasaran, dan manajemen keuangan untuk pelaku usaha perdagangan.
- Menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi dan perangkat yang mendukung perdagangan (misalnya, sistem point-of-sale, e-commerce, manajemen inventaris).
- Memfasilitasi sertifikasi bagi pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan produk yang dijual.

Melalui skema kebijakan yang menyeluruh ini, Kabupaten Batu Bara dapat mendorong pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran dengan meningkatkan infrastruktur, memanfaatkan digitalisasi, memperkuat kemitraan dengan sektor industri, serta memberdayakan UMKM. Hal ini akan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan membuka peluang pasar yang lebih luas baik untuk produk lokal maupun ekspor.

Dalam pelaksanaan program pembangunan sektor perdagangan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia agar mampu memberikan dampak yang maksimal terhadap peningkatan aktivitas perdagangan daerah.

Program **Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** diarahkan untuk memperkuat fungsi pasar rakyat sebagai pusat distribusi barang kebutuhan masyarakat. Meskipun alokasi anggaran yang tersedia masih terbatas, pemerintah daerah berupaya memprioritaskan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas perdagangan, seperti perbaikan fasilitas pasar,

peningkatan kebersihan lingkungan pasar, serta penguatan manajemen pengelolaan pasar.

Sementara itu, melalui **Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan yang berlangsung di daerah. Pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, pengawasan kemetrologian, serta kegiatan edukasi kepada pelaku usaha menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan berlangsung secara adil dan transparan.

Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan efisiensi pelaksanaan program melalui pendekatan kolaboratif, baik dengan instansi pemerintah lainnya, pelaku usaha, maupun masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat dampak program pembangunan sektor perdagangan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada peningkatan alokasi anggaran.

Keberlanjutan pengembangan sektor perdagangan di Kabupaten Batu Bara sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem perdagangan yang terintegrasi dengan sektor ekonomi lainnya. Keberadaan kawasan industri strategis seperti **Kuala Tanjung** serta akses terhadap jalur perdagangan internasional di **Selat Malaka** memberikan peluang besar bagi pengembangan aktivitas perdagangan di daerah.

Untuk memastikan keberlanjutan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat keterkaitan antara sektor perdagangan dengan sektor produksi lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta ekonomi kreatif. Dengan memperkuat rantai nilai ekonomi lokal, aktivitas perdagangan tidak hanya berfungsi sebagai distribusi barang dari luar daerah, tetapi juga menjadi sarana pemasaran produk unggulan daerah.

Selain itu, pengembangan sistem perdagangan berbasis digital juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sektor perdagangan ke depan. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing produk di tingkat regional maupun nasional.

Untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan mencapai target RPJMD sebesar **18,95%**, Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu memperkuat beberapa langkah strategis, antara lain:

1. **Melakukan revitalisasi pasar rakyat secara bertahap**, guna meningkatkan daya tarik pasar tradisional sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat.
2. **Mengembangkan sistem distribusi perdagangan yang lebih efisien**, termasuk penguatan fasilitas logistik dan pergudangan.
3. **Mendorong digitalisasi sektor perdagangan**, melalui pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam memanfaatkan platform e-commerce.
4. **Memperkuat pemberdayaan UMKM**, khususnya dalam peningkatan kualitas produk, pengemasan, serta pemasaran.
5. **Meningkatkan pengawasan kemetrolgian**, guna memastikan terciptanya sistem perdagangan yang adil dan transparan.

Untuk mencapai target kontribusi sektor perdagangan sebesar **18,95%**, Pemerintah Kabupaten Batu Bara merencanakan langkah peningkatan secara bertahap sebagai berikut:

Tahun	Strategi
2026	Fokus pada revitalisasi pasar rakyat dan peningkatan pengelolaan sarana distribusi perdagangan , sehingga aktivitas perdagangan masyarakat dapat meningkat.
2027	Fokus pada penguatan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan UMKM , termasuk peningkatan kualitas produk serta perluasan akses pemasaran.
2028	Fokus pada pengembangan sistem perdagangan berbasis digital , guna memperluas jangkauan pasar produk lokal.
2029	Fokus pada penguatan jaringan distribusi perdagangan regional , sehingga produk lokal Kabupaten Batu Bara dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Capaian kinerja nyata dari sasaran Meningkatnya Kontribusi perdagangan dalam PDRB sebesar 98,16% dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran Meningkatnya Level Skala Usaha Mikro menjadi skala kecil

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro menjadi skala kecil	%	-	-	-	3,62	1,88	51,93

Pada tahun 2025, indikator Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro menjadi Skala Kecil ditargetkan sebesar **3,62%**, namun realisasi yang dicapai hanya sebesar **1,88%**, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada **51,93%**. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan belum berhasil dicapai secara optimal.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika perkembangan skala usaha di Kabupaten Batu Bara, khususnya dalam melihat proses transformasi usaha mikro menjadi usaha kecil, disajikan data perkembangan jumlah usaha berdasarkan klasifikasi skala usaha pada tahun 2024 dan 2025 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Data Perkembangan Jumlah Usaha Berdasarkan Klasifikasi Skala Usaha Pada Tahun 2024 Dan 2025

No	Skala usaha	Tahun	
		2024	2025
1	Mikro	15.461	17830
2	Kecil	233	290

Berdasarkan data perkembangan jumlah usaha, terlihat bahwa pada tahun 2024 terdapat **15.461 usaha mikro** dan **233 usaha kecil**, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi **17.830 usaha mikro** dan **290 usaha kecil**. Meskipun terjadi peningkatan jumlah usaha kecil sebesar **57 unit**, namun jika dibandingkan dengan total populasi usaha mikro tahun sebelumnya, tingkat konversi usaha mikro menjadi usaha kecil masih relatif rendah, sehingga berdampak pada tidak tercapainya target indikator.

Apabila dibandingkan dengan **target akhir RPJMD sebesar 7,37%**, maka capaian tahun 2025 baru mencapai sekitar **25,51% dari target akhir**, sehingga masih terdapat **gap sebesar 5,49 poin** yang harus dikejar dalam sisa periode perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi skala usaha masih berjalan lambat dan memerlukan akselerasi kebijakan yang lebih terarah dan sistematis.

Secara umum, jika dibandingkan dengan daerah yang memiliki ekosistem UMKM yang lebih maju, tingkat kenaikan kelas usaha cenderung lebih tinggi karena didukung oleh akses pembiayaan, pasar, dan pendampingan yang lebih

kuat. Oleh karena itu, capaian Kabupaten Batu Bara sebesar **1,88%** menunjukkan bahwa proses *scaling-up* usaha masih menghadapi berbagai keterbatasan struktur

Peningkatan **Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil** pada dasarnya merupakan indikator transformasi ekonomi pelaku usaha dari skala subsisten menuju skala produktif. Transformasi ini sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu **legalitas usaha, akses permodalan, dan kapasitas produksi**, yang secara langsung diperkuat melalui pelaksanaan program-program strategis pemerintah daerah.

Hubungan Program dengan Peningkatan Skala Usaha

1. Program Pengembangan UMKM

Program ini berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan manajerial usaha, melalui pelatihan, fasilitasi teknologi, dan pengembangan produk.

Kausalitas:

Peningkatan kapasitas produksi → peningkatan volume dan kualitas produk → usaha menjadi lebih kompetitif → mendorong kenaikan skala usaha.

2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro

Program ini memperkuat akses permodalan dan pasar, serta mendorong pelaku usaha untuk naik kelas.

Kausalitas:

Akses modal + akses pasar → ekspansi usaha → peningkatan omzet → memenuhi kriteria usaha kecil.

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini meningkatkan kapasitas kelembagaan dan literasi usaha, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan usaha kolektif.

Kausalitas:

Peningkatan literasi usaha → pengelolaan usaha lebih efisien → keberlanjutan usaha meningkat → peluang naik kelas lebih besar.

4. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

Program ini mendorong aspek **legalitas usaha dan kelembagaan ekonomi**, sehingga usaha memiliki kepastian hukum.

Kausalitas:

Legalitas usaha → akses pembiayaan formal meningkat → skala usaha berkembang.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini memperkuat daya tahan usaha melalui sistem kolektif, termasuk perlindungan terhadap risiko usaha.

Kausalitas:

Penguatan koperasi → efisiensi biaya dan akses sumber daya → usaha lebih stabil → mendukung peningkatan skala usaha.

Keterkaitan dengan Dampak Pembangunan Ekonomi Daerah

Kelima program tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan kinerja ekonomi daerah, yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi terhadap PDRB

Naiknya skala usaha dari mikro ke kecil meningkatkan **nilai tambah (value added)**, sehingga kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB menjadi lebih besar.

2. Perluasan Penyerapan Tenaga Kerja

Usaha yang naik kelas cenderung membutuhkan tenaga kerja lebih banyak, sehingga terjadi peningkatan kesempatan kerja.

3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Peningkatan pendapatan pelaku usaha dan tenaga kerja berdampak pada kenaikan konsumsi masyarakat, yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

4. Penguatan Ketahanan Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi menjadi lebih kuat karena didukung oleh usaha yang lebih produktif, formal, dan berkelanjutan, sehingga tidak rentan terhadap guncangan ekonomi.

5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Usaha yang telah memiliki legalitas dan berkembang akan berkontribusi melalui pajak dan retribusi daerah, sehingga meningkatkan **basis penerimaan PAD**.

Secara substantif, kelima program tersebut merupakan **intervensi kunci** karena:

- Menyasar langsung **akar permasalahan UMKM** (legalitas, modal, kapasitas produksi),
- Mendorong **transformasi struktural ekonomi lokal**,

- Serta menghasilkan **efek multiplikasi (multiplier effect)** terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian, penguatan dan integrasi program-program tersebut menjadi faktor strategis dalam mempercepat peningkatan level usaha mikro menjadi usaha kecil secara berkelanjutan.

Capaian kinerja nyata dari sasaran **Meningkatnya Level Skala Usaha Mikro menjadi skala kecil** sebesar **51,93%** dengan predikat **rendah** menunjukkan bahwa upaya transformasi skala usaha belum berjalan optimal dan masih memerlukan penguatan yang lebih terarah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya akselerasi kebijakan, khususnya dalam peningkatan akses permodalan, penguatan kapasitas usaha, serta perluasan pasar, agar proses kenaikan kelas pelaku usaha dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Sasaran Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	23	22,54	98,00%	22,84	22,93	100,39%

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Terhadap PDRB

Pada tahun 2024 realisasi kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai **22,54%** dari target **23%**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **98,00%**.

Pada tahun 2025 terjadi peningkatan kinerja dimana realisasi mencapai **22,93%**, lebih tinggi dari target **22,84%**, sehingga capaian kinerja mencapai **100,39%**.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian daerah mulai menunjukkan hasil yang positif.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD untuk indikator ini ditetapkan sebesar **8,62%**. Dengan realisasi tahun 2025 sebesar **22,93%**, maka capaian tersebut **telah melampaui target akhir RPJMD**. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perikanan masih menjadi sektor basis ekonomi Kabupaten Batu Bara.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara berada pada kisaran **±24,44%**. Dengan capaian Kabupaten Batu Bara sebesar **22,93%**, maka kontribusi daerah masih sedikit berada di bawah rata-rata provinsi, sehingga masih terdapat ruang peningkatan melalui penguatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

Dalam konteks nasional, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional berada pada kisaran **12–13%**, sehingga secara struktural sektor ini masih menjadi sektor dominan bagi perekonomian daerah.

Perlu dicatat bahwa dalam konteks kewenangan daerah, kontribusi sektor ini di Kabupaten Batu Bara lebih dipengaruhi oleh **sektor pertanian dan perikanan**, sedangkan subsektor kehutanan merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Peranan kontribusi dari sektor pertanian dan perikanan dapat dapat disimak pada keterangan berikut:

Kontribusi Sektor Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Batu Bara bukan hanya menjadi penyokong utama perekonomian daerah, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menjamin ketahanan pangan, dan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan terus mendorong inovasi dalam sektor pertanian, meningkatkan infrastruktur, dan memperkuat kebijakan pendukung, Kabupaten Batu Bara dapat memperkuat posisi sektor pertanian sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tetap memperhatikan dan mendukung sektor pertanian

agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian setempat.

Pada sektor pertanian meningkatnya produktivitas pertanian merupakan bagian dari strategi penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan diversifikasi sektor ekonomi. Produktivitas yang tinggi dalam sektor pertanian dapat menciptakan dampak positif yang meluas ke sektor-sektor lain dan berkontribusi pada peningkatan PDRB.

Pada tahun 2025 produksi padi ditargetkan sebesar **140.000 ton**, namun realisasi yang dicapai hanya sebesar **127.999,89 ton**, sehingga tingkat capaian produksi berada pada **91,43%** dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa produksi padi masih berada **di bawah target sebesar 12.000,11 ton**.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai **138.476,24 ton**, maka pada tahun 2025 terjadi **penurunan produksi sebesar 10.476,35 ton** atau sekitar **7,56%**.

Penurunan produksi padi dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan adanya tekanan pada sektor tanaman pangan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor teknis produksi maupun faktor eksternal.

Secara umum tren tersebut mengindikasikan bahwa:

1. Produktivitas atau luas panen mengalami penurunan, sehingga total produksi tidak dapat dipertahankan pada level tahun sebelumnya.
2. Target produksi tahun 2025 yang lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2024 menunjukkan adanya **ekspektasi peningkatan produksi**, namun kondisi di lapangan belum sepenuhnya mendukung pencapaian target tersebut.
3. Penurunan produksi dapat mempengaruhi **nilai tambah sektor pertanian**, yang pada akhirnya berdampak terhadap kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah.

Beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi penurunan produksi padi antara lain:

1. Faktor Iklim dan Cuaca

Perubahan pola curah hujan dan kondisi cuaca ekstrem dapat mengganggu pola tanam dan masa panen sehingga berdampak pada penurunan produktivitas tanaman padi, pada tahun 2025 sebagian besar lahan sawah mengalami banjir besar.

2. Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman

Serangan hama dan penyakit tanaman dapat menurunkan produktivitas lahan serta menyebabkan gagal panen pada beberapa wilayah.

3. Keterbatasan Sarana Produksi

Ketersediaan pupuk bersubsidi, benih unggul, serta sarana produksi lainnya yang belum sepenuhnya optimal dapat mempengaruhi hasil produksi.

4. Kondisi Infrastruktur Irigasi

Sebagian jaringan irigasi yang belum berfungsi optimal dapat mengakibatkan keterbatasan pasokan air bagi lahan pertanian, terutama pada musim kemarau.

5. Perubahan Luas Tanam atau Luas Panen

Alih fungsi lahan atau berkurangnya luas panen juga dapat berkontribusi terhadap penurunan total produksi.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, untuk meningkatkan produksi padi pada periode berikutnya, diperlukan beberapa langkah strategis antara lain:

1. Optimalisasi jaringan irigasi pertanian melalui pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak.
2. Peningkatan penggunaan benih unggul dan varietas tahan hama serta perubahan iklim.
3. Peningkatan intensitas penyuluhan pertanian untuk memperkuat penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien.
4. Peningkatan pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu.
5. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian melalui peningkatan indeks pertanaman.

Meskipun pada tahun 2025 Kabupaten Batu Bara menghadapi tantangan berupa **bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah sentra produksi pertanian**, produksi padi tetap mampu mencapai **127.999,89 ton** atau **91,43% dari target produksi sebesar 140.000 ton**. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Batu Bara masih memiliki ketahanan yang cukup baik dalam menghadapi gangguan faktor eksternal.

Dengan mempertimbangkan kondisi banjir yang terjadi pada tahun 2025, capaian produksi padi sebesar **127.999,89 ton** menunjukkan bahwa sektor pertanian Kabupaten Batu Bara masih memiliki tingkat ketahanan yang cukup baik. Berbagai intervensi kebijakan pemerintah daerah, dukungan infrastruktur,

serta peran aktif petani dan penyuluh pertanian menjadi faktor penting dalam mempertahankan produksi padi meskipun menghadapi tantangan bencana alam.

Capaian ini menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk terus memperkuat strategi adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim dan potensi bencana, sehingga produksi padi dapat kembali meningkat dan mendukung kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah.

Selain itu, keberhasilan pencapaian produktivitas dan produksi padi ini didukung oleh peningkatan sarana irigasi melalui pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan pompanisasi, pendampingan penyaluran irigasi perpompaan, penyaluran mesin pompa air untuk daerah sawah tadah hujan dan optimasi lahan yang didanai APBN, penggunaan benih bersertifikat, penggunaan pupuk dan pestisida secara tepat, memfasilitasi petani agar mendapatkan pupuk bersubsidi, menyalurkan bantuan benih padi bagi lahan terdampak bencana banjir, bantuan alsintan, bantuan pengolahan lahan sawah petani dan tak terlepas dari kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan yang menyampaikan informasi dan teknologi kepada petani selain padi, komoditas utama tanaman pangan lain yang juga menjadi prioritas adalah jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau.

Skema Kebijakan Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian yang telah di implemetasikan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan ketahanan pangan nasional.
2. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
3. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui akses yang lebih baik ke sarana dan prasarana pertanian.
4. Menanggulangi kerawanan pangan dan bencana pertanian secara efektif.
5. Meningkatkan kapasitas penyuluhan pertanian untuk mendukung penerapan teknologi yang tepat.

Dalam rangka pelaksanaan skema kebijakan tersebut, program-pogram utama yang dilakukan adalah:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- **Tujuan:** Meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi pertanian yang berkualitas.
- **Strategi:**

- Penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan harga yang terjangkau untuk petani.
- Pengembangan benih unggul dan pupuk yang ramah lingkungan.
- Penyediaan fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- **Tujuan:** Memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian.
- **Strategi:**
 - Pembangunan dan perbaikan irigasi untuk mendukung ketahanan air bagi pertanian.
 - Pengembangan jalan tani yang menghubungkan area pertanian dengan pasar dan pusat distribusi.
 - Penyediaan sistem penyimpanan hasil pertanian yang efisien dan ramah lingkungan.
 - Peningkatan akses teknologi informasi untuk petani terkait pasar dan harga.

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- **Tujuan:** Mengurangi dampak kerugian akibat bencana alam yang mengancam sektor pertanian.
- **Strategi:**
 - Pembentukan unit tanggap bencana pertanian di tingkat daerah.
 - Peningkatan kemampuan mitigasi bencana di tingkat desa dan kawasan pertanian rawan bencana.

5. Program Penyuluhan Pertanian

- **Tujuan:** Meningkatkan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi baru dan praktik pertanian yang berkelanjutan.
- **Strategi:**
 - Pembentukan jaringan penyuluh pertanian yang profesional dan terlatih.
 - Penguatan pelatihan berbasis teknologi, termasuk penggunaan aplikasi digital untuk pertanian.
 - Penyuluhan mengenai praktik pertanian ramah lingkungan dan adaptasi perubahan iklim.
 - Penyuluhan tentang manajemen keuangan dan pemasaran hasil pertanian

untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Output dan Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan skema kebijakan tersebut adalah:

- **Output:**
 - Peningkatan jumlah alat pertanian yang tersedia.
 - Peningkatan infrastruktur pertanian (irigasi, jalan tani, penyimpanan).
 - Peningkatan hasil pertanian dan keberlanjutan produksi pangan lokal.
 - Penurunan tingkat kerawanan pangan di daerah rawan pangan.
 - Peningkatan jumlah petani yang terlindungi asuransi pertanian.
- **Outcome:**
 - Ketahanan pangan yang lebih baik.
 - Petani yang lebih sejahtera dan memiliki akses yang lebih baik ke pasar dan teknologi.
 - Sektor pertanian yang lebih produktif dan ramah lingkungan.
 - Penanggulangan kerawanan pangan dan bencana pertanian yang lebih efektif.

6. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

- **Tujuan:** Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sektor pertanian secara optimal guna mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan daerah serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
- **Strategi:**
 - Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian melalui peningkatan indeks pertanaman dan pengembangan kawasan produksi pangan strategis.
 - Penguatan pengelolaan sumber daya pertanian melalui peningkatan produktivitas komoditas pangan utama seperti padi, jagung, dan komoditas pangan lokal lainnya.
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan kelompok tani dalam pengelolaan usaha tani yang efisien dan berkelanjutan.

- Pengembangan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas pangan utama.
- Peningkatan akses petani terhadap sarana produksi pertanian, pembiayaan usaha tani, serta penguatan jaringan pemasaran hasil pertanian.

Output dan Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan skema kebijakan tersebut adalah:

- **Output:**

- Peningkatan luas tanam dan luas panen komoditas pangan strategis.
- Peningkatan produksi komoditas pangan utama seperti padi, jagung, dan komoditas pangan lokal lainnya.
- Meningkatnya jumlah kelompok tani yang aktif dalam pengelolaan usaha tani berbasis kelembagaan.
- Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana produksi pertanian oleh petani.
- Terwujudnya pengembangan kawasan sentra produksi pangan yang lebih terintegrasi.

- **Outcome:**

- Terwujudnya kemandirian pangan daerah melalui peningkatan produksi pangan lokal.
- Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan usaha tani.
- Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dengan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan.
- Terbangunnya sistem pertanian yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

Dengan implementasi kebijakan ini secara komprehensif dan sinergis, sektor pertanian akan berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta pengurangan kerawanan pangan dan dampak bencana pertanian. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dan masyarakat secara keseluruhan.

Kontribusi Sektor Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya dalam meningkatkan kontribusi terhadap PDRB serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir. Secara struktur, sektor perikanan terdiri atas dua kelompok utama, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap meliputi aktivitas penangkapan ikan di laut dan perairan umum, sedangkan perikanan budidaya mencakup berbagai metode seperti budidaya laut, tambak, kolam, keramba, jaring apung, hingga budidaya di lahan persawahan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, wilayah ini memiliki panjang garis pantai ± 62 km yang tersebar pada 6 kecamatan pesisir dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Kondisi geografis tersebut memberikan keunggulan komparatif yang sangat besar bagi Kabupaten Batu Bara dalam pengembangan sektor perikanan, baik dari sisi perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara memandang bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan intervensi program yang lebih terarah. Dalam hal ini, perikanan budidaya menjadi salah satu fokus pengembangan karena memiliki karakteristik yang lebih terkontrol dan dapat direkayasa melalui penerapan teknologi budidaya yang terus berkembang, baik dalam hal peningkatan produktivitas, efisiensi pakan, maupun pengendalian penyakit.

Selain itu, pengembangan sektor perikanan budidaya juga dinilai lebih adaptif terhadap tantangan perubahan iklim dan fluktuasi hasil tangkapan laut, sehingga dapat menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas produksi perikanan daerah. Pemerintah daerah secara bertahap telah mendorong pengembangan komoditas unggulan seperti udang vaname, ikan lele, dan ikan nila melalui pendekatan berbasis kawasan serta pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan.

Di sisi lain, sektor perikanan tangkap tetap menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir. Namun demikian, pemerintah daerah menyadari bahwa pengelolaan perikanan tangkap masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana prasarana, fluktuasi hasil tangkapan, serta tekanan

terhadap sumber daya ikan akibat aktivitas penangkapan yang belum sepenuhnya ramah lingkungan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, modernisasi alat tangkap, serta peningkatan kapasitas nelayan terus dilakukan guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menempatkan sektor perikanan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah. Melalui pengembangan yang terintegrasi antara produksi, pengolahan, dan pemasaran, sektor perikanan diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kontribusi terhadap PDRB, tetapi juga menjadi penggerak utama peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.

Kinerja subsektor perikanan tangkap di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun peningkatannya masih relatif terbatas dan belum menunjukkan akselerasi yang signifikan.

Pada tahun 2024, produksi perikanan tangkap tercatat sebesar **51.870,10 ton**, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi **53.231,681 ton**. Dengan demikian, terjadi peningkatan produksi sebesar **1.361,581 ton** atau sekitar **2,63%**.

Analisis Tren Kinerja

1. Terjadi Pemulihan Produksi (Recovery Phase)

Peningkatan produksi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa subsektor perikanan tangkap mulai memasuki fase **pemulihan (recovery)** setelah mengalami tekanan pada tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Batu Bara menilai bahwa kenaikan ini merupakan indikasi awal bahwa intervensi kebijakan yang telah dilakukan mulai memberikan dampak positif. Namun demikian, tingkat kenaikan yang masih terbatas menunjukkan bahwa pemulihan tersebut **belum bersifat akseleratif**, melainkan masih dalam tahap stabilisasi.

2. Efektivitas Intervensi Pemerintah Mulai Terlihat

Berbagai program yang telah dilaksanakan, seperti:

- pemberdayaan nelayan kecil
- bantuan sarana penangkapan
- operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- pengawasan sumber daya perikanan

Mulai memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi. Hal ini terlihat dari kemampuan sektor perikanan tangkap untuk kembali tumbuh setelah mengalami penurunan pada tahun sebelumnya.

3. Produksi Masih Rentan terhadap Faktor Eksternal

Meskipun terjadi peningkatan, pemerintah daerah menyadari bahwa kinerja perikanan tangkap masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain:

- kondisi cuaca dan gelombang laut
- perubahan iklim
- fluktuasi stok ikan di perairan
- harga pasar komoditas perikanan

Kondisi ini menyebabkan peningkatan produksi belum dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

4. Struktur Produksi Belum Mengalami Transformasi Signifikan

Peningkatan produksi yang terjadi pada tahun 2025 masih didorong oleh:

- peningkatan aktivitas penangkapan
- bukan karena peningkatan produktivitas berbasis teknologi

Hal ini menunjukkan bahwa transformasi sektor perikanan tangkap menuju sistem yang lebih modern dan efisien **belum sepenuhnya terwujud**.

Berdasarkan perbandingan tahun 2024 dan 2025, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menilai bahwa:

- Kinerja subsektor perikanan tangkap **berhasil keluar dari fase penurunan menuju fase pemulihan**
- Namun, peningkatan yang terjadi masih **belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan yang signifikan**
- Diperlukan langkah kebijakan yang lebih progresif untuk mengubah pola pertumbuhan dari **stagnatif menjadi akseleratif**

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap capaian kinerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu melakukan penguatan kebijakan melalui:

1. Modernisasi alat tangkap dan armada nelayan:

→ untuk meningkatkan produktivitas, bukan hanya volume tangkapan

2. Penguatan sistem rantai dingin (cold chain system):

→ untuk menjaga kualitas dan meningkatkan nilai jual hasil tangkapan

3. **Pengembangan kawasan perikanan tangkap berbasis potensi wilayah**
→ agar aktivitas penangkapan lebih terarah dan efisien
4. **Penguatan data dan informasi perikanan (fishing ground berbasis data)**
→ untuk meningkatkan efektivitas penangkapan
5. **Integrasi dengan sektor pengolahan hasil perikanan**
→ agar nilai tambah ekonomi tidak keluar dari daerah

Perbandingan kinerja tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa subsektor perikanan tangkap di Kabupaten Batu Bara telah mengalami **peningkatan sebesar 2,63%**, yang menandakan adanya **perbaikan kinerja**. Namun demikian, peningkatan tersebut masih berada pada level **pemulihan awal** dan belum menunjukkan pertumbuhan yang kuat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu melakukan langkah-langkah strategis yang lebih terarah dan berbasis transformasi untuk memastikan bahwa subsektor perikanan tangkap dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian daerah.

Skema Kebijakan Peningkatan Kontribusi Sektor Perikanan yang telah di implemetasikan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan dan produktivitas sektor perikanan.
2. Meningkatkan daya saing hasil perikanan melalui peningkatan kualitas dan pengolahan.
3. Meningkatkan kesejahteraan pelaku sektor perikanan, termasuk nelayan dan pembudidaya ikan.
4. Menjamin keberlanjutan ekosistem laut dan perikanan.

Pelaksanaan skema kebijakan tersebut didukung dengan program-program Utama sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- **Tujuan:** Mengelola dan melestarikan potensi perikanan tangkap agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan.
- **Strategi:**
 - Penataan kawasan perikanan dan pengawasan aktivitas perikanan di laut.

- Penerapan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan melalui sistem kuota dan izin tangkap yang terkontrol.
- Peningkatan kualitas armada perikanan dengan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak terhadap ekosistem laut.
- Implementasi sistem pemantauan, kontrol, dan pengawasan (MCP) untuk mencegah illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.
- Program pemberdayaan nelayan melalui pelatihan dan penyuluhan tentang praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
- Peningkatan kerja sama internasional untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan global.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- **Tujuan:** Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan dengan teknologi dan praktik yang ramah lingkungan.
- **Strategi:**
 - Penyediaan benih unggul dan pakan berkualitas untuk budidaya ikan.
 - Penyuluhan kepada pembudidaya ikan mengenai teknologi budidaya yang efisien dan berkelanjutan, termasuk penggunaan sistem recirculating aquaculture systems (RAS) atau tambak yang ramah lingkungan.
 - Pengembangan fasilitas pendukung seperti sistem pengolahan air dan pengendalian penyakit dalam budidaya ikan.
 - Pemberian insentif atau subsidi kepada pembudidaya ikan untuk mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak pencemaran.
 - Penguatan peran koperasi dan kelompok usaha perikanan budidaya untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi produksi.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- **Tujuan:** Meningkatkan nilai tambah hasil perikanan melalui pengolahan dan memperluas pasar hasil perikanan baik domestik maupun internasional.
- **Strategi:**
 - Penyuluhan tentang teknik pengolahan hasil perikanan yang higienis dan efisien untuk meningkatkan daya saing produk.
 - Peningkatan kapasitas distribusi dan pemasaran, termasuk penggunaan

platform digital dan e-commerce untuk memasarkan hasil perikanan.

- Penyuluhan kepada pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan keterampilan dalam manajemen pemasaran dan penjualan produk perikanan.
- Pengembangan jaringan pasar, baik domestik maupun internasional, untuk memperluas jangkauan produk perikanan.

Output dan Outcome yang Diharapkan:

- **Output:**

- Peningkatan jumlah produk perikanan yang dihasilkan melalui pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan.
- Peningkatan jumlah unit pengolahan hasil perikanan yang menggunakan teknologi modern dan memenuhi standar kualitas.
- Penyebaran praktik perikanan berkelanjutan kepada nelayan dan pembudidaya ikan.
- Penguatan pasar produk perikanan domestik dan internasional.

- **Outcome:**

- Peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian ketahanan pangan.
- Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha pengolahan).
- Perikanan yang lebih berkelanjutan dengan pengurangan eksploitasi berlebihan dan pencemaran.
- Penurunan tingkat kerusakan ekosistem laut dan peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Dengan implementasi kebijakan ini, sektor perikanan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Kabupaten Batu Bara. Program-program ini akan memperkuat daya saing perikanan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut dan perikanan.

Capaian kinerja nyata sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan sebesar 100,39% dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran Meningkatnya Masyarakat Digital

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	-	37,63	-	45,60	41,92	91,93

Pada tahun 2025, Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Batu Bara ditargetkan sebesar 45,60, namun realisasi yang dicapai hanya sebesar 41,92, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada 91,93%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan belum berhasil dicapai secara optimal, meskipun capaian kinerja masih berada pada kategori cukup tinggi.

Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2024, dimana capaian Indeks Masyarakat Digital sebesar 37,63, maka pada tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar 4,29 poin. Kenaikan ini menunjukkan adanya progres yang cukup signifikan, namun peningkatan tersebut masih belum mencerminkan akselerasi transformasi digital yang diharapkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 50,65, maka capaian tahun 2025 masih memiliki *gap* sebesar 8,73 poin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sisa periode RPJMD, pemerintah daerah perlu melakukan percepatan yang lebih terarah, masif, dan terintegrasi, khususnya dalam penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 44,53 dan capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 42,87, maka capaian Kabupaten Batu Bara yang sebesar 41,92 masih berada di bawah rata-rata nasional maupun provinsi. Sementara itu, jika dibandingkan dengan daerah yang lebih maju seperti Kota Medan (60,00) dan Kota Tebing Tinggi (52,02), terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 18,08 poin dan 10,10 poin.

Secara umum, daerah dengan tingkat urbanisasi tinggi dan dukungan infrastruktur digital yang memadai cenderung memiliki indeks masyarakat digital yang lebih tinggi. Oleh karena itu, capaian Kabupaten Batu Bara menunjukkan bahwa potensi pengembangan digitalisasi daerah belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kualitas masyarakat digital, sehingga masih diperlukan intervensi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Table. 3.12 Perbandingan dengan Capaian Nasional, Provinsi, dan Daerah Lain Tahun 2025

Wilayah	Capaian	Selisih
Nasional	44,53	-2,61
Provinsi Sumatera Utara	42,87	-0,95
Kota Medan	60,00	-18,08
Kota Tebing Tinggi	52,02	-10,10
Kabupaten Batu Bara	41,92	-

Dari table diatas dapat dilihat capaian Kabupaten Batu Bara masih di bawah rata-rata nasional dan provinsi, meskipun selisih dengan provinsi relatif kecil (0,95 poin). Kesenjangan cukup signifikan terlihat jika dibandingkan dengan daerah perkotaan seperti Kota Medan dan Kota Tebing Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Transformasi digital di Kabupaten Batu Bara telah mengalami kemajuan, namun masih berada pada tahap akselerasi dan belum mencapai tingkat kematangan digital seperti daerah pembanding.

Peningkatan capaian indeks masyarakat digital didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Sinergi Kebijakan dan Program Digitalisasi

Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam pelaksanaan program digitalisasi mulai berjalan lebih terarah, khususnya dalam layanan administrasi pemerintahan.

2. Peran Kecamatan sebagai Koordinator Wilayah

Kecamatan berperan dalam mengoordinasikan implementasi program serta melakukan pembinaan dan monitoring kepada desa.

3. Keterlibatan Aparatur Desa sebagai Agen Perubahan

Aparatur desa menjadi ujung tombak dalam mendorong pemanfaatan teknologi oleh masyarakat.

4. Integrasi Digitalisasi dengan Pelayanan Publik

Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan administrasi mendorong masyarakat untuk mulai beradaptasi dengan sistem digital.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target secara optimal antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur Digital, akses jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah desa menjadi kendala utama.
2. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat, sebagian masyarakat masih belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan teknologi digital.
3. Kapasitas SDM Aparatur yang Belum Optimal, Kompetensi aparatur dalam pengelolaan sistem digital belum merata.
4. Pemanfaatan Teknologi yang Belum Maksimal, digitalisasi masih berfokus pada layanan administrasi, belum berkembang secara luas ke sektor ekonomi digital.
5. Belum Optimalnya Integrasi Sistem Informasi, sistem digital yang belum terintegrasi menyebabkan layanan kurang efisien dan belum memberikan dampak maksimal.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja menuju target RPJMD, direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Percepatan Pemerataan Infrastruktur Digital
Mendorong kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jangkauan internet hingga ke desa.
2. Peningkatan Literasi Digital Secara Masif
Menyelenggarakan pelatihan dan edukasi digital bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
3. Penguatan Kapasitas Aparatur Desa
Melaksanakan pelatihan teknis terkait pengelolaan layanan digital dan sistem informasi.
4. Pengembangan Ekonomi Digital Desa
Mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengembangan UMKM dan pemasaran produk lokal.
5. Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan
Mengembangkan platform digital yang terintegrasi dari tingkat kabupaten hingga desa.
6. Benchmarking dan Replikasi Praktik Baik
Mengadopsi praktik terbaik dari daerah yang lebih maju untuk mempercepat transformasi digital.

Secara keseluruhan, capaian sasaran *Meningkatnya Masyarakat Digital* menunjukkan tren peningkatan yang positif, namun belum mencapai target yang ditetapkan dan masih tertinggal dibandingkan capaian nasional, provinsi, serta daerah pembanding.

Hal ini mengindikasikan bahwa upaya digitalisasi di Kabupaten Batu Bara telah berjalan pada arah yang tepat, namun memerlukan percepatan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berorientasi pada outcome, agar mampu meningkatkan daya saing daerah dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Analisis Keterkaitan Program terhadap Peningkatan Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital merupakan indikator komposit yang mencerminkan tingkat kesiapan dan kematangan digital masyarakat melalui beberapa pilar utama, yaitu Pilar Infrastruktur dan Ekosistem, Pilar Keterampilan Digital (Digital Skills), Pilar Pemberdayaan (Empowerment), serta Pilar Pekerjaan (Jobs).

Dalam konteks ini, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika merupakan intervensi strategis yang memiliki keterkaitan langsung dalam memperkuat keempat pilar tersebut, sekaligus meningkatkan kompetensi dan keterampilan digital masyarakat.

Adapun Analisis Keterkaitan Program terhadap Peningkatan Indeks Masyarakat Digital yang merupakan skema kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara, sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Hubungan Kausalitas:

Program ini berfungsi untuk menjamin keamanan informasi dan sistem digital pemerintah, sehingga menciptakan ruang digital yang aman (*secure digital environment*). Kontribusi terhadap Pilar Indeks Masyarakat Digital:

- Pilar Infrastruktur dan Ekosistem: Penguatan sistem keamanan informasi meningkatkan keandalan infrastruktur digital serta membangun ekosistem digital yang terpercaya (*trusted digital ecosystem*).

- Pilar Keterampilan Digital: Mendorong peningkatan literasi keamanan digital (*digital security awareness*) baik bagi aparaturnya maupun masyarakat dalam penggunaan teknologi.
- Pilar Pemberdayaan: Rasa aman dalam bertransaksi dan berinteraksi secara digital meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital.
- Pilar Pekerjaan: Membuka peluang pengembangan kompetensi di bidang keamanan siber (*cybersecurity skills*), yang menjadi salah satu kebutuhan utama dalam ekonomi digital.

Tanpa jaminan keamanan informasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital akan rendah, sehingga pemanfaatan teknologi tidak akan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, persandian menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan digital (*digital trust*).

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Hubungan Kausalitas:

Program ini berfokus pada pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan aplikasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kontribusi terhadap Pilar Indeks Masyarakat Digital:

- Pilar Infrastruktur dan Ekosistem: Penyediaan aplikasi layanan publik berbasis digital memperluas akses masyarakat terhadap teknologi dan memperkuat ekosistem digital.
- Pilar Keterampilan Digital: Penggunaan aplikasi secara langsung mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan teknologi digital (*learning by doing*).
- Pilar Pemberdayaan: Akses terhadap layanan digital (administrasi, informasi, dan ekonomi) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- Pilar Pekerjaan: Pemanfaatan aplikasi digital mendorong munculnya aktivitas ekonomi berbasis digital, seperti UMKM online, layanan digital, dan ekonomi kreatif. :

Aplikasi informatika menjadi media utama interaksi digital, yang secara langsung meningkatkan tingkat adopsi teknologi dan mempercepat transformasi digital di masyarakat.

Kedua program tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi (complementary relationship):

- Persandian → menjamin keamanan dan kepercayaan
- Aplikasi informatika → menyediakan akses dan pemanfaatan

Kombinasi keduanya menghasilkan:

1. Ekosistem digital yang aman dan dapat diakses
2. Peningkatan penggunaan teknologi oleh masyarakat
3. Penguatan kompetensi digital melalui praktik langsung
4. Pertumbuhan aktivitas ekonomi digital

Kedua program tersebut mendorong peningkatan kompetensi digital melalui:

1. Eksposur langsung terhadap teknologi → masyarakat terbiasa menggunakan aplikasi digital.
2. Peningkatan literasi keamanan digital → masyarakat lebih bijak dan aman dalam berinternet.
3. Pengembangan keterampilan praktis → penggunaan aplikasi untuk layanan, komunikasi, dan ekonomi.
4. Adaptasi terhadap perubahan teknologi → masyarakat menjadi lebih adaptif dan inovatif

Dengan demikian, peningkatan kompetensi digital tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berbasis pengalaman langsung (experiential learning).

Dengan demikian, implementasi Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika memiliki daya ungkit strategis dalam meningkatkan Indeks Masyarakat Digital. Kedua program ini tidak hanya memperkuat aspek teknis digitalisasi, tetapi juga mendorong peningkatan kompetensi, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital.

Keberhasilan peningkatan indeks sangat ditentukan oleh konsistensi dalam mengintegrasikan aspek keamanan dan pemanfaatan teknologi, sehingga transformasi digital yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian kinerja nyata dari sasaran Meningkatkan Masyarakat Digital sebesar 91,93% dengan predikat sangat tinggi, menunjukkan bahwa upaya

transformasi digital di masyarakat telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan penguatan dan percepatan pada beberapa aspek strategis agar capaian yang lebih optimal dapat terwujud dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor transportasi dan pergudangan dalam PDRB

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan dalam PDRB	Persen	-	3,06	-	3,86	3,11	80,75

Pada tahun 2025, kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Kabupaten Batu Bara ditargetkan sebesar **3,86%**, namun realisasi yang dicapai hanya sebesar **3,11%**, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada **80,75%**. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan belum berhasil dicapai secara optimal.

Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2024, realisasi sektor ini sebesar **3,06%**, sehingga pada tahun 2025 hanya terjadi peningkatan sebesar **0,05 poin**. Kenaikan ini tergolong sangat terbatas dan belum mencerminkan akselerasi pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan sebagaimana yang diharapkan dalam mendukung transformasi ekonomi daerah.

Apabila dibandingkan dengan **Target Akhir RPJMD sebesar 4,11%**, maka capaian tahun 2025 masih terdapat gap sebesar **1,00 poin**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sisa periode RPJMD, pemerintah daerah perlu melakukan upaya percepatan yang lebih terarah dan sistematis agar target akhir dapat dicapai.

secara umum sektor transportasi dan pergudangan di daerah dengan karakteristik kawasan industri dan pelabuhan strategis cenderung memiliki kontribusi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, capaian Kabupaten Batu Bara sebesar 3,11% menunjukkan bahwa **potensi strategis wilayah belum sepenuhnya terkonversi menjadi nilai tambah ekonomi**.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor transportasi dan pergudangan,

pemerintah daerah telah melaksanakan tahapan kebijakan sebagai berikut:

1. **Perencanaan**

- Penyusunan kebijakan pengembangan konektivitas wilayah.
- Penetapan program prioritas pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi.

2. **Penganggaran**

- Alokasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Jalan dan Lalu Lintas.
- Dukungan terhadap pemeliharaan dan peningkatan akses distribusi.

3. **Pelaksanaan**

- Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan penghubung kawasan produksi.
- Penataan lalu lintas dan angkutan barang.

4. **Pengendalian dan Evaluasi**

- Monitoring kondisi infrastruktur.
- Evaluasi dampak terhadap mobilitas barang dan jasa.

Namun demikian, proses bisnis ini masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka pengembangan sistem logistik daerah secara utuh.

Beberapa capaian positif yang telah berhasil dicapai antara lain:

- Terjaganya **stabilitas kontribusi sektor transportasi dan pergudangan**, yang ditunjukkan dengan peningkatan meskipun terbatas dari tahun sebelumnya.
- Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
- Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah kecamatan, khususnya pada kawasan sentra produksi pertanian dan perikanan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa intervensi program telah memberikan dampak terhadap peningkatan mobilitas, meskipun masih berada pada tahap peningkatan bertahap dan belum mencapai akselerasi.

Belum tercapainya target kinerja disebabkan oleh beberapa faktor utama:

- **Belum optimalnya integrasi sistem transportasi dan pergudangan**, sehingga aktivitas logistik belum memberikan nilai tambah maksimal.

- **Minimnya fasilitas pergudangan dan logistik modern**, seperti warehouse dan cold storage.
- **Belum berkembangnya kawasan distribusi/logistik**, sehingga arus barang lebih banyak langsung keluar daerah tanpa proses lanjutan.
- **Ketergantungan terhadap pusat distribusi di luar daerah**, seperti Kota Medan.

Dengan demikian, kegagalan ini bukan semata pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga pada **struktur ekonomi logistik yang belum terbentuk secara utuh**.

Dari sisi efisiensi, penggunaan anggaran pada program pendukung telah menghasilkan output berupa:

- Peningkatan kualitas jalan
- Kelancaran lalu lintas

Namun, dari sisi outcome:

- Dampak terhadap peningkatan kontribusi PDRB masih terbatas

Hal ini menunjukkan bahwa:

Efisiensi output relatif baik, tetapi efektivitas terhadap outcome ekonomi masih perlu ditingkatkan.

Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya dikaitkan dengan strategi peningkatan nilai tambah ekonomi.

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB, dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta efisiensi sistem transportasi daerah.

Peningkatan kontribusi sektor transportasi dan pergudangan merupakan hasil dari suatu proses yang bertahap dan sistematis, dimana intervensi program harus mampu menghasilkan output yang relevan, mendorong outcome yang terukur, serta memberikan dampak (impact) terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, keterkaitan antara program, output, outcome, dan impact menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas pencapaian sasaran.

Dalam implementasinya, masih terdapat kebutuhan penguatan keterkaitan antara pembangunan infrastruktur transportasi dengan sistem logistik daerah,

sehingga output yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas fisik, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi sektor transportasi dan pergudangan secara signifikan.

Adapun hubungan logika kinerja program adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Jalan

- **Output:**

Peningkatan kualitas, kapasitas, dan konektivitas jaringan jalan, khususnya pada ruas yang menghubungkan kawasan produksi, distribusi, dan pusat kegiatan ekonomi.

- **Outcome:**

Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa, menurunnya waktu tempuh distribusi, serta meningkatnya aksesibilitas antar wilayah.

- **Impact:**

Meningkatnya aktivitas distribusi dan mobilitas ekonomi yang berkontribusi terhadap peningkatan sektor transportasi dan pergudangan dalam PDRB.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- **Output:**

Penataan sistem lalu lintas dan angkutan barang, peningkatan keselamatan transportasi, serta pengawasan operasional angkutan jalan.

- **Outcome:**

Terwujudnya sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan efisien dalam mendukung mobilitas logistik.

- **Impact:**

Menurunnya biaya distribusi dan meningkatnya efisiensi pergerakan barang yang berdampak pada peningkatan kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB.

Permasalahan strategis yang dihadapi antara lain:

- Belum tersedianya kawasan logistik terintegrasi.
- Keterbatasan fasilitas pergudangan modern.
- Belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri sebagai pusat distribusi.
- Keterbatasan investasi di sektor logistik.
- Belum terintegrasinya kebijakan transportasi dengan pengembangan ekonomi wilayah.

- Sektor transportasi dan pergudangan memiliki potensi keberlanjutan yang tinggi karena didukung oleh posisi geografis strategis dan kedekatan dengan kawasan industri.

Namun demikian, tanpa penguatan kebijakan yang terintegrasi, pertumbuhan sektor ini berpotensi stagnan dan belum mampu memberikan dampak optimal terhadap perekonomian daerah.

- Keberlanjutan sektor ini sangat bergantung pada pengembangan ekosistem logistik yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah ekonomi.

Langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

- Pengembangan kawasan logistik terintegrasi berbasis kawasan industri.
- Peningkatan investasi pada sektor pergudangan dan distribusi.
- Integrasi pembangunan infrastruktur transportasi dengan kawasan produksi dan distribusi.
- Penguatan sistem transportasi berbasis efisiensi logistik.
- Peningkatan konektivitas antar wilayah produksi dan pasar.

Untuk mencapai target RPJMD, diperlukan strategi peningkatan secara bertahap melalui roadmap sebagai berikut:

Tahun	Target
2025	Penguatan Dasar <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kawasan logistik • Peningkatan akses jalan strategis
2026	Pengembangan Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan fasilitas pergudangan • Penguatan konektivitas distribusi
2027	Integrasi Sistem <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi transportasi dan logistik • Digitalisasi sistem distribusi
2028	Akselerasi Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi aktivitas distribusi lokal • Peningkatan kontribusi sektor terhadap PDRB
2029	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan mencapai 4,11%

Capaian kinerja nyata dari sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor

transportasi dan pergudangan dalam PDRB sebesar 80,57%% dengan predikat tinggi.

Sasaran Meningkatnya Produk Modal Tetap Bruto (PMTB)

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Pembentukan Produk Modal Tetap Bruto	Persen	-	-	-	19,76	17,44	88,26

PMTB merupakan indikator investasi yang mencerminkan tingkat akumulasi modal dalam perekonomian daerah. Tingginya PMTB menunjukkan adanya aktivitas pembangunan dan investasi yang menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, seperti industri, perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Namun demikian, peningkatan PMTB perlu diiringi dengan penguatan keterkaitan antar sektor agar mampu menciptakan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian daerah.

Realisasi PMTB tahun 2025 sebesar **17,44%** belum mencapai target yang ditetapkan sebesar **19,76%**, dengan selisih sebesar **2,32 poin**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan modal tetap di daerah belum berjalan optimal, khususnya dalam mengkonversi investasi menjadi aset produktif.

Capaian tahun 2025 masih tertinggal **2,50 poin** dari target akhir RPJMD, sehingga diperlukan percepatan investasi fisik dalam jangka pendek.

Tabel 3.13 Perbandingan PMTB (Benchmark)

Wilayah	Kontribusi PMTB (%)
Nasional	27,83
Provinsi Sumatera Utara	28–32
Kabupaten Batu Bara	17,44

Kontribusi PMTB Kabupaten Batu Bara masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi, yang menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih belum sepenuhnya berbasis investasi.

Pembentukan PMTB dilaksanakan melalui tahapan kebijakan yang terstruktur, meliputi:

- Perencanaan target berbasis RPJMD
- Fasilitasi investasi melalui penerbitan **565 NIB**
- Dukungan pembangunan kawasan industri dan infrastruktur strategis
- Monitoring realisasi investasi

Meskipun tahapan telah berjalan, efektivitas masih perlu diperkuat pada tahap implementasi fisik.

PMTB telah menunjukkan peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah. Aktivitas logistik di Pelabuhan Kuala Tanjung dengan volume muat luar negeri sebesar **75.695 ton** menunjukkan bahwa infrastruktur yang telah dibangun mulai dimanfaatkan secara produktif.

Keberadaan **113 perusahaan industri pengolahan** menandakan adanya investasi nyata pada sektor produksi. Selain itu, penerbitan **565 NIB** serta **81 PBG** menunjukkan bahwa minat investasi dan pembangunan fisik terus meningkat.

Dominasi sektor konstruksi dengan **226 perusahaan** mencerminkan aktivitas pembangunan yang masif, yang merupakan komponen utama PMTB. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya konversi investasi menjadi aset tetap. Tingginya jumlah perizinan belum sepenuhnya diikuti dengan pembangunan fisik. Selain itu, kesiapan lahan dan belum optimalnya integrasi kawasan industri menyebabkan investasi belum memberikan dampak maksimal terhadap PDRB.

Dari sisi administratif, kinerja menunjukkan efisiensi tinggi melalui kemudahan perizinan. Namun dari sisi ekonomi, efektivitas masih rendah karena output belum sepenuhnya menghasilkan outcome berupa peningkatan PMTB. Pencapaian PMTB merupakan hasil keterhubungan program sebagai berikut:

- **Pengembangan Iklim Penanaman Modal** → meningkatkan minat investasi
- **Pelayanan Penanaman Modal** → mempercepat perizinan
- **Pengendalian Penanaman Modal** → memastikan realisasi
- **Stabilisasi Harga** → menjaga stabilitas ekonomi

Perlu ditegaskan bahwa pencapaian kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Batu Bara tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya

minat investasi, tetapi juga oleh efektivitas ekosistem pendukung yang memastikan investasi tersebut dapat terkonversi menjadi aset fisik yang produktif.

Meskipun berbagai indikator menunjukkan adanya aktivitas investasi yang cukup tinggi—seperti peningkatan jumlah izin usaha, berkembangnya sektor konstruksi, serta aktivitas logistik di kawasan strategis—namun dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala struktural dan operasional yang menyebabkan realisasi PMTB belum optimal. Kendala tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan mempengaruhi kecepatan serta kualitas pembentukan modal tetap di daerah.

Oleh karena itu, identifikasi hambatan dan permasalahan strategis menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil ke depan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menyelesaikan akar persoalan yang menghambat akselerasi investasi fisik di Kabupaten Batu Bara.

Selanjutnya, hambatan dan permasalahan strategis yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Lahan industri belum siap sepenuhnya
- b. Infrastruktur logistik belum optimal
- c. Investasi belum menyebar ke ekonomi local
- d. Pendampingan pasca izin belum maksimal

Dalam konteks Kabupaten Batu Bara, keberlanjutan PMTB sangat dipengaruhi oleh posisi strategis daerah sebagai kawasan industri dan logistik, serta oleh kapasitas pemerintah daerah dalam memastikan kesinambungan antara perencanaan, perizinan, dan realisasi fisik investasi. Indikator-indikator awal menunjukkan bahwa fondasi keberlanjutan tersebut telah terbentuk, namun masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi agar tidak terjadi stagnasi atau investasi yang berhenti pada tahap administratif.

Dengan demikian, analisis keberlanjutan PMTB perlu dilihat secara komprehensif, baik dari sisi potensi yang dimiliki maupun dari sisi kesiapan sistem pendukung yang memastikan investasi dapat terus tumbuh dan memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

Keberlanjutan PMTB di Kabupaten Batu Bara dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kawasan industri strategis

Keberadaan kawasan industri strategis di Kabupaten Batu Bara menjadi fondasi utama dalam menjaga kesinambungan PMTB. Kawasan ini berfungsi sebagai pusat akumulasi investasi jangka panjang, baik dalam bentuk pembangunan pabrik, gudang, maupun fasilitas pendukung industri lainnya. Dengan adanya konsentrasi aktivitas industri, investasi yang masuk tidak bersifat sporadis, melainkan terarah dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap sektor lain seperti perdagangan, transportasi, dan tenaga kerja.

Pelabuhan internasional

Keberadaan pelabuhan internasional, khususnya di Kuala Tanjung, memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan PMTB. Pelabuhan ini tidak hanya menjadi simpul distribusi barang, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi investor karena mampu menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Aktivitas ekspor-impor yang terus berlangsung menjadi indikator bahwa aset-aset tetap yang telah dibangun (seperti dermaga, crane, dan fasilitas bongkar muat) terus dimanfaatkan secara optimal dan berpotensi mendorong investasi lanjutan.

Tingginya PBG dan konstruksi

Tingginya jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta dominasi sektor konstruksi menunjukkan bahwa proses pembentukan aset tetap masih terus berlangsung. Hal ini mencerminkan adanya pipeline investasi yang sedang berjalan, di mana berbagai rencana pembangunan fisik sedang dalam tahap konstruksi maupun persiapan. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan PMTB, karena menunjukkan bahwa investasi tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi mulai bergerak menuju realisasi fisik yang akan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah di masa mendatang.

Sebelum merumuskan langkah perbaikan, perlu ditegaskan bahwa tantangan utama dalam peningkatan PMTB di Kabupaten Batu Bara tidak terletak pada rendahnya minat investasi, melainkan pada belum optimalnya percepatan realisasi investasi menjadi aset fisik yang produktif. Oleh karena itu, rekomendasi strategis diarahkan untuk memperkuat tahapan hilir dari siklus investasi, yaitu memastikan bahwa setiap potensi investasi yang masuk dapat segera diwujudkan dalam bentuk pembangunan nyata yang memberikan nilai tambah ekonomi.

Adapun rekomendasi strategis yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Percepatan realisasi investasi fisik

Diperlukan langkah percepatan pada tahapan konstruksi melalui penyederhanaan proses teknis di lapangan, seperti percepatan pembebasan lahan, koordinasi lintas sektor, serta fasilitasi kebutuhan dasar investor. Fokus utama adalah mengurangi jeda waktu antara izin terbit dan dimulainya pembangunan (groundbreaking).

Pendampingan pasca perizinan (aftercare)

Tingginya jumlah perizinan perlu diikuti dengan penguatan fungsi pendampingan kepada investor setelah izin diterbitkan. Pendampingan ini mencakup asistensi dalam pemenuhan persyaratan teknis, penyelesaian kendala operasional, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar investasi tidak berhenti pada tahap administratif.

Penyiapan lahan siap bangun

Ketersediaan lahan yang clean and clear menjadi faktor kunci dalam menarik dan mempercepat realisasi investasi. Oleh karena itu, diperlukan penataan kawasan industri yang dilengkapi dengan kepastian status lahan, infrastruktur dasar, serta kesiapan utilitas sehingga investor dapat langsung melakukan pembangunan tanpa hambatan awal.

Fokus pada investasi bernilai tambah tinggi

Arah kebijakan investasi perlu difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah tinggi, seperti industri pengolahan dan hilirisasi. Hal ini bertujuan agar PMTB tidak hanya meningkatkan angka investasi, tetapi juga mampu memperkuat struktur ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

Dalam rangka memastikan tercapainya target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, diperlukan arah kebijakan yang terstruktur, bertahap, dan berorientasi pada penyelesaian akar permasalahan. Roadmap peningkatan PMTB disusun sebagai panduan strategis untuk mengarahkan intervensi kebijakan secara lebih fokus, mulai dari percepatan realisasi investasi pada tahap awal, penguatan fondasi kawasan industri, hingga integrasi investasi dengan ekonomi lokal.

Pendekatan bertahap ini menjadi penting mengingat karakteristik PMTB yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor perizinan, tetapi juga oleh kesiapan lahan, infrastruktur, serta keterlibatan ekosistem ekonomi daerah. Dengan demikian, roadmap ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara potensi investasi yang besar dengan realisasi aset tetap yang masih perlu dioptimalkan. Untuk mencapai target RPJMD, diperlukan strategi peningkatan secara bertahap melalui roadmap sebagai berikut:

Tahun	Target Kontribusi Industri
2026	Percepatan realisasi investasi
2027	Penguatan kawasan industri
2028	Integrasi ekonomi lokal
2029	PMTB 19,94%

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah telah berada pada jalur yang tepat, namun masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi. Dengan realisasi sebesar 17,44% dari target 19,76%, capaian kinerja berada pada tingkat 88,26%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar target telah tercapai, tetapi masih terdapat ruang perbaikan yang cukup signifikan.

Melalui pelaksanaan roadmap peningkatan yang terarah—dimulai dari percepatan realisasi investasi, penguatan kawasan industri, hingga integrasi dengan ekonomi lokal—diharapkan kontribusi PMTB dapat terus meningkat secara bertahap hingga mencapai target akhir RPJMD sebesar 19,94%. Keberhasilan pencapaian target tersebut akan menjadi indikator penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah yang berbasis investasi, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran Meningkatnya Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	-	-	-	0,335	0,370	110,45

Indikator rasio pajak daerah terhadap PDRB digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam mengkonversi aktivitas ekonomi menjadi penerimaan pajak daerah. Indikator ini menjadi penting karena mencerminkan kualitas keterhubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Manfaat strategis indikator ini meliputi:

1. Mengukur efektivitas pengelolaan pajak daerah.
2. Menilai tingkat kemandirian fiskal daerah.
3. Mengidentifikasi kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak.
4. Menjadi dasar perumusan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Dengan demikian, peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah semakin berdampak langsung terhadap penerimaan daerah.

Pada tahun 2025, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB mulai digunakan sebagai indikator baru untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari aktivitas ekonomi. Indikator ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengonversi pertumbuhan ekonomi (PDRB) menjadi penerimaan pajak daerah. Namun demikian, pada tahun sebelumnya indikator ini belum menjadi ukuran kinerja utama, sehingga belum terdapat target dan capaian yang dapat dibandingkan secara langsung.

Meskipun demikian, data tahun 2024 dapat digunakan sebagai baseline awal, dimana total pajak daerah tercatat sebesar Rp152.413.420 dengan nilai PDRB ADHB sebesar Rp47.317,58 miliar, sehingga diperoleh rasio pajak daerah terhadap PDRB yang relatif masih rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa potensi fiskal daerah dari aktivitas ekonomi yang ada belum sepenuhnya tergali secara optimal.

Pada tahun 2025, pemerintah daerah mulai menetapkan target rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar 0,335, dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 0,370 atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 110,45%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah mengalami

peningkatan yang signifikan dan melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini tidak terlepas dari optimalisasi pemungutan pajak daerah, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Batu Bara.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,347, maka capaian tahun 2025 yang telah mencapai 0,370 menunjukkan bahwa target jangka menengah daerah telah terlampaui lebih awal. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak sudah berada pada jalur yang tepat, meskipun tetap memerlukan penguatan agar capaian ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Apabila dibandingkan dengan kondisi nasional, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax ratio) Indonesia masih berada pada kisaran 10%–12%, sedangkan pada level daerah umumnya jauh lebih kecil karena keterbatasan kewenangan jenis pajak. Dalam konteks ini, capaian Kabupaten Batu Bara sebesar 0,370% terhadap PDRB menunjukkan performa yang cukup baik untuk skala kabupaten, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam menggali potensi pajak dari sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, serta transportasi dan pergudangan. Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, rasio pajak daerah cenderung lebih tinggi karena basis ekonomi yang lebih besar dan struktur pajak yang lebih kompleks, sehingga Kabupaten Batu Bara masih perlu melakukan akselerasi dalam optimalisasi potensi pajak daerahnya. Proses bisnis kebijakan dalam peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB disusun secara sistematis dan terintegrasi, mulai dari tahapan perencanaan hingga pengendalian dan evaluasi. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh potensi pajak daerah dapat tergali secara optimal, sekaligus menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah. Setiap tahapan memiliki peran strategis yang saling berkaitan dalam mendorong tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Perencanaan

Penetapan target pajak daerah berbasis potensi ekonomi dan tren historis.

Pengorganisasian

Penguatan kelembagaan dan peran perangkat daerah pengelola pendapatan.

Pelaksanaan

Pemungutan pajak daerah Digitalisasi sistem pembayaran Pendataan dan validasi objek pajak

Pengendalian dan Evaluasi

Monitoring realisasi dan evaluasi capaian secara berkala.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh:

1. Peningkatan aktivitas ekonomi daerah (PDRB meningkat)
2. Optimalisasi pemungutan pajak daerah
3. Peningkatan kepatuhan wajib pajak
4. Pemanfaatan sistem digital dalam pembayaran pajak

Selain itu, pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa turut memperluas basis pajak daerah.

Meskipun target telah terlampaui, masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal:

1. Rasio pajak masih relatif rendah secara absolut (0,370%)
2. Peningkatan pajak belum sepenuhnya sebanding dengan pertumbuhan ekonomi
3. Struktur ekonomi daerah didominasi sektor yang tidak sepenuhnya menjadi objek pajak daerah

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi masih belum bersifat struktural.

Penggunaan sumber daya menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, ditandai dengan capaian kinerja yang melampaui target tanpa peningkatan signifikan pada beban anggaran. Namun demikian, efisiensi tersebut belum sepenuhnya mendorong peningkatan rasio secara signifikan, sehingga diperlukan penguatan pada aspek perluasan basis pajak.

Pencapaian indikator ini didukung oleh **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** sebagai motor utama dalam peningkatan penerimaan pajak. Program ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh potensi pajak daerah dapat teridentifikasi, terdaftar, dan dipungut secara optimal.

Logika Kinerja:

- **Program:** Pengelolaan Pendapatan Daerah
- **Output:**
 - Peningkatan jumlah wajib pajak
 - Digitalisasi pembayaran pajak

- Pemutakhiran data objek pajak
- **Outcome:**
 - Peningkatan penerimaan pajak daerah
- **Impact:**
 - Meningkatnya rasio pajak terhadap PDRB

Program yang dilaksanakan **sudah tepat**, namun masih perlu penguatan pada:

1. Ekstensifikasi pajak
2. Integrasi data ekonomi dan perpajakan
3. Pengawasan kepatuhan wajib pajak

Dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis dalam pemungutan pajak, tetapi juga berkaitan dengan struktur ekonomi daerah, kualitas basis data, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi pendapatan daerah memerlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, maupun penguatan sistem pendukung.

Adapun hambatan dan permasalahan strategis yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Basis pajak daerah masih terbatas
2. Dominasi sektor ekonomi yang tidak sepenuhnya menjadi objek pajak daerah
3. Kepatuhan wajib pajak belum optimal
4. Data potensi pajak belum terintegrasi
5. Pengawasan dan penegakan masih terbatas

Keberlanjutan peningkatan rasio pajak didukung oleh:

1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil
2. Perkembangan sektor perdagangan dan jasa
3. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat

Namun, tanpa perluasan basis pajak, peningkatan rasio berpotensi stagnan dalam jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan rasio pajak daerah terhadap PDRB secara berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan jangka pendek, tetapi juga pada penguatan fondasi

sistem perpajakan daerah secara menyeluruh. Rekomendasi strategis disusun sebagai bentuk respons atas berbagai hambatan yang dihadapi, sekaligus untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Pendekatan yang dilakukan diarahkan pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kelembagaan dan pengawasan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan mampu mendorong peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PDRB secara lebih optimal dan berkelanjutan. Rekomendasi strategis disusun sebagai bentuk respons atas berbagai hambatan yang dihadapi antara lain:

1. Ekstensifikasi pajak daerah pada sektor potensial
2. Integrasi data ekonomi dan perpajakan
3. Digitalisasi sistem pengawasan pajak
4. Peningkatan kepatuhan wajib pajak
5. Optimalisasi pajak sektor jasa dan konsumsi

Untuk mencapai target RPJMD, diperlukan strategi peningkatan secara bertahap melalui roadmap sebagai berikut:

Tahun	Strategi
2026	Penguatan intensifikasi pajak dan digitalisasi
2027	Ekstensifikasi dan perluasan basis pajak
2028	Integrasi pajak dengan ekosistem ekonomi
2029	Target Akhir RPJMD: 0,347%

Secara keseluruhan, capaian indikator rasio pajak daerah terhadap PDRB tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar **0,370%**, melampaui target tahunan dan juga target akhir RPJMD sebesar 0,347%.

Namun demikian, secara struktural rasio tersebut masih tergolong rendah, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan keterhubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan daerah. Dengan demikian, peningkatan rasio pajak tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin	-			75	-	-

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas layanan infrastruktur secara menyeluruh, mencakup aspek ketersediaan, aksesibilitas, konektivitas, kelayakan, serta keberlanjutan infrastruktur dasar. Indikator ini menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana pembangunan infrastruktur telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Tujuan dari indikator ini adalah memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kualitas layanan yang dihasilkan, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan.

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan indikator baru yang mulai digunakan dalam pengukuran kinerja pembangunan daerah. Pada tahun 2024, indikator ini belum ditetapkan sehingga tidak tersedia data pembandingan.

Pada tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 75 poin sebagai baseline awal. Namun demikian, hingga penyusunan laporan ini, data realisasi belum dirilis atau dipublikasikan oleh lembaga yang berwenang, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung.

Kondisi ini menyebabkan belum dapat dilakukan perbandingan antara target dan realisasi, serta belum dapat dianalisis ketercapaian terhadap target RPJMD maupun dibandingkan dengan capaian nasional dan daerah lain.

Meskipun demikian, gambaran kinerja infrastruktur dapat dianalisis melalui indikator pendukung, salah satunya kondisi jalan kabupaten sebagai representasi kualitas layanan infrastruktur dasar.

Berdasarkan data Dinas Bina Marga, perkembangan kondisi jalan menunjukkan tren perbaikan. Panjang jalan kondisi baik meningkat dari 228,081 km pada tahun 2023 menjadi 326,108 km pada tahun 2025. Sementara itu, jalan kondisi sedang menurun dari 137,004 km menjadi 57,381 km, yang mengindikasikan adanya peningkatan kualitas jalan dari kategori sedang menjadi baik.

Selain itu, jalan rusak ringan juga menurun signifikan dari 42,909 km menjadi 14,930 km. Namun demikian, jalan rusak berat masih menunjukkan

peningkatan menjadi 240,660 km pada tahun 2025, yang menunjukkan masih adanya kebutuhan penanganan lebih lanjut pada ruas-ruas prioritas.

Data ini menunjukkan bahwa secara substantif telah terjadi peningkatan kualitas layanan infrastruktur, meskipun indikator utama belum dapat diukur secara kuantitatif.

Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dilaksanakan melalui proses kebijakan yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga evaluasi, dengan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat dan penguatan konektivitas wilayah.

Tahapan yang dilakukan meliputi:

- **Perencanaan**

Penyusunan rencana pembangunan berbasis analisis kebutuhan, kesenjangan layanan, dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah.

- **Pengorganisasian**

Penguatan koordinasi antar perangkat daerah untuk memastikan integrasi pelaksanaan program.

- **Pelaksanaan**

Pembangunan dan peningkatan jalan, penataan kawasan permukiman, pengendalian bangunan, serta pengembangan jasa konstruksi.

- **Pengendalian dan Evaluasi**

Monitoring pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kualitas hasil pembangunan secara berkala.

Peningkatan kualitas jalan yang ditunjukkan dengan bertambahnya panjang jalan kondisi baik menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan pembangunan infrastruktur. Hal ini berdampak pada meningkatnya konektivitas antar wilayah serta kelancaran distribusi barang dan jasa.

Selain itu, penurunan signifikan pada jalan kondisi sedang dan rusak ringan menunjukkan efektivitas program peningkatan dan pemeliharaan jalan. Belum tersedianya data indikator utama menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja infrastruktur belum sepenuhnya optimal. Di sisi lain, masih tingginya panjang jalan rusak berat menunjukkan adanya backlog penanganan yang belum tertangani secara menyeluruh.

Pemanfaatan anggaran telah difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan infrastruktur dasar. Namun demikian, kebutuhan penanganan jalan rusak berat

yang cukup besar menunjukkan perlunya optimalisasi alokasi anggaran serta peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Program pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara terintegrasi untuk menghasilkan dampak yang optimal terhadap kualitas layanan.

- **Program Kawasan Permukiman**

Output: Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

Outcome: Meningkatnya kenyamanan masyarakat

- **Program Penyelenggaraan Jalan**

Output: Peningkatan kualitas dan panjang jalan

Outcome: Meningkatnya konektivitas wilayah

- **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

- Output: Penataan bangunan dan kawasan

Outcome: Lingkungan yang tertib dan aman

- **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Output: Peningkatan kapasitas jasa konstruksi

Outcome: Kualitas pembangunan meningkat

- **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Output: Implementasi tata ruang

Outcome: Pemanfaatan ruang yang optimal

Program-program tersebut telah tepat dalam mendukung peningkatan kualitas layanan infrastruktur, namun masih memerlukan penguatan pada integrasi dan fokus pada hasil layanan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih menghadapi tantangan sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan
2. Ketimpangan kualitas infrastruktur antar wilayah
3. Belum optimalnya sistem pengukuran indikator
4. Tingginya backlog jalan rusak berat
5. Koordinasi lintas sektor yang masih perlu diperkuat

Keberlanjutan pembangunan infrastruktur menunjukkan prospek yang baik dengan adanya peningkatan kualitas jalan dan komitmen pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, keberlanjutan tersebut memerlukan penguatan pada aspek pemeliharaan, peningkatan kualitas pembangunan, serta sistem pengukuran yang lebih akurat. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan infrastruktur secara lebih terarah dan terukur, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan sistem perencanaan, penganggaran, serta pengendalian kinerja. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, identifikasi permasalahan, serta kebutuhan penguatan kebijakan ke depan agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun rekomendasi strategis yang perlu dilakukan meliputi:

1. Penguatan sistem pengukuran indikator infrastruktur

Dilakukan melalui penyusunan metodologi pengukuran yang jelas dan terstandarisasi agar capaian kinerja dapat diukur secara objektif dan akuntabel.

2. Peningkatan alokasi dan efisiensi anggaran

Difokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap kualitas layanan, khususnya pada penanganan infrastruktur prioritas.

3. Prioritas penanganan jalan rusak berat

4. Diperlukan intervensi yang lebih terarah dan berskala besar untuk mengurangi backlog kerusakan jalan yang masih cukup tinggi.

5. Penguatan perencanaan berbasis data

Perencanaan pembangunan perlu didukung oleh data yang akurat dan terintegrasi agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.

6. Peningkatan koordinasi lintas sektor

Sinergi antar perangkat daerah perlu diperkuat untuk memastikan integrasi pembangunan infrastruktur dari hulu hingga hilir.

Sebagai upaya untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan, diperlukan peta jalan (roadmap) yang menggambarkan tahapan strategi yang akan dilaksanakan secara bertahap dan konsisten. Roadmap ini menjadi pedoman dalam mengarahkan kebijakan pembangunan infrastruktur agar selaras dengan target RPJMD serta mampu menjawab tantangan yang dihadapi.

Rencana aksi peningkatan kualitas layanan infrastruktur dirumuskan sebagai berikut:

Tahun	Strategi
2026	Fokus pada penyusunan baseline indikator, penguatan sistem pengukuran kinerja, serta pemetaan kondisi infrastruktur secara komprehensif.
2027	Fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur, khususnya pada penanganan jalan rusak berat dan peningkatan konektivitas antar wilayah.
2028	Fokus pada optimalisasi layanan infrastruktur, penguatan keberlanjutan, serta peningkatan kualitas layanan berbasis standar pelayanan minimum.

Dengan pelaksanaan roadmap ini secara konsisten dan terarah, diharapkan kualitas layanan infrastruktur di Kabupaten Batu Bara dapat meningkat secara signifikan, tidak hanya dari sisi kuantitas pembangunan, tetapi juga dari sisi kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Harmonis di Kabupaten Batu Bara

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Harmoni Indonesia (Kabupaten Batu Bara)	Indeks	-			6	-	-

Indeks Harmoni Indonesia merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keharmonisan kehidupan masyarakat yang mencakup dimensi toleransi, kerukunan antar kelompok, stabilitas sosial, serta tingkat konflik sosial di suatu wilayah. Indikator ini menjadi penting dalam menilai kualitas kehidupan sosial masyarakat yang aman, damai, dan kondusif sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah.

Tujuan dari indikator ini adalah memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan fisik, tetapi juga pada kualitas hubungan

sosial masyarakat, sehingga tercipta stabilitas daerah yang mendukung investasi, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Indeks Harmoni Indonesia merupakan indikator baru yang belum diukur pada tahun 2024, sehingga tidak tersedia data pembandingan sebagai baseline awal. Pada tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 6 poin sebagai langkah awal dalam pengukuran tingkat keharmonisan masyarakat. Namun demikian, hingga penyusunan laporan ini, realisasi indikator belum tersedia karena pengukuran Indeks Harmoni Indonesia belum dilaksanakan. Pengukuran indikator ini direncanakan akan dilakukan pada tahun 2026 oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum), bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai kolaborator dan enumerator daerah. Metodologi pengukuran dilakukan melalui e-survei kepada masyarakat yang didukung oleh perangkat daerah terkait serta instansi vertikal, termasuk Kementerian Agama.

Oleh karena itu, capaian kinerja tahun 2025 belum dapat dihitung dan belum dapat dibandingkan dengan target RPJMD maupun capaian nasional dan daerah lain.

Meskipun demikian, kondisi keharmonisan masyarakat dapat dianalisis melalui indikator proksi, salah satunya kinerja penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak **21 kasus**, dan seluruh pengaduan tersebut telah **diselesaikan 100%**.

Capaian ini menunjukkan bahwa sistem respons terhadap pengaduan masyarakat telah berjalan secara efektif dan responsif, serta menjadi indikasi bahwa kondisi sosial masyarakat relatif kondusif dan terkendali.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, kebijakan yang dilaksanakan mengacu pada pendekatan preventif, responsif, dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses kebijakan dilakukan secara terintegrasi dari tahap perencanaan hingga evaluasi dengan fokus pada penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Tahapan yang dilaksanakan meliputi:

- **Perencanaan**
Penyusunan kebijakan berbasis pemetaan potensi konflik sosial dan penguatan nilai toleransi.
- **Pengorganisasian**
Penguatan koordinasi antara Kesbangpol, Satpol PP, serta instansi vertikal.
- **Pelaksanaan**
Pembinaan sosial, deteksi dini konflik, penegakan ketertiban umum, serta peningkatan kesiapsiagaan.
- **Pengendalian dan Evaluasi**
Monitoring kondisi sosial dan evaluasi penanganan gangguan ketertiban.

Kondisi sosial masyarakat yang relatif stabil menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan ketahanan sosial dan penanganan gangguan ketertiban telah berjalan efektif. Hal ini diperkuat dengan capaian penanganan pengaduan masyarakat oleh Satpol PP yang mencapai 100%, mencerminkan responsivitas pemerintah daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor yang cukup baik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan yang terjadi di lingkungannya.

Belum tersedianya data indikator utama menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja keharmonisan masyarakat belum optimal. Hal ini menjadi kendala dalam melakukan evaluasi berbasis data yang komprehensif.

Pemanfaatan sumber daya telah difokuskan pada kegiatan pembinaan sosial dan penanganan ketertiban umum. Tingkat penyelesaian pengaduan yang tinggi menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara efektif, meskipun pengukuran efisiensi secara kuantitatif masih terbatas.

Peningkatan keharmonisan masyarakat didukung oleh program-program sebagai berikut:

- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program-program tersebut telah tepat dalam mendukung terciptanya stabilitas sosial, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pengukuran kinerja berbasis indikator.

Pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Belum tersedianya data indikator utama
2. Potensi konflik sosial berbasis ekonomi dan sosial
3. Keterbatasan sistem deteksi dini berbasis data
4. Koordinasi lintas sektor yang perlu diperkuat
5. Partisipasi masyarakat yang belum merata

Keberlanjutan keharmonisan masyarakat memiliki fondasi yang cukup kuat, ditunjukkan dengan kondisi sosial yang relatif stabil dan kemampuan penanganan gangguan ketertiban yang efektif.

Namun demikian, keberlanjutan tersebut memerlukan penguatan sistem pengukuran, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan aktif masyarakat.

Dalam rangka memperkuat keharmonisan masyarakat secara berkelanjutan, diperlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Percepatan implementasi pengukuran Indeks Harmoni Indonesia
2. Penguatan sistem deteksi dini konflik sosial
3. Peningkatan peran kelembagaan sosial
4. Penguatan koordinasi lintas sektor
5. Peningkatan literasi sosial dan toleransi masyarakat

Sebagai langkah strategis menuju pencapaian target RPJMD, disusun roadmap sebagai berikut:

Tahun	Fokus Strategi	Aksi Utama	Output	Outcome
2026	Pengukuran Awal	Pelaksanaan survei dan penyusunan baseline	Data indeks tersedia	Dasar evaluasi
2027	Penguatan Stabilitas	Deteksi dini konflik dan pembinaan sosial	Penurunan potensi konflik	Stabilitas meningkat
2028	Optimalisasi	Integrasi kebijakan sosial	Sistem sosial kuat	Keharmonisan berkelanjutan
2029	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Batu Bara yang harmonis, stabil, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat.			

Berbagai indikator proksi menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat relatif stabil dan kondusif. Hal ini tercermin dari kinerja penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang menunjukkan tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat mencapai 100%, serta minimnya eskalasi konflik sosial yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan telah mampu menjaga stabilitas sosial dan memperkuat ketahanan masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan melalui penguatan pembinaan sosial, peningkatan kewaspadaan terhadap potensi konflik, serta penegakan ketertiban umum menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Meskipun demikian, ke depan diperlukan penguatan pada aspek pengukuran kinerja, integrasi data, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar capaian keharmonisan dapat terukur secara lebih objektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, sasaran ini berada pada kondisi **on track secara substansi**, dengan capaian kinerja nyata yang tercermin dari stabilitas sosial yang terjaga, meskipun capaian indikator formal belum dapat dihitung. Keberhasilan ini menjadi dasar yang kuat untuk meningkatkan kualitas keharmonisan masyarakat secara lebih terarah dan terukur pada periode selanjutnya.

Sasaran Meningkatnya indeks Reformasi Hukum

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	-	-	83	96,96	116, 82%

Indeks Reformasi Hukum merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola hukum di daerah, mencakup aspek harmonisasi regulasi, kepastian hukum, efektivitas implementasi kebijakan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Indikator ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif, sinkron, dan tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi. Selain itu, indeks ini juga mencerminkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat serta tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Tujuan utama dari indikator ini adalah mewujudkan sistem hukum daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan mendukung iklim investasi serta pelayanan publik yang berkualitas.

Indeks Reformasi Hukum merupakan indikator yang mulai digunakan dalam pengukuran kinerja daerah. Pada tahun 2024, indikator ini belum ditetapkan sebagai target kinerja, namun telah memiliki nilai realisasi sebesar **76,56** yang dapat digunakan sebagai baseline awal.

Pada tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar **83**, dengan realisasi sebesar **96,96**, sehingga capaian kinerja mencapai **116,82%**. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan **berhasil dilampaui secara signifikan**, dengan selisih sebesar **13,96 poin** di atas target.

Jika dibandingkan dengan baseline tahun 2024 sebesar **76,56**, terjadi peningkatan nilai indeks menjadi **96,96**, yang mengindikasikan adanya **perbaikan yang sangat signifikan dalam kualitas reformasi hukum secara agregat**. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendorong reformasi hukum mulai memberikan hasil yang optimal.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **85**, capaian tahun 2025 telah melampaui target tersebut dengan tingkat capaian sebesar **114,07%**, atau terdapat kelebihan capaian sebesar **11,96 poin**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini tidak hanya memenuhi target jangka menengah, tetapi juga telah melampauinya sebelum akhir periode RPJMD.

Secara umum, capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan reformasi hukum di daerah telah berjalan dengan baik, meskipun ke depan tetap diperlukan upaya untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan kualitas implementasi agar capaian yang telah diraih dapat dipertahankan.

Perbandingan dengan capaian nasional dan provinsi belum dapat disajikan secara komprehensif karena keterbatasan data pembanding yang tersedia secara spesifik untuk indikator ini pada level kabupaten/kota. Namun demikian, secara umum, daerah dengan tata kelola hukum yang baik cenderung memiliki nilai indeks di atas 80, sehingga capaian saat ini masih perlu ditingkatkan.

Peningkatan Indeks Reformasi Hukum dilaksanakan melalui proses kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan kualitas regulasi dan kepastian hukum. Proses ini mencakup tahapan perencanaan

hingga evaluasi yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan implementatif.

Tahapan yang dilaksanakan meliputi:

- **Perencanaan**

Penyusunan kebijakan hukum berbasis kebutuhan daerah serta harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.

- **Pengorganisasian**

Penguatan peran perangkat daerah yang menangani aspek hukum serta koordinasi lintas sektor.

- **Pelaksanaan**

Penyusunan regulasi, pendampingan hukum, serta asistensi terhadap perangkat daerah dalam implementasi kebijakan.

- **Pengendalian dan Evaluasi**

Evaluasi kualitas regulasi dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari mulai terbangunnya **sistem pendampingan dan asistensi hukum**, serta meningkatnya kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya harmonisasi regulasi. Program yang dilaksanakan telah mampu mendorong terbentuknya regulasi yang lebih tertib, sistematis, dan terarah, sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai indeks.

Peningkatan nilai indeks menunjukkan bahwa reformasi hukum mulai berjalan ke arah yang lebih baik, meskipun dalam implementasinya masih terdapat beberapa tantangan. Beberapa kebijakan yang dihasilkan masih menghadapi kendala dalam aspek harmonisasi, implementasi, serta evaluasi, sehingga kualitas regulasi belum sepenuhnya merata.

Selain itu, pengendalian terhadap kualitas regulasi masih perlu diperkuat, mengingat masih terdapat potensi tumpang tindih kebijakan dan ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian kinerja tinggi, kualitas proses reformasi hukum masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Penggunaan sumber daya telah diarahkan secara tepat pada kegiatan penyusunan, pendampingan, dan asistensi kebijakan hukum. Namun demikian,

untuk menjaga keberlanjutan capaian, efektivitas pemanfaatan sumber daya perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang optimal dan implementatif.

Peningkatan reformasi hukum didukung oleh:

- **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Logika Kinerja:

Output: Tersusunnya regulasi yang harmonis dan dilakukan pendampingan hukum

Outcome: Meningkatnya kualitas kebijakan dan kepatuhan hukum

Impact: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas

Program ini secara substantif sudah tepat karena menysasar langsung pada akar permasalahan reformasi hukum, yaitu kualitas regulasi dan implementasinya.

Namun demikian, diperlukan penguatan pada aspek pengendalian kualitas dan evaluasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan reformasi hukum, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain:

1. Harmonisasi regulasi belum optimal
2. Kualitas penyusunan kebijakan belum merata
3. Evaluasi dan pengendalian regulasi masih terbatas
4. Kapasitas SDM di bidang hukum masih perlu ditingkatkan
5. Koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya efektif

Keberlanjutan reformasi hukum memiliki dasar yang cukup kuat dengan adanya program pendampingan dan asistensi hukum yang telah berjalan. Namun demikian, untuk menjaga konsistensi capaian tersebut, diperlukan penguatan sistem pengendalian kualitas regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi kebijakan lintas sektor agar reformasi hukum dapat berjalan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Reformasi Hukum, diperlukan langkah strategis yang lebih terarah dan sistematis, antara lain:

1. Penguatan harmonisasi regulasi daerah
2. Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan berbasis evidence

3. Penguatan fungsi evaluasi dan pengendalian regulasi
4. Peningkatan kapasitas SDM bidang hukum
5. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan kualitas capaian, disusun roadmap sebagai berikut:

Tahun	Fokus Strategi	Aksi Utama	Output	Outcome
2026	Penguatan Sistem	Harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas SDM	Regulasi lebih berkualitas	Dasar reformasi hukum
2027	Percepatan Implementasi	Penguatan evaluasi dan pengendalian regulasi	Penurunan tumpang tindih	Kepastian hukum meningkat
2028	Optimalisasi	Integrasi kebijakan lintas sektor	Sistem hukum terintegrasi	Indeks meningkat signifikan

Secara keseluruhan, capaian Indeks Reformasi Hukum tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya reformasi hukum telah berjalan dengan sangat baik dan mampu melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, capaian tersebut perlu diimbangi dengan penguatan kualitas proses, khususnya dalam aspek harmonisasi, evaluasi, dan pengendalian regulasi.

Program yang dilaksanakan telah berada pada arah yang tepat, yaitu melalui penguatan perumusan kebijakan dan pendampingan hukum. Ke depan, diperlukan konsistensi dan akselerasi yang lebih terfokus pada peningkatan kualitas regulasi, penguatan pengendalian, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

Dengan langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan, capaian Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Batu Bara diharapkan tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga kuat secara kualitas dan berkontribusi nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Capaian kinerja nyata dari sasaran *Meningkatnya Indeks Reformasi Hukum* sebesar **116,82%** dengan predikat **sangat tinggi** menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi hukum di daerah telah berjalan secara efektif dan mampu melampaui target yang ditetapkan.

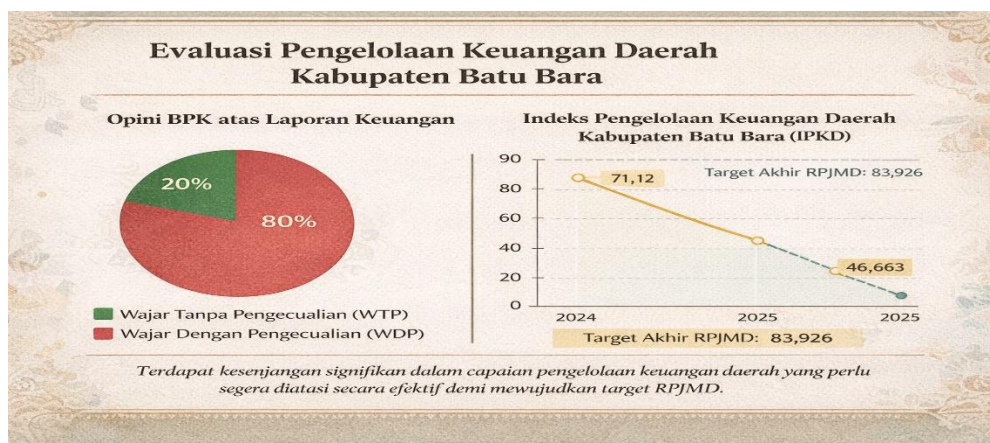
Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam memperkuat kualitas perumusan kebijakan, harmonisasi regulasi, serta pelaksanaan pendampingan hukum yang semakin terarah. Meskipun demikian, untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut, diperlukan penguatan pada aspek pengendalian kualitas regulasi,

evaluasi kebijakan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan, sehingga reformasi hukum tidak hanya tinggi secara capaian kinerja, tetapi juga semakin berkualitas dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTD	Tidak Tercapai	WTP	WTD	Tidak Tercapai
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	-	-	-	81,12	46,66	57,52

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menetapkan sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Sasaran ini tidak hanya menekankan pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada kualitas pengelolaan keuangan yang mampu mendukung efektivitas pembangunan dan pelayanan publik.



Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, digunakan dua indikator utama, yaitu **Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan** dan **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)**. Kedua indikator ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas

pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi kepatuhan dan kewajaran laporan keuangan, maupun dari sisi kinerja pengelolaan keuangan secara sistemik.

Opini BPK mencerminkan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi dan kepatuhan terhadap peraturan, sedangkan IPKD menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, kedua indikator tersebut menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel. Selanjutnya, masing-masing indikator akan dijelaskan secara rinci untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai capaian kinerja yang telah dihasilkan.

Hasil pengukuran kinerja sasaran ini dapat dilihat pada penjelasan 2 indikator di bawah ini:

a. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan indikator utama dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Opini ini mencerminkan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Indikator ini memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kepercayaan publik dan pemerintah pusat terhadap tata kelola keuangan daerah.

Tujuan dari indikator ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan, sehingga mampu mendukung efektivitas pembangunan dan pelayanan publik.

Opini BPK merupakan indikator kinerja yang bersifat outcome dan ditetapkan sebagai target strategis dalam RPJMD dengan target akhir **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah **WTP**, namun realisasi yang diperoleh adalah **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**, sehingga capaian

kinerja dinyatakan **tidak tercapai**. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan perbaikan.

Pada tahun 2025, hingga penyusunan laporan ini, opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara masih dalam proses audit oleh BPK, sehingga realisasi belum dapat disajikan dan capaian kinerja belum dapat dihitung.

Kondisi ini menyebabkan belum dapat dilakukan perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target RPJMD maupun dengan capaian nasional dan daerah lain. Namun demikian, proses audit yang sedang berlangsung menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kebijakan yang dilaksanakan berfokus pada penguatan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap regulasi. Proses bisnis kebijakan dilakukan secara terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pengawasan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan.

Tahapan yang dilaksanakan meliputi:

- **Perencanaan**

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan.

- **Pengorganisasian**

Penguatan peran perangkat daerah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.

- **Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai prinsip akuntansi pemerintahan dan standar operasional.

- **Pengendalian dan Evaluasi**

Pengawasan internal serta tindak lanjut atas temuan audit untuk perbaikan berkelanjutan.

Upaya peningkatan pengelolaan keuangan telah menunjukkan adanya perbaikan sistem, khususnya dalam penguatan pengawasan internal dan peningkatan kesadaran perangkat daerah terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan.

Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan pasca opini WDP tahun 2024 menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada tahun berikutnya.

Tidak tercapainya target opini WTP pada tahun 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari aspek kepatuhan, pengendalian intern, maupun kualitas pelaporan.

Permasalahan ini mengindikasikan bahwa reformasi pengelolaan keuangan belum berjalan optimal dan memerlukan perbaikan yang lebih sistematis dan menyeluruh.

Penggunaan sumber daya telah difokuskan pada kegiatan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan. Namun demikian, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan sumber daya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam memastikan bahwa setiap perangkat daerah mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah didukung oleh:

- **Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Output: Terselenggaranya pengawasan dan audit internal

Outcome: Meningkatnya kepatuhan dan kualitas laporan keuangan

Impact: Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan

Program ini secara substantif telah tepat karena berfokus pada penguatan pengendalian dan pengawasan, yang merupakan faktor kunci dalam memperoleh opini WTP. Namun demikian, efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui penguatan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain:

1. Tindak lanjut temuan audit belum optimal
2. Kualitas penyusunan laporan keuangan belum merata
3. Sistem pengendalian intern belum sepenuhnya efektif
4. Kapasitas SDM pengelola keuangan masih perlu ditingkatkan
5. Koordinasi antar perangkat daerah belum optimal

Keberlanjutan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan memiliki dasar yang cukup kuat dengan adanya komitmen perbaikan pasca opini WDP.

Namun demikian, keberlanjutan tersebut memerlukan penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kapasitas SDM, serta konsistensi dalam tindak

lanjut hasil audit agar perbaikan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai opini WTP sesuai target RPJMD, diperlukan langkah strategis yang lebih terarah dan konsisten.

1. Percepatan tindak lanjut temuan audit BPK
2. Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan
4. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah
5. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan berbasis standar akuntansi

Sebagai upaya mencapai target opini WTP, disusun roadmap sebagai berikut:

Tahun	Fokus Strategi	Aksi Utama	Output	Outcome
2026	Perbaikan Dasar	Tindak lanjut temuan audit dan penguatan SPIP	Temuan audit menurun	Kualitas laporan meningkat
2027	Penguatan Sistem	Peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan	Sistem keuangan lebih tertib	Kepatuhan meningkat
2028	Optimalisasi	Integrasi sistem dan konsistensi pelaporan	Laporan keuangan berkualitas	Opini WTP tercapai

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan dalam mencapai standar akuntabilitas yang optimal, sebagaimana tercermin dari belum tercapainya target opini WTP pada tahun 2024. Kondisi ini menjadi perhatian serius dan mendorong dilakukannya berbagai langkah perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan.

Meskipun capaian tahun 2025 belum dapat disajikan karena masih dalam proses audit BPK, berbagai upaya strategis telah dilakukan, khususnya dalam memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kapasitas SDM, serta menindaklanjuti temuan audit sebelumnya.

Dengan komitmen perbaikan yang berkelanjutan dan pelaksanaan roadmap secara konsisten, pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat semakin akuntabel dan transparan, sehingga target opini WTP dapat tercapai sesuai dengan arah kebijakan RPJMD.

b. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah secara

komprehensif, mencakup seluruh siklus keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga efektif, efisien, transparan, dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan indikator baru yang mulai digunakan dalam pengukuran kinerja. Pada tahun 2024, indikator ini belum memiliki target dan realisasi sebagai baseline.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar **81,12**, dengan realisasi sebesar **46,663**, sehingga capaian kinerja mencapai **57,52%**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian masih jauh dari target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **83,926**, capaian tahun 2025 baru mencapai sekitar **55,6%** dari target akhir, yang menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan.

Perbandingan dengan capaian nasional dan provinsi belum dapat disajikan secara komprehensif karena keterbatasan data pembanding yang tersedia. Namun demikian, capaian yang masih rendah mengindikasikan perlunya penguatan sistem pengelolaan keuangan secara menyeluruh.

Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kebijakan dilaksanakan melalui pendekatan sistemik yang mencakup seluruh siklus keuangan daerah. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Tahapan yang dilaksanakan meliputi:

1. Perencanaan berbasis kinerja
2. Penganggaran yang selaras dengan prioritas pembangunan
3. Pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan
4. Pengendalian dan evaluasi berbasis kinerja

Upaya penguatan pengelolaan keuangan telah menunjukkan adanya perbaikan pada aspek sistem dan kepatuhan. Program yang dilaksanakan telah mampu membangun fondasi pengelolaan keuangan yang lebih tertib, meskipun belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan nilai indeks.

Rendahnya capaian indeks menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam integrasi sistem, kualitas perencanaan, serta konsistensi pelaksanaan anggaran.

Penggunaan sumber daya telah diarahkan pada penguatan sistem pengelolaan keuangan, namun hasil yang dicapai menunjukkan bahwa efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan dampak yang lebih optimal.

Indikator ini didukung oleh:

- **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
- **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Logika Kinerja kedua program adalah:

Output: Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan aset daerah

Outcome: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

Impact: Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel

Program yang dilaksanakan telah tepat karena mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan. Namun demikian, diperlukan penguatan pada aspek integrasi sistem dan pengendalian pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, berbagai kebijakan dan program telah dijalankan secara sistematis. Namun demikian, hasil capaian yang belum optimal menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala struktural dan teknis yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan secara menyeluruh.

Permasalahan yang dihadapi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan kualitas perencanaan, integrasi sistem, serta kapasitas kelembagaan yang belum sepenuhnya mampu mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi kinerja. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena berdampak langsung terhadap kualitas pelaksanaan anggaran, pengelolaan aset, hingga akurasi pelaporan keuangan daerah.

Oleh karena itu, identifikasi hambatan dan permasalahan strategis menjadi langkah krusial dalam merumuskan kebijakan perbaikan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Adapun hambatan dan permasalahan strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Kualitas perencanaan dan penganggaran belum optimal

2. Pengelolaan aset daerah belum tertib
3. Integrasi sistem keuangan belum maksimal
4. Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan
5. Pengendalian dan evaluasi belum optimal

Keberlanjutan pengelolaan keuangan memiliki dasar yang cukup kuat melalui program yang telah berjalan. Namun demikian, diperlukan penguatan sistem, kapasitas SDM, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan agar peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara signifikan, diperlukan langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan.

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
2. Penertiban pengelolaan aset daerah
3. Penguatan sistem informasi keuangan
4. Peningkatan kapasitas SDM
5. Penguatan pengendalian dan evaluasi

Dalam rangka memastikan tercapainya target pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berkualitas sesuai dengan arah kebijakan RPJMD, diperlukan langkah-langkah strategis yang dirancang secara bertahap dan berkelanjutan. Roadmap ini disusun sebagai pedoman implementatif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, sekaligus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Pendekatan yang digunakan dalam roadmap ini menitikberatkan pada perbaikan fundamental pada tahap awal, dilanjutkan dengan penguatan sistem dan integrasi, hingga mencapai tahap optimalisasi yang berorientasi pada konsistensi dan keberlanjutan kinerja. Dengan pendekatan bertahap ini, diharapkan setiap intervensi kebijakan dapat memberikan dampak yang terukur terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Adapun roadmap rencana aksi peningkatan disusun sebagai berikut:

Tahun	Fokus Strategi	Aksi Utama	Output	Outcome
2026	Perbaikan Dasar	Penataan sistem pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas SDM	Sistem pengelolaan lebih tertib dan sesuai ketentuan	Kualitas pengelolaan keuangan mulai meningkat
2027	Penguatan Sistem	Integrasi sistem keuangan daerah dan penguatan fungsi pengendalian	Sistem keuangan terintegrasi dan pengendalian lebih efektif	Efektivitas dan akuntabilitas meningkat
2028	Optimalisasi	Konsistensi pelaksanaan,	Sistem pengelolaan stabil	Target RPJMD tercapai

Tahun	Fokus Strategi	Aksi Utama	Output	Outcome
		monitoring, dan evaluasi berkelanjutan	dan berjalan optimal	secara berkelanjutan

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan dalam mencapai kualitas yang optimal, baik dari sisi kepatuhan maupun kinerja pengelolaan secara menyeluruh. Hal ini tercermin dari belum tercapainya target opini WTP pada tahun 2024 serta capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang masih berada di bawah target pada tahun 2025.

Meskipun demikian, berbagai langkah perbaikan telah dilakukan secara sistematis, termasuk penguatan pengawasan, penataan sistem keuangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.



Dengan komitmen perbaikan yang berkelanjutan dan pelaksanaan roadmap secara konsisten, pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat semakin akuntabel, transparan, dan efektif, sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B 65,00	B 62,83	96,67	B 64,87	B 64,35	99,20%

Nilai Evaluasi AKIP

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP diukur sesuai dengan Permenpan No. 88 Tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian keberhasilan indikator ini adalah sebesar 99,20%, dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Bupati tahun 2025 yaitu B dengan poin 64,87 poin dan dengan realisasi B dengan poin 64,35. Perhitungannya didasarkan dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 yang diterbitkan pada tahun Desember 2025.

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/228/AA.05/2024 perihal: Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Kabupaten Batu Bara menerima predikat B dengan nilai 64,35. Tabel dibawah menggambarkan perkembangan nilai AKIP Kabupaten Batu Bara dari tahun 2019-2025:

Tabel 3.14.

Perkembangan nilai AKIP Kabupaten Batu Bara dari tahun 2018-2025

No	Tahun	Bobot	Nilai	Predikat
1	2018	100	37,05	C
2	2019	100	45,02	C
3	2020	100	55,63	CC
4	2021	100	56,35	CC
5	2022	100	60,55	B
6	2023	100	61,28	B
7	2024	100	62,83	B
8	2025	100	64,35	B

Berikut perbandingan nilai AKIP tahun 2024 dan 2025 perkomponen:

Tabel 3.15.

Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dan 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	20,98	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30	15,11	15,11
3	Pelaporan Kinerja	15	9,92	9,92
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,82	16,82
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,83	64,35
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Pada tahun 2025, target ditingkatkan menjadi **64,87**, dengan realisasi sebesar **64,35**, sehingga capaian kinerja mencapai **99,20%**. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan nilai SAKIP sebesar **1,52 poin**, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam implementasi akuntabilitas kinerja. Namun demikian, capaian terhadap target masih belum optimal karena terdapat selisih sebesar **0,35 poin** dari target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **72,05**, capaian tahun 2025 baru mencapai sekitar **89,3%** dari target akhir. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih sistematis dan konsisten untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan capaian nasional dan beberapa daerah yang telah mencapai kategori **BB hingga A** bahkan **AA**, nilai SAKIP Kabupaten Batu Bara masih berada pada level yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek kualitas perencanaan kinerja, cascading kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam usaha pencapaian indikator sasaran ini, beberapa upaya telah dilaksanakan yakni :

1. Melakukan reviu terhadap perjanjian kinerja dan pohon kinerja Pemda dan Perangkat Daerah;
2. Melakukan perbaikan sasaran strategis dan indikator kinerja terhadap pemda menjadi selaras dan lebih beorientasi hasil;
3. Menetapkan IKU pada pemda dan OPD yang dilengkapi dengan definisi operasional, sumber data, dan formulasi perhitungan yang relevan.

4. Menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah dan PD melalui website batubarakab.go.id sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik;
5. Melaksanakan evaluasi internal akuntabilitas terhadap 38 PD oleh Inspektorat.
6. Beberapa PD menindaklanjuti hasil evaluasi internal inspektorat dengan menyusun matrik tindak lanjut.

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kemenpan RB, terdapat kelemahan-kelemahan yang masih di jumpai dalam mengimplemetasikan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Batu Bara, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menyusun dokumen RPJMD serta Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi (Renaksi) baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun PD. Meski demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Terdapat sasaran strategis yang belum sepenuhnya menggambarkan kinerja yang sesuai dengan level jabatannya. Disamping itu indikator yang digunakan juga tidak cukup menjawab sarannya. Contohnya pada PK Bupati Batu Bara Tahun 2025 yaitu sasaran strategis “Terkendalinya Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri” dengan indikator “Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri”, serta sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pemerataan Pembangunan Ekonomi” dengan indikator “Indeks Gini.
- b. Sebagian besar PD belum melakukan identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya crosscutting antar PD dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kinerja organisasi, contohnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Terdapat sasaran strategis dan indikator PD yang belum berorientasi hasil sesuai dengan level jabatannya. Contohnya PK Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 yaitu sasaran strategis “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Persampahan” dengan indikator kinerja “Persentase Sampah Terkelola;

- d. Beberapa indikator kinerja masih belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dan cukup. Contohnya pada PK Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 yaitu indikator kinerja “Jumlah situs cagar budaya yang memperoleh pembinaan” untuk menjawab sasaran “Peningkatan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan”
- e. Penjabaran kinerja PD ke level Eselon III, IV dan level di bawahnya masih belum baik. Hal ini ditunjukkan pada beberapa pejabat yang memiliki sasaran dan indikator kinerja yang sama pada beberapa bidang. Contohnya pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada PK Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dengan PK Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang sama-sama memiliki sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” dengan indikator kinerja “Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial” dan target “50%”
- f. Penetapan rencana aksi pada PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK. Contohnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dari 15 indikator kinerja tidak terdapat uraian kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam menunjang kinerja tersebut, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab setiap kegiatan.

Rekomendasi perbaikan adalah:

- a. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound). Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya serta sesuai dengan karakteristik/tugas organisasi;
- b. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki

- untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
- c. Menyusun rencana aksi dengan kegiatan-kegiatan yang logis dan terukur, sehingga dapat diyakini dapat menunjang ketercapaian sasaran kinerja yang ditetapkan;
 - d. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja Pemda dan PD dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan critical success factors dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan.
 - e. Belum menyusun identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya crosscutting antar PD dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kinerja organisasi;
 - f. Terdapat sasaran strategis yang belum sepenuhnya menggambarkan kinerja yang sesuai dengan level. Disamping itu indikator yang digunakan tidak cukup menjawab sarannya. Contohnya pada PK Bupati Batu Bara Tahun 2024 yaitu sasaran strategis “ Terkendalinya Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri” dengan indikator “Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, serta sasaran strategis “ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerataan Pembangunan Ekonomi” dengan Indikator “Indeks Gini”;
 - g. Terdapat sasaran strategis dan indikator PD yang belum berorientasi hasil sesuai dengan level jabatannya. Contohnya PK Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 yaitu sasaran strategis “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Persampahan” dengan Indikator Kinerja “Persentase Sampah Terkelola”. Contoh lainnya pada PK Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 yaitu sasaran strategis “Tersusunnya Laporan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP” dengan indikator kinerja “opini BPK”;
 - h. Beberapa indikator kinerja masih belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound) dan cukup. Contohnya pada

PK Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yaitu indikator kinerja “Jumlah situs cagar budaya yang memperoleh pembinaan” untuk menjawab sasaran “ Peningkatan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan”;

- i. Penjabaran kinerja PD ke level Eselon III, IV dan level dibawahnya masih belum baik. Hal ini ditunjukkan pada beberapa pejabat yang memiliki sasaran dan indikator kinerja yang sama pada beberapa bidang. Contohnya pada Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada PK Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dengan PK Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang sama-sama memiliki sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” dengan Indikator Kinerja “Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial” dan target “50%”;
- j. Penetapan rencana aksi pada PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK.

2. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Batu Bara beserta perangkat daerahnya telah mengukur capaian rencana aksi kinerja secara berkala. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Belum seluruh PD melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala kepada unit di bawahnya secara berjenjang, contohnya pada Dinas Pendidikan
- b. Aplikasi e-Monev Batu Bara masih dalam tahap pengembangan sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada sebagian PD masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mencakup capaian kinerja outcome yang diperjanjikan, sehingga capaian kerjanya belum diketahui.

Rekomendasi :

- a. Menetapkan IKU yang tepat pada seluruh PD dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja;
- b. Membangun aplikasi SAKIP Kabupaten Batu Bara untuk pengumpulan dan pengolahan data, pengukuran dan penilaian kinerja organisasi sampai ke individu secara real time;
- c. Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan dalam memberikan penilaian kinerja PD, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi, dan mutasi/rotasi pegawai.
- d. Aplikasi e-Monev Batu Bara masih dalam tahap pengembangan sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
- e. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada sebagian PD masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mencakup capaian kinerja outcome yang diperjanjikan, sehingga capaian kerjanya belum diketahui.

3. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja pada tingkat Pemda dan PD Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Meski demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Penyajian laporan kinerja Pemda dan beberapa PD Tahun 2024 belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang memadai dan mendalam untuk setiap indikator kinerja utama. Contohnya pada:
 - Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, dalam menyajikan informasi capaian kinerja belum dilengkapi data tren atau capaian tahun sebelumnya, perbandingan dengan target pada perencanaan jangka menengah dan perbandingan dengan level provinsi/nasional.

- Dinas Perikanan dan Peternakan, pada indikator yang belum memenuhi target kinerja (<100%), seperti pada “Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Peternakan dalam PDRB” tidak terdapat penjelasan faktor-faktor penghambat dan rekomendasi strategi/tindakan untuk tahun selanjutnya.
- b. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contohnya pada:
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, yaitu indikator “Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan” dengan target tahun 2025 adalah “82%”, sedangkan realisasi kinerja indikator tersebut pada tahun 2024 telah mencapai “91,4%”. Indikator lainnya yaitu “Prevalensi Balita Stunting”, ditargetkan “13,5%” dengan capaian tahun sebelumnya yang telah mencapai “5,31%.
 - Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu indikator kinerja “Indeks SPBE”, dengan target tahun 2025 sebesar 2,4 (Cukup), sementara realisasi tahun 2024 sebesar 2,67 (Baik);
- c. Terdapat penyajian data yang tidak konsisten dalam laporan kinerja, contohnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), tertulis bahwa PK Perubahan DPMPTSP Tahun 2024 pada indikator “Nilai Investasi PMDN dan PMS” ditargetkan “53 Triliun”, namun pada penjelasan Bab Akuntabilitas Kinerja, indikator tersebut diberikan nilai capaian “90,13%” atas realisasi sebesar “450,65 Miliar” dari target Nilai Investasi PMDN dan PMS sebesar “500 Miliar”.

Rekomendasi :

- a. Menginformasikan laporan kinerja Pemda dan PD dalam laman resmi Kabupaten Batu Bara sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;
- b. Meningkatkan kualitas laporan kinerja Pemda dan PD dengan

- memastikan keandalan dalam pengolahan data kinerja, serta menyajikan analisis yang memadai tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, target jangka menengah, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- c. Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 telah melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada seluruh PD. Sebagian PD juga telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal tahun sebelumnya. Meski demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi internal yang dikeluarkan oleh Inspektorat belum sepenuhnya tepat menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di PD. Contohnya pada LHE AKIP Internal Dinas Perikanan dan Peternakan, mendapatkan nilai “80,2 (Predikat A)”. Pada komponen Perencanaan mendapatkan nilai 25,5 dari bobot 30 (85%), dan hanya terdapat satu catatan yaitu “Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan tepat waktu”. Namun demikian, masih ditemui beberapa kekurangan, seperti dokumen penjenjangan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan yang belum mengidentifikasi potensi crosscutting dengan pihak lain, belum terdapat keterangan Sumber Data pada IKU, belum terdapat bukti pemantauan pelaksanaan rencana aksi secara berkala, dan beberapa target kinerja tahun 2025 lebih rendah dari realisasi tahun 2024, seperti pada indikator “produksi daging kambing” dan “produksi telur”;
- b. Belum ada monitoring dan evaluasi internal terhadap tindak lanjut hasil evaluasi internal;
- c. Kebijakan pemberian reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal belum selesai disusun, sehingga upaya untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD belum optimal.

Rekomendasi :

- a. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
- b. Mendorong implementasi kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga akan mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Rencana Aksi Perbaikan Implementasi Sakip Kabupaten Batu Bara

1. PERENCANAAN KINERJA

Perbaikan pada aspek perencanaan kinerja diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan benar-benar mencerminkan kinerja yang berorientasi hasil, terukur, serta selaras antar level organisasi. Fokus utama tidak hanya pada penyusunan dokumen, tetapi pada kualitas substansi dan keterkaitan logis antar komponen kinerja.

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Output	Outcome	Penanggung Jawab	Waktu
1	Perbaikan sasaran & indikator berbasis outcome (SMART)	Reviu menyeluruh RPJMD, Renstra, PK dan IKU seluruh PD	Dokumen perencanaan hasil revisi	Indikator lebih tepat dan terukur	Bappeda, Bagian Organisasi	TW I–II 2026
2	Identifikasi crosscutting	Workshop dan pemetaan kinerja lintas PD	Dokumen peta crosscutting	Sinergi antar PD meningkat	Bappeda	TW II 2026
3	Penyusunan rencana aksi yang logis	Penyusunan Renaksi detail per indikator	Dokumen Renaksi lengkap	Ketercapaian kinerja lebih terarah	Seluruh PD	TW I 2026
4	Perbaikan cascading kinerja	Penyusunan pohon kinerja hingga level individu	Dokumen cascading kinerja	Kinerja terdistribusi jelas	Bagian Organisasi	TW II–III 2026
5	Perbaikan logical framework	Penyusunan framework tujuan-sasaran-indikator	Dokumen logframe	Keterkaitan kinerja lebih kuat	Bappeda	TW II 2026

2. PENGUKURAN KINERJA

Penguatan pengukuran kinerja difokuskan pada peningkatan kualitas indikator, sistem pengukuran berbasis teknologi, serta perubahan paradigma dari sekadar serapan anggaran menjadi pencapaian outcome.

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Output	Outcome	Penanggung Jawab	Waktu
1	Penetapan IKU yang tepat	Penyusunan kamus IKU lengkap	Dokumen IKU	Pengukuran lebih akurat	Bappeda	TW I 2026
2	Pengembangan aplikasi SAKIP	Pengembangan dan implementasi e-SAKIP/e-Monev	Sistem terbangun	Monitoring real time	Diskominfo, Bappeda	2026–2027
3	Pemanfaatan hasil pengukuran	Integrasi hasil kinerja dalam evaluasi PD	Laporan evaluasi kinerja	Keputusan berbasis data	Sekda, BKPSDM	TW III–IV
4	Pengukuran berjenjang	Penetapan mekanisme monitoring internal PD	SOP pengukuran	Akuntabilitas meningkat	Seluruh PD	2026
5	Fokus pada outcome	Reorientasi indikator ke outcome	Indikator outcome	Kinerja lebih berdampak	Bappeda	2026

3. PELAPORAN KINERJA

Perbaikan pelaporan kinerja diarahkan untuk meningkatkan kualitas analisis, transparansi, serta pemanfaatan laporan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Output	Outcome	Penanggung Jawab	Waktu
1	Transparansi laporan	Publikasi LKIP di website resmi	Laporan terpublikasi	Transparansi meningkat	Diskominfo & Bagian Organisasi	Tahunan
2	Peningkatan kualitas analisis	Penyusunan pedoman analisis LKIP	Pedoman LKIP	Analisis lebih tajam	Bagian Organisasi	TW I
3	Konsistensi data	Validasi dan verifikasi data kinerja	Data valid	Keandalan meningkat	Inspektorat	Berkala
4	Pemanfaatan laporan	Integrasi LKIP dalam perencanaan	Dokumen kebijakan	Perbaikan berkelanjutan	Bappeda	Tahunan

4. EVALUASI AKUNTABILITAS INTERNAL

Penguatan evaluasi internal difokuskan pada peningkatan kualitas penilaian, pengendalian tindak lanjut, serta penerapan sistem insentif berbasis kinerja.

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Output	Outcome	Penanggung Jawab	Waktu
1	Peningkatan kualitas evaluasi	Penyempurnaan instrumen evaluasi AKIP	Instrumen evaluasi	Evaluasi lebih objektif	Inspektorat	TW I
2	Monitoring tindak lanjut	Sistem tracking tindak lanjut rekomendasi	Dashboard monitoring	Perbaikan berkelanjutan	Inspektorat	2026
3	Reward & punishment	Penyusunan regulasi kinerja	Perbup/Keputusan	Motivasi meningkat	BKPSDM, Bagian Organisasi	TW II
4	Penguatan audit kinerja	Pelaksanaan audit berbasis risiko	Laporan audit	Pengendalian meningkat	Inspektorat	Tahunan

Rencana aksi ini menunjukkan bahwa permasalahan implementasi SAKIP di Kabupaten Batu Bara bukan hanya pada aspek administratif, tetapi pada kualitas sistem manajemen kinerja secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan perbaikan yang dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan sistemik dan terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Dengan pelaksanaan rencana aksi secara konsisten, diharapkan terjadi peningkatan signifikan pada nilai SAKIP, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Sasaran Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Persen	-	72,01		72,50	70,31	96,98

Peningkatan partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak hanya mencerminkan seberapa besar penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga menggambarkan tingkat kepercayaan diri masyarakat terhadap peluang kerja yang tersedia di daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara, TPAK menjadi indikator strategis karena menunjukkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Rendahnya partisipasi angkatan kerja tidak hanya berdampak pada menurunnya produktivitas daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, peningkatan TPAK tidak dapat dipandang sebagai isu ketenagakerjaan semata, melainkan sebagai bagian dari transformasi ekonomi daerah yang lebih luas.

Pada tahun 2025, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Batu Bara ditargetkan sebesar 72,50%, dengan realisasi sebesar **70,31%**, sehingga capaian kinerja mencapai **96,98%**. Meskipun capaian ini menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan terhadap target akhir RPJMD sebesar **81,25%**, yaitu sekitar **10,94 poin**.

Secara tren, TPAK Kabupaten Batu Bara mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

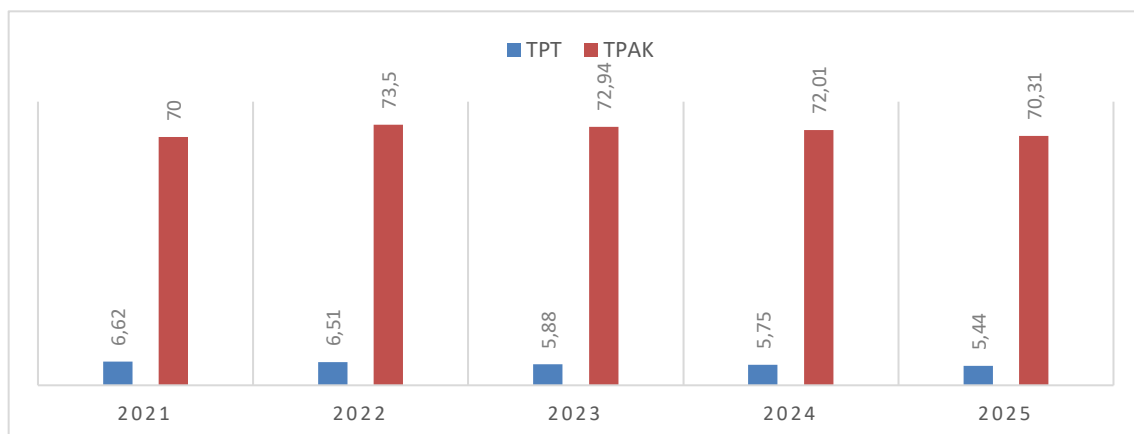
Tabel 3.16 Tren TPAK Kabupaten Batu Bara

Tahun	TPAK (%)	Perubahan (%)
2023	72,94	-
2024	72,01	-0,93
2025	70,31	-1,70

Table diatas, menunjukkan penurunan partisipasi angkatan kerja secara konsisten, dengan penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya pelemahan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

Sebagai perbandingan perkembangan TPAK dan TPT di Batu Bara dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:

Grafik 3.9. Perbandingan TPAK dan TPT Di Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2025



Grafik menunjukkan hubungan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Batu Bara

selama periode 2021–2025. Secara umum, TPAK cenderung mengalami penurunan, sementara TPT relatif stabil namun sedikit menurun di akhir periode. Pada tahun 2021–2023, TPT berada pada kisaran sekitar 6%, kemudian menurun menjadi sekitar **5,44%** pada tahun 2025. Di sisi lain, TPAK yang sebelumnya berada di atas 72% mengalami penurunan hingga **70,31%** pada tahun 2025.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak sepenuhnya disebabkan oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh menurunnya partisipasi masyarakat dalam angkatan kerja. Dengan kata lain, sebagian penduduk usia kerja memilih keluar dari pasar kerja (menjadi bukan angkatan kerja), seperti melanjutkan pendidikan, mengurus rumah tangga, atau tidak aktif mencari kerja.

Kondisi ini memperlihatkan adanya **trade-off semu**, di mana penurunan TPT tidak diikuti oleh peningkatan TPAK. Idealnya, kedua indikator ini bergerak berlawanan secara sehat: TPAK naik dan TPT turun. Namun yang terjadi di Kabupaten Batu Bara adalah TPAK turun bersamaan dengan TPT yang hanya sedikit menurun, sehingga menunjukkan bahwa basis tenaga kerja produktif belum optimal dimanfaatkan.

Jika dilihat lebih dalam, kondisi ini mengindikasikan:

- Belum optimalnya penciptaan lapangan kerja baru yang mampu menarik penduduk masuk ke pasar kerja
- Masih rendahnya daya tarik sektor formal
- Adanya kelompok usia kerja yang “pasif secara ekonomi”

Dengan demikian, grafik tersebut menegaskan bahwa tantangan utama Kabupaten Batu Bara bukan hanya pada penurunan pengangguran, tetapi lebih pada peningkatan partisipasi angkatan kerja secara aktif dan produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditopang oleh basis tenaga kerja yang lebih luas dan berkualitas.

Jika dilihat dari struktur ketenagakerjaan, kondisi tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.17 Struktur Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

Komponen	Jumlah
Angkatan Kerja	223.831
Bekerja	211.652

Pengangguran	12.179
Bukan Angkatan Kerja:	94.521
- Mengurus Rumah Tangga	63.254
- Sekolah	17.617
- Lainnya	13.650

Struktur ketenagakerjaan menunjukkan dominasi kelompok bukan angkatan kerja, khususnya yang mengurus rumah tangga. Kondisi ini menjadi faktor utama rendahnya TPAK di Kabupaten Batu Bara.

Jika dibandingkan dengan wilayah lain, posisi Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18 Perbandingan Regional

Wilayah	TPAK (%)	TPT (%)
Batu Bara	70,31	5,44
Sumatera Utara	72,29	5,32
Nasional	70,59	4,85

Kondisi ini menunjukkan bahwa TPAK Kabupaten Batu Bara masih berada di bawah provinsi dan relatif setara dengan nasional, namun memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Hal ini menegaskan bahwa tantangan ketenagakerjaan tidak hanya pada partisipasi, tetapi juga kualitas penyerapan tenaga kerja.

Secara keseluruhan, kondisi ini mengindikasikan adanya fenomena struktural dimana penyerapan tenaga kerja relatif tinggi, namun partisipasi angkatan kerja justru menurun. Dengan kata lain, sebagian penduduk usia kerja belum masuk ke dalam pasar kerja, sehingga menahan peningkatan angka pengangguran secara semu.

Dalam rangka meningkatkan TPAK, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan proses bisnis kebijakan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program ketenagakerjaan. Namun demikian, pendekatan yang digunakan masih perlu disempurnakan agar lebih fokus pada peningkatan partisipasi angkatan kerja, bukan hanya penyerapan tenaga kerja.

Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah telah mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan. Namun, identifikasi terhadap kelompok bukan angkatan kerja sebagai target utama masih belum optimal.

Pada tahap pelaksanaan, program yang dijalankan meliputi pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Program-program ini telah mampu menjaga stabilitas tenaga kerja, namun belum secara signifikan meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Pada tahap evaluasi, ditemukan bahwa keberhasilan program lebih banyak diukur dari penyerapan tenaga kerja, sementara indikator partisipasi belum menjadi fokus utama dalam evaluasi kinerja.

Keberhasilan utama terletak pada tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja yang mencapai 94,56%, yang menunjukkan bahwa pasar kerja masih mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia. Selain itu, stabilitas hubungan industrial juga turut menjaga tingkat pengangguran tetap terkendali.

Penurunan TPAK menunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat usia kerja secara luas. Kegagalan utama terletak pada belum optimalnya intervensi terhadap kelompok bukan angkatan kerja, yang justru menjadi faktor dominan dalam rendahnya TPAK.

Penggunaan sumber daya telah menghasilkan output yang baik, namun belum efisien dalam menghasilkan outcome peningkatan TPAK. Hal ini disebabkan oleh belum tepatnya sasaran program.

Program yang dilaksanakan telah mendukung penyerapan tenaga kerja, namun belum sepenuhnya mendukung peningkatan partisipasi:

- Pelatihan kerja → meningkatkan kompetensi
- Penempatan kerja → mengurangi pengangguran
- Hubungan industrial → menjaga stabilitas Namun

Dalam upaya meningkatkan TPAK, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menghadapi sejumlah hambatan struktural yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat. Permasalahan ini menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi angkatan kerja meskipun peluang kerja relatif tersedia.

Keberlanjutan peningkatan TPAK sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengubah pendekatan kebijakan dari yang bersifat pasif menjadi lebih proaktif. Tanpa intervensi yang terarah pada kelompok bukan angkatan kerja, peningkatan TPAK akan sulit dicapai secara signifikan.

Untuk menjawab tantangan yang ada, diperlukan langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan partisipasi masyarakat usia kerja secara aktif dalam kegiatan ekonomi.

Dalam rangka mencapai target RPJMD sebesar 81,25%, Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu menyusun langkah-langkah strategis yang terukur dan berkelanjutan, dengan fokus pada aktivasi tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja.

Tahun	Fokus	Aksi	Outcome
2026	Aktivasi	Intervensi non-aktif	TPAK naik
2027	Ekspansi	Lapangan kerja	Serapan naik
2028	Optimalisasi	Integrasi	Target tercapai

Secara keseluruhan, upaya Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dalam pasar kerja. Berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan mampu menjaga stabilitas penyerapan tenaga kerja serta menekan tingkat pengangguran, namun belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat usia kerja secara optimal.

Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pembangunan ketenagakerjaan ke depan tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada upaya mendorong kelompok bukan angkatan kerja untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menjadi penting agar potensi tenaga kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Capaian kinerja nyata dari sasaran Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 96,98% dengan predikat sangat tinggi, menunjukkan bahwa secara kinerja administratif dan pencapaian target tahunan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah berada pada jalur yang cukup baik. Namun demikian, capaian ini tetap

perlu dimaknai secara kritis dengan melihat tren penurunan TPAK yang terjadi, sehingga perbaikan kebijakan yang lebih tepat sasaran menjadi kebutuhan mendesak.

Dengan demikian, ke depan Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu melakukan penguatan strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui pendekatan yang lebih inklusif, adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, serta mampu mengoptimalkan potensi tenaga kerja yang selama ini belum terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi.

Sasaran Meningkatnya Kelestarian Budaya

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	-	-	-	50	50	100

Transformasi Pelestarian Budaya dan Pariwisata sebagai Penggerak Ekonomi Daerah Kabupaten Batu Bara

Kabupaten Batu Bara tidak hanya menyimpan kekayaan sumber daya alam dan potensi industri, tetapi juga memiliki warisan budaya dan lanskap alam yang menjadi fondasi penting dalam membangun identitas dan daya saing daerah. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pelestarian budaya tidak lagi dipandang sebagai aktivitas konservatif semata, melainkan sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Warisan budaya seperti Meriam Nenas Siam, Meriam Simpang Dolok, Meriam Bogak, serta Istana Niat Lima Laras merupakan representasi sejarah panjang dan identitas lokal masyarakat Batu Bara. Objek-objek ini tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya yang mampu menarik kunjungan wisatawan dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, keberadaan berbagai destinasi wisata alam seperti Pantai Bunga, Pantai Galuh, Pulau Salah Nama, Pulau Pandang, Pantai Pulau Bunga Laut Indah, Pantai Sejarah, Wisata Sawah Kuala Gunung, Pantai Alam Datuk,

Danau Laut Tador, dan Pantai Sudjono memperkaya struktur potensi pariwisata daerah dengan karakteristik pesisir, kepulauan, dan daratan yang unik.

Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan ekonomi daerah. Pengelolaan pariwisata masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu sistem pengembangan kawasan yang utuh. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya konektivitas antar destinasi, serta belum optimalnya promosi dan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor yang menghambat pemanfaatan potensi tersebut secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama Pemerintah Kabupaten Batu Bara bukan terletak pada ketersediaan potensi, melainkan pada kemampuan mengelola dan mengintegrasikan potensi tersebut menjadi nilai tambah ekonomi.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, integrasi antara pelestarian budaya dan pengembangan wisata alam merupakan strategi kunci dalam menciptakan sumber pertumbuhan baru. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang luas, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan sektor perdagangan, transportasi, dan jasa.

Ke depan, arah kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Batu Bara perlu ditransformasikan menuju pendekatan berbasis kawasan dan terintegrasi. Objek budaya harus diposisikan sebagai daya tarik utama (*core attraction*) yang diperkuat oleh wisata alam sebagai pendukung (*supporting attraction*).

Sasaran meningkatnya kelestarian budaya bertujuan untuk menjaga identitas dan jati diri daerah melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya serta warisan budaya tak benda. Pelestarian budaya tidak hanya memiliki nilai historis dan sosial, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, pelestarian budaya diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan daya tarik wisata berbasis budaya dan kearifan lokal;
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM berbasis budaya;
- c. Memperkuat kohesi sosial dan karakter masyarakat;
- d. Mendukung kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah.

Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mengukur aspek pelestarian, tetapi juga menjadi refleksi dari kemampuan daerah dalam mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pada tahun 2025, indikator Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan ditetapkan sebagai indikator baru dalam mengukur tingkat keberhasilan pelestarian budaya di Kabupaten Batu Bara. Oleh karena itu, pada tahun 2024 belum terdapat target maupun capaian yang dapat dijadikan pembandingan langsung.

Pada tahun 2025, target indikator ini ditetapkan sebesar **50%**, dan berhasil direalisasikan sebesar **50%**, sehingga capaian kinerja mencapai **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target pelestarian yang direncanakan pada tahun berjalan telah berhasil dilaksanakan secara optimal.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **61,25%**, capaian tahun 2025 masih memerlukan peningkatan sebesar **11,25%**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian tahunan telah optimal, upaya pelestarian budaya masih perlu diperluas baik dari sisi jumlah objek maupun kualitas pelestariannya.

Secara nasional, pengukuran indikator sejenis masih belum sepenuhnya terstandarisasi, sehingga perbandingan antar daerah masih terbatas. Namun demikian, beberapa daerah maju seperti Yogyakarta dan Bali telah menunjukkan bahwa pelestarian budaya yang terintegrasi dengan sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka mencapai sasaran pelestarian budaya, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan proses bisnis kebijakan yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah, yang meliputi:

- **Perencanaan**

Perencanaan dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi cagar budaya serta warisan budaya tak benda yang memiliki nilai strategis untuk dilestarikan dan dikembangkan.

- **Pengorganisasian**

Penguatan peran perangkat daerah terkait, khususnya dalam koordinasi antara sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

- **Pelaksanaan**

Pelaksanaan difokuskan pada kegiatan pelestarian, revitalisasi, promosi, serta pengembangan destinasi wisata budaya dan wisata alam.

- **Pengendalian dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dan keberlanjutan pelestarian budaya.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari beberapa faktor utama, antara lain:

- Adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal;
- Optimalisasi program pelestarian budaya dan pengembangan destinasi wisata;
- Mulai terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya.

Selain itu, keberadaan objek wisata budaya seperti **Meriam Nenas Siam, Meriam Simpang Dolok, Meriam Bogak, dan Istana Niat Lima Laras** menjadi daya tarik tersendiri dalam mendukung capaian indikator.

Meskipun capaian target tahunan telah terpenuhi, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain:

- Belum optimalnya integrasi antara pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi;
- Masih terbatasnya jumlah objek budaya yang terdokumentasi dan dilestarikan;
- Rendahnya pemanfaatan teknologi dan promosi digital.

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program pelestarian budaya relatif efisien, namun masih perlu ditingkatkan melalui:

- Integrasi program lintas sektor;
- Optimalisasi pemanfaatan anggaran;
- Pelibatan masyarakat dan sektor swasta.

Program yang menjadi motor penggerak meliputi:

1. **Program Pengembangan Kebudayaan**

Mendorong pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal.

2. **Program Pembinaan Sejarah**

Memperkuat pemahaman sejarah dan identitas daerah.

3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Fokus pada perlindungan dan revitalisasi objek budaya.

4. Program Pengelolaan Permuseuman

Mendukung edukasi dan promosi budaya.

5. Program Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

Mendorong partisipasi generasi muda dalam pelestarian budaya.

Program-program tersebut secara umum sudah tepat, namun masih perlu penguatan pada aspek integrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Beberapa hambatan utama yang dihadapi antara lain:

1. Data cagar budaya belum terintegrasi secara menyeluruh
2. Keterbatasan anggaran pelestarian
3. Infrastruktur pendukung pariwisata belum optimal
4. Promosi wisata budaya masih terbatas
5. Keterlibatan masyarakat belum maksimal

Keberlanjutan pelestarian budaya di Kabupaten Batu Bara cukup kuat karena didukung oleh:

1. Kekayaan objek budaya dan sejarah;
2. Potensi wisata alam seperti Pantai Bunga, Pantai Galuh, Pulau Pandang, dan Danau Laut Tador;
3. Komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan budaya.

Namun demikian, diperlukan penguatan integrasi kebijakan agar pelestarian budaya benar-benar memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Untuk meningkatkan capaian indikator ke depan, diperlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Integrasi pelestarian budaya dengan pengembangan pariwisata
2. Digitalisasi data dan promosi budaya
3. Penguatan peran masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif
4. Pengembangan kawasan wisata terpadu
5. Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung

Secara keseluruhan, capaian indikator Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang optimal dengan capaian sebesar 100%. Namun demikian, capaian

tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan dalam mendorong pelestarian budaya sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu melakukan transformasi kebijakan dari pendekatan pelestarian administratif menuju pelestarian yang berbasis nilai ekonomi dan keberlanjutan. Integrasi antara budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif menjadi kunci dalam meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah.

Dengan langkah strategis yang terarah dan konsisten, pelestarian budaya diharapkan tidak hanya menjaga warisan masa lalu, tetapi juga menjadi fondasi masa depan pembangunan Kabupaten Batu Bara yang berdaya saing, berkarakter, dan berkelanjutan.

Sasaran Meningkatnya inovasi daerah

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	55,0 (Inovatif)	47,01 (Inovatif)	85,47%	47,26	57,64	121,96%

Indeks Inovasi Daerah digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tujuan utama indikator ini adalah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berbasis solusi terhadap permasalahan daerah.

Manfaat strategis dari peningkatan inovasi daerah antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
2. Mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan
3. Mendorong daya saing daerah dalam menarik investasi
4. Menghasilkan nilai tambah ekonomi yang berdampak pada peningkatan PDRB

Dalam konteks ekonomi, inovasi berperan sebagai katalis pertumbuhan, terutama dalam meningkatkan produktivitas sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, dan UMKM.

Pencapaian kinerja pada indikator Indeks Inovasi Daerah diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{Realisasi Indeks Inovasi Daerah}}{\text{Target Indeks Inovasi Daerah}} \times 100\% \\
&= \frac{47,26}{57,64} \times 100\% \\
&= 121,96\%
\end{aligned}$$

Pada tahun 2024, Indeks Inovasi Daerah ditargetkan sebesar **55**, dengan realisasi sebesar **47,01**, sehingga capaian kinerja sebesar **85,47%**. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut inovasi daerah belum berkembang secara optimal.

Pada tahun 2025, target ditetapkan lebih realistis sebesar **47,26**, dan realisasi berhasil melampaui target dengan capaian sebesar **57,64**, sehingga tingkat capaian mencapai **121,96%**. Capaian ini menunjukkan adanya akselerasi yang signifikan dalam pengembangan inovasi daerah.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **60**, capaian tahun 2025 telah mendekati target dengan selisih hanya **2,36 poin**, yang menunjukkan bahwa kinerja inovasi daerah berada pada jalur yang tepat.

Secara komparatif, capaian Kabupaten Batu Bara tahun 2025 sebesar **57,64** berada di atas rata-rata nasional (**49,43**), namun masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Utara (**65,71**). Hal ini menunjukkan bahwa secara nasional Batu Bara sudah kompetitif, namun masih memerlukan penguatan untuk mengejar daerah unggul di tingkat provinsi.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui:

- a. Peningkatan pelayanan publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan daya saing daerah.

Pengukurannya indeks inovasi daerah mengacu pada 36 indikator. Jumlah ini terbagi ke dalam dua aspek, yaitu 16 indikator merujuk pada satuan pemerintah daerah, serta 20 indikator satuan inovasi. Indikator satuan pemerintah daerah bersifat umum, yaitu berisi data visi misi, kelembagaan, jumlah inovasi dan sebagainya. Sedangkan indikator satuan inovasi, lebih mengarah pada pengukuran

kualitas serta dampak inovasi yang dilakukan daerah, seperti adanya payung hukum, agenda bimbingan teknis, informasi mengenai layanan, jajak pendapat masyarakat, dan beberapa data lainnya.

Pada tahun 2024, jumlah inovasi yang memiliki bobot kematangan tinggi hanya 9 (9) inovasi yang diikutsertakan dalam Penghargaan Pemerintah Terinovatif (Innovative Government Award/IGA) Tahun 2024 karena memiliki bobot kematangan Inovasi yang tinggi dan mendongkrak kenaikan nilai IID Kabupaten Batu Bara. Berikut jenis inovasi dan manfaatnya:

Tabel. 3.13.
Jenis-Jenis Inovasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

Perangkat Daerah	Inovasi
RSUD H. OK. Arya Zulkarnain	Poin Datuk Rajo
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PKH Plus
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Catatan Pengantin (DUKCATIN)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mall Pelayanan Publik (MPP)
Dinas Perpustakaan	Batu Bara Bahagia Membaca
Dinas Pertanian dan Perkebunan	Perbanyak Trichiderma pada Kompos
Dinas Pendidikan	1. Sabun Padat Ecoenzym 2. Minuman Lemon Grees Kalamansi 3. Aquaponik 4. Kurimolang (Kukis Mocav Kembang Telang) 5. Teh Daun Mulberry dan Kelor
Badan Pendapatan Daerah	E-PBB Desa
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	1. OJS (Open Jurnal Sistem) 2. SIBAHAGIA (Sistem Informasi Batu Bara Harus Giat Inovasi)
Sekretariat Daerah	Berlayar (Bupati Sinergi Melayani Masyarakat)
Kecamatan Sei Balai	MONKEDES (Monitoring Kecamatan Kedes)
Kecamatan Nibung Hangus	Beras Tumpang
Kecamatan Tanjung Tiram	Bank Sampah Bobah (BOGAK BAHAGIA)
Kecamatan Datuk Tanah Datar	PEGANG MEWA (Pelayanan Gampang Melalui WA)
Kecamatan Datuk Lima Puluh	Pelayanan Konsultasi Ahli Waris
Kecamatan Lima Puluh Pesisir	Jumat Religi, Bersih dan Sehat
Kecamatan Laut Tador	Wisata Danau Laut Tador

Dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Batu Bara masih menghadapi beberapa hambatan yang mempengaruhi laju dan kualitas inovasi yang dihasilkan. Berdasarkan data yang ada, terdapat dua faktor utama yang menghambat pengembangan dan pencapaian inovasi daerah yang optimal, yaitu:

1. Belum Maksimalnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Menciptakan dan Mengembangkan Inovasi Sesuai dengan Tupoksi Masing-masing

Salah satu faktor penghambat yang cukup signifikan dalam pencapaian

Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Batu Bara adalah belum maksimalnya partisipasi perangkat daerah dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi. Setiap perangkat daerah diharapkan untuk dapat mengembangkan inovasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Namun, kenyataannya banyak perangkat daerah yang belum sepenuhnya aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan inovasi yang memiliki dampak nyata terhadap pelayanan publik, peningkatan daya saing, atau pemberdayaan masyarakat.

Penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang pentingnya inovasi di tingkat pemerintah daerah. Banyak perangkat daerah yang terfokus pada pekerjaan rutin dan administratif tanpa memberi perhatian lebih pada penciptaan inovasi yang bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah juga menjadi hambatan besar. Inovasi yang bersifat lintas sektor sering kali terhambat oleh terbatasnya komunikasi dan kolaborasi antar instansi yang seharusnya saling mendukung dalam pengembangan solusi yang inovatif. Sebagai contoh, pengembangan sistem informasi pelayanan publik yang efektif bisa lebih optimal jika ada sinergi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan, namun kenyataannya sering kali pengembangan tersebut tidak berjalan optimal karena kurangnya koordinasi.

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), Keterbatasan Dana, dan Sarana Prasarana yang Belum Optimal

Faktor lain yang menjadi hambatan utama dalam pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Batu Bara adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang cukup untuk merancang dan mengimplementasikan inovasi. Pengembangan inovasi membutuhkan SDM yang kreatif, memiliki kemampuan teknis, dan mampu mengelola berbagai perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, SDM di tingkat daerah sering kali belum memiliki pelatihan yang memadai, atau kurang terpapar dengan pengetahuan terbaru yang dibutuhkan dalam merancang kebijakan dan program inovatif. Kurangnya pelatihan khusus terkait inovasi atau pengelolaan teknologi baru dapat membatasi kemampuan perangkat daerah untuk menciptakan solusi

yang efisien dan efektif.

Selain itu, keterbatasan dana menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Inovasi daerah sering kali memerlukan pendanaan yang tidak sedikit untuk pengembangan ide, implementasi proyek, dan evaluasi hasilnya. Anggaran yang terbatas sering kali memaksa pemerintah daerah untuk fokus pada program yang bersifat mendesak dan rutin, sementara inovasi yang memerlukan sumber daya lebih besar terabaikan. Keterbatasan dana ini sering kali menyebabkan terbatasnya ruang untuk eksperimen dan pengembangan solusi baru yang lebih efisien.

Tak kalah pentingnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan inovasi. Misalnya, pengembangan teknologi digital dalam pelayanan publik memerlukan infrastruktur yang memadai, baik dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, maupun jaringan komunikasi. Namun, di beberapa daerah di Kabupaten Batu Bara, sarana dan prasarana yang ada masih terbatas dan belum memadai untuk mendukung pelaksanaan inovasi yang lebih luas. Tanpa adanya dukungan infrastruktur yang kuat, maka pelaksanaan inovasi akan terhambat, meskipun terdapat ide-ide inovatif yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan dua faktor penghambat utama yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu belum maksimalnya partisipasi perangkat daerah dalam menciptakan inovasi sesuai dengan tupoksi dan keterbatasan sumber daya manusia, dana, serta sarana prasarana yang belum optimal, berikut adalah beberapa solusi alternatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut:

- 1. Sosialisasi dan Bimtek kepada Penanggung Jawab/PIC Inovasi:** Menyelenggarakan pelatihan atau lokakarya yang fokus pada pengembangan ide inovasi dan penerapannya dalam sektor masing-masing, baik itu pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, atau sektor lainnya. Bimtek ini dapat diselenggarakan secara rutin dengan melibatkan pakar di bidangnya agar setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya inovasi.
- 2. Penyediaan Anggaran yang Cukup untuk Pengembangan Inovasi:** Pemda perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan inovasi. Dana yang cukup memungkinkan perangkat daerah untuk merancang dan mengimplementasikan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan

publik dan menciptakan perubahan positif di masyarakat.

3. **Meningkatkan Kapasitas SDM melalui Pelatihan Berkala:** Mengadakan **coaching clinic inovasi** yang mengedukasi para pegawai pemerintah di tingkat daerah tentang cara-cara merancang, mengimplementasikan, dan mengukur keberhasilan inovasi. Coaching clinic ini dapat difokuskan pada praktik terbaik dalam mengelola perubahan, inovasi berbasis teknologi, dan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan cara yang lebih efisien.
4. **Optimalisasi Anggaran:** Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu memprioritaskan anggaran untuk pengembangan inovasi daerah, termasuk mendukung penelitian dan pengembangan teknologi, serta membiayai program-program yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan sarana pendukung inovasi, seperti jaringan internet yang lebih stabil atau perangkat keras yang lebih canggih.
5. **Lomba Inovasi Daerah:** Mengadakan kompetisi tahunan yang mengundang partisipasi aktif dari semua perangkat daerah untuk mengembangkan solusi inovatif dalam sektor-sektor tertentu, seperti pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, pendidikan, atau sektor lain yang menjadi prioritas. Perlombaan ini dapat menjadi ajang untuk menilai kualitas inovasi yang ada, serta memberikan pengakuan terhadap perangkat daerah yang memiliki prestasi terbaik dalam menerapkan inovasi.
6. **Membentuk Tim Khusus Inovasi:** Pemerintah Kabupaten Batu Bara dapat membentuk tim khusus yang bertugas untuk memfasilitasi kolaborasi antar perangkat daerah dalam mengembangkan dan melaksanakan inovasi. Tim ini akan berperan dalam menghubungkan berbagai sektor yang berbeda untuk menciptakan solusi yang lebih terintegrasi dan bermanfaat.
7. **Penyusunan Agenda Kolaboratif:** Menyusun agenda bersama yang melibatkan berbagai perangkat daerah untuk merancang dan menjalankan inovasi, dengan fokus pada pengembangan pelayanan publik atau peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Capaian kinerja nyata dari sasaran Meningkatnya Inovasi Daerah sebesar 121,96% dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran Menurunnya Kemiskinan

Sasaran Menurunnya Kemiskinan diukur dengan Angka kemiskinan BPS

yang menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Berikut penjelasan ketercapaian sasaran yang diukur dengan indikator persentase kemiskinan:

Tingkat Kemiskinan

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kemiskinan	Persen	11,05	10,94	99,00%	10,68	10,10	105,35%

Capaian indikator **Tingkat kemiskinan** sebesar 105,35% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Bupati sebesar 10,68 dan realisasi kinerja nyata sebesar 10,10. Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara dari 10,94% pada 2024 menjadi 10,10% pada 2025 menunjukkan adanya kemajuan, meskipun belum mencapai target yang lebih rendah. Penurunan sebesar 0,84% mencerminkan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan, meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi untuk mencapai penurunan yang lebih signifikan. Dengan kebijakan yang lebih terarah, peningkatan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi yang lebih merata, Kabupaten Batu Bara dapat terus menurunkan angka kemiskinan menuju kesejahteraan yang lebih baik.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 9,99%, capaian tahun 2025 sebesar 10,10% menunjukkan bahwa Kabupaten Batu Bara semakin mendekati target jangka menengah, dengan selisih hanya 0,11 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan telah berada pada jalur yang tepat (on-track).

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara lebih tinggi **1,91%** dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang tercatat pada kisaran **9,03%**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan nasional telah mengalami

penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Batu Bara masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Faktor-faktor seperti terbatasnya akses ke layanan dasar, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan cuaca menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan di daerah ini.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian nasional (8,25%), Provinsi Sumatera Utara (7,24%), dan Kota Medan (7,25%), tingkat kemiskinan Kabupaten Batu Bara masih relatif lebih tinggi. Dengan realisasi sebesar 10,10% pada tahun 2025, terdapat selisih sebesar **1,85 poin** dibandingkan nasional, **2,86 poin** dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, dan **2,85 poin** dibandingkan Kota Medan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan signifikan secara internal, daya saing kesejahteraan daerah masih perlu ditingkatkan melalui penguatan intervensi yang lebih terarah, khususnya pada kelompok masyarakat miskin ekstrem dan rentan.

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara tak lepas dari masalah kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batas nilai rupiah pengeluaran konsumsi (makanan dan non makanan) perkapita perbulan. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan diukur dengan angka yang ditetapkan BPS, Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, untuk Tahun 2025, garis kemiskinan Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 613.493/kapita/bulan. Nilai tersebut kemudian dijadikan *baseline* untuk menentukan persentase penduduk miskin, dimana semua individu yang memiliki tingkat konsumsi dibawah nilai tersebut digolongkan sebagai penduduk miskin.

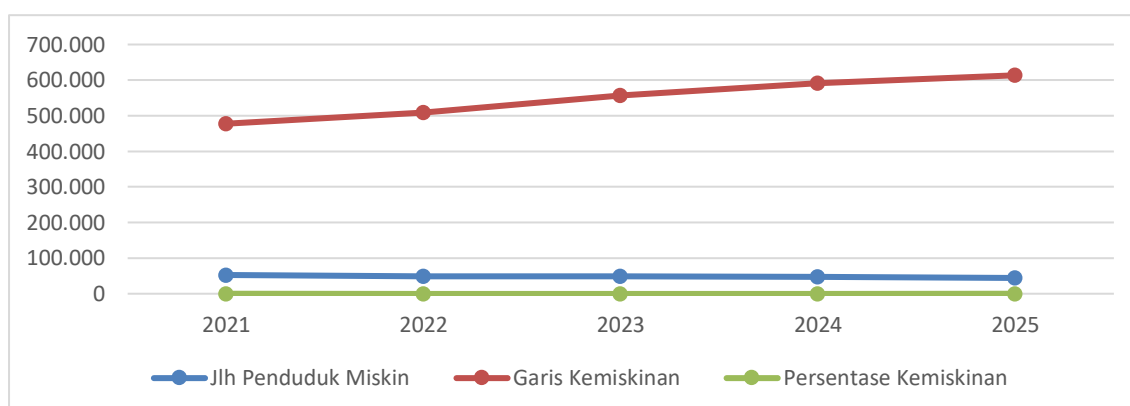
Berdasarkan tolok ukur tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batu Bara tahun 2025 diperkirakan sebanyak 44.280 Jiwa mengalami penurunan sebesar 3.380 Jiwa jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 47.660 jiwa. Jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2025, yang oleh BPS diestimasi sekitar 479.667 Jiwa, maka diketahui bahwa tingkat kemiskinannya adalah 10,10. Berikut disajikan angka kemiskinan Kabupaten Batu Bara selama lima tahun, sebagai berikut:

Tabel 3.20.
Persentase Tingkat Kemiskinan 2021-2025

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase
2021	52.590	12,38
2022	49.390	11,53
2023	49.180	11,38
2024	47.660	10,94
2025	479.667	10,10

Berdasarkan data tabel diatas, persentase kemiskinan terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 12,38%, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 52,590 jiwa. Berikut ditampilkan grafik kemiskinan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2025.

Grafik 3.4.
Kemiskinan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2025



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat persentase kemiskinan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, begitu juga dengan jumlah penduduk miskin, hanya saja garis kemiskinan terus naik sepanjang tahun.

Secara umum, faktor yang mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2025.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.

3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
4. Monitoring pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi kinerja, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
5. Telah menyusun rencana aksi pemberantasan kemiskinan.

Intervensi yang dilakukan menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah sudah **on-track**, terutama dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan mendorong graduasi penerima manfaat.

Selain itu terdapat juga faktor kendala yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi (5,44), sehingga berakibat langsung pada peningkatan kemiskinan;
2. Secara nasional harga eceran beberapa komoditas lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitar, hingga mempengaruhi garis kemiskinan;
3. Masih Banyaknya ditemukan perkawinan pada usia dini.
4. Pola distribusi yang kurang tepat, misalnya pada bahan pangan minyak goreng, di Batu Bara terdapat industri pengolahan minyak goreng, namun distributornya diberada di kabupaten lain. Hal ini berdampak pada transportasi distribusi. Begitu juga terjadi pada beberapa bahan pangan pertanian, dimana para penampung (agen) tidak memasarkan hasil pertanian di Batu Bara tetapi mengirim/menjualnya ke provinsi atau kota lain.
5. Ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial
6. Transformasi dari bantuan konsumtif ke produktif belum optimal.

Sebagai solusi alternatif yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

1. Memperbaharui data penduduk miskin dan rentan miskin yang layak mendapatkan bantuan sosial, sehingga target penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Non Tunai yang dianggarkan pemerintah selama pandemi tepat sasaran.
2. Meningkatkan anggaran Bantuan Sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk miskin.
3. Program pemberdayaan diperkuat.

4. Kolaborasi pusat-daerah dijaga.

Dalam rangka mencapai sasaran menurunkan angka kemiskinan ini, terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang saling terkait, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara (Penanganan Kerawanan Pangan), Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara (Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan), Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Batu Bara (Pengembangan UMKM), Dinas Pendidikan (Jaminan Pendidikan), dan Dinas Kesehatan (Jaminan Kesehatan), Dinas Perkim dengan bantuan rumah tidak layak huni.

Selain itu terdapat Perangkat daerah yang berfungsi sebagai pendukung seperti Dinas Sosial dan Bapelitbangda sebagai penyedia data.

Kinerja penanganan kemiskinan Kabupaten Batu Bara menunjukkan tren yang sangat positif. Penurunan angka kemiskinan dari 10,94% menjadi 10,10% serta capaian kinerja yang melampaui target (105,35%) menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah telah berjalan efektif dan berada pada jalur yang tepat.

Namun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam mengejar ketertinggalan dari rata-rata nasional dan memastikan keberlanjutan program melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, transformasi kebijakan dari bantuan sosial menuju peningkatan kemandirian masyarakat menjadi kunci utama dalam mencapai target RPJMD sebesar 9,99% secara berkelanjutan.

Capaian kinerja nyata dari sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan sebesar 105,35% dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Desa Membangun	Indeks	-	-	-	72,91	72,91	100%

Pada tahun 2025, realisasi indikator **Indeks Desa** mencapai **72,91**, setara dengan target yang telah ditetapkan yaitu **72,91**, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Secara kuantitatif, capaian ini menunjukkan kinerja yang memenuhi target (**on target performance**). Namun demikian, dalam perspektif evaluatif, capaian tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dari sisi progres terhadap target jangka menengah. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 81, maka posisi capaian saat ini baru mencapai **90,01%**, yang berarti masih terdapat *gap kinerja* sebesar **9,99%** yang harus dikejar dalam periode perencanaan tersisa.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi capaian Indeks Desa, berikut disajikan distribusi status desa berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025:

Tabel 3.21.

Status Desa Berdasarkan Hasil Pengukuran Tahun 2025

No.	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	LAYANAN DASAR	SOSIAL	EKONOMI	LINGKUNGAN	AKSESIBILITAS	TATA KELOLA PEMERINTAH	SKOR	STATUS INDEKS DESA
1	DATUK LIMA PULUH	1219102001	PERKEBUNAN TANAH ITAM ULU	147	79	115	68	45	59	80,79	MANDIRI
1	DATUK LIMA PULUH	1219102002	EMPAT NEGERI	140	50	129	84	48	72	82,36	MANDIRI
2	DATUK LIMA PULUH	1219102006	PULAU SEJUK	131	61	148	69	49	64	82,20	MANDIRI
3	DATUK LIMA PULUH	1219102007	SIMPANG DOLOK	139	72	129	84	48	63	84,25	MANDIRI
4	DATUK LIMA PULUH	1219102008	AIR HITAM	151	69	111	74	49	63	81,42	MANDIRI
5	DATUK LIMA PULUH	1219102009	KWALA GUNUNG	137	74	130	78	49	40	80,00	MANDIRI
6	DATUK LIMA PULUH	1219102010	CAHAYA PARDOMUAN	148	82	110	82	49	58	83,31	MANDIRI
7	LAUT TADOR	1219082002	LAUTTADOR	139	69	108	74	49	71	80,31	MANDIRI
8	LAUT TADOR	1219082003	PELANGGIRAN LAUT TADOR	145	77	115	74	47	78	84,41	MANDIRI
9	LAUT TADOR	1219082008	MEKAR SARI	144	67	115	65	49	71	80,47	MANDIRI
10	LIMA PULUH	1219042011	MANGKAI BARU	143	75	120	62	49	67	81,26	MANDIRI

11	LIMA PULUH	1219042016	ANTARA	155	76	132	65	40	48	81,26	MANDIRI
12	LIMA PULUH	1219042017	PERKEBUNAN LIMA PULUH	139	70	142	54	46	66	81,42	MANDIRI
13	LIMA PULUH	1219042025	SIMPANG GAMBUS	138	75	112	76	48	63	80,63	MANDIRI
14	LIMA PULUH	1219042027	SUMBER PADI	147	79	142	72	49	70	88,03	MANDIRI
15	MEDANG DERAS	1219012005	LALANG	147	70	130	58	48	58	80,47	MANDIRI
16	SEI SUKA	1219022007	SEI SUKA DERAS	140	67	124	58	49	72	80,31	MANDIRI
17	SEI SUKA	1219022008	SIMODONG	141	75	121	62	46	71	81,26	MANDIRI
18	SEI SUKA	1219022009	PEMATANG JERING	144	76	134	68	47	65	84,09	MANDIRI
19	SEI SUKA	1219022011	KUALA INDAH	132	57	129	74	49	73	80,94	MANDIRI
20	SEI SUKA	1219022012	KUALA TANJUNG	155	60	126	74	49	64	83,15	MANDIRI
21	SEI SUKA	1219022018	TANJUNG GADING	149	80	134	74	49	70	87,56	MANDIRI
22	SEI SUKA	1219022019	SIMPANG KOPI	158	78	143	78	49	67	90,24	MANDIRI
23	SEI SUKA	1219022020	BROHOL	141	77	141	72	47	74	86,93	MANDIRI
24	TANJUNG TIRAM	1219062002	GUNTUNG	148	73	136	80	43	59	84,88	MANDIRI
25	TANJUNG TIRAM	1219062005	BOGAK	145	68	117	82	46	66	82,52	MANDIRI
26	TANJUNG TIRAM	1219062019	KAMPUNG LALANG	143	74	130	56	49	54	79,69	MANDIRI
27	AIR PUTIH	1219032004	SUKARAJA	147	81	81	82	49	66	79,69	MANDIRI
28	AIR PUTIH	1219032014	TANAH RENDAH	139	59	138	72	40	70	81,57	MANDIRI
29	LIMA PULUH PESISIR	1219092002	PERUPUK	140	69	127	72	49	62	81,73	MANDIRI
30	LIMA PULUH PESISIR	1219092003	GUNTUNG	139	73	121	64	48	62	79,84	MANDIRI
31	SEI BALAI	1219072002	SEI BALAI	126	71	140	68	44	69	81,57	MANDIRI
32	SEI BALAI	1219072008	SEI BEJANGKAR	145	52	130	78	49	53	79,84	MANDIRI
33	SEI BALAI	1219072017	SUKOREJO	150	70	140	75	45	54	84,09	MANDIRI
34	DATUK TANAH DATAR	1219112004	BINJAI BARU	136	79	137	56	49	60	81,42	MANDIRI
35	DATUK TANAH DATAR	1219112009	PETATAL	169	85	160	86	49	73	97,95	MANDIRI

Dengan demikian, meskipun capaian tahunan telah optimal, laju peningkatan Indeks Desa perlu dipercepat (**accelerated improvement**) agar tidak terjadi stagnasi dan risiko tidak tercapainya target RPJMD.

Capaian kinerja yang sesuai target mencerminkan bahwa intervensi kebijakan dan program yang dilaksanakan telah berjalan cukup efektif, khususnya dalam aspek koordinasi dan implementasi di lapangan. Faktor-faktor utama yang berkontribusi antara lain:

1. Koordinasi Vertikal yang Fungsional

Hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa menunjukkan pola koordinasi yang semakin sistematis. Fungsi pembinaan dan

pengawasan berjalan efektif melalui mekanisme monitoring rutin dan fasilitasi penyelesaian permasalahan di tingkat desa.

2. **Konsistensi Perencanaan dan Implementasi Program**

Keselarasan antara dokumen perencanaan daerah dan desa menunjukkan adanya *policy alignment*, sehingga intervensi yang dilakukan bersifat langsung terhadap indikator kinerja.

3. **Efektivitas Pemanfaatan Sumber Daya**

Alokasi Dana Desa dan dukungan program daerah relatif mampu mendorong peningkatan indikator, khususnya pada dimensi pelayanan dasar dan infrastruktur desa.

4. **Peran Pendampingan yang Adaptif**

Pendamping desa dan perangkat daerah teknis berperan aktif dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar dan indikator yang ditetapkan.

Meskipun capaian mencapai 100%, terdapat beberapa isu strategis yang berpotensi menghambat peningkatan kinerja di masa mendatang:

1. Fenomena “Cukup Target” (Performance Plateau)

Capaian yang tepat pada target mengindikasikan adanya kecenderungan penetapan target yang konservatif atau belum sepenuhnya berbasis pada potensi riil peningkatan kinerja.

2. **Disparitas Antar Desa**

Ketimpangan capaian antar desa masih cukup signifikan, sehingga peningkatan indeks secara agregat menjadi kurang optimal.

3. **Kapasitas Kelembagaan Desa yang Variatif**

Keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam aspek manajerial dan teknis menyebabkan kualitas implementasi program belum merata.

4. **Ketergantungan pada Intervensi Anggaran**

Peningkatan kinerja masih didominasi oleh pendekatan berbasis anggaran (*input-driven*), belum sepenuhnya berbasis inovasi dan pemberdayaan masyarakat (*outcome-driven*).

5. **Keterbatasan Sistem Data Kinerja**

Belum optimalnya integrasi dan kualitas data desa menyebabkan proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya berbasis bukti (*evidence-based*).

Untuk mendorong peningkatan kinerja yang lebih progresif dan berkelanjutan, direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rekalibrasi Target Kinerja

Menyusun target yang lebih progresif dan berbasis tren capaian serta potensi riil desa, sehingga mendorong peningkatan kinerja yang lebih signifikan.

2. Pendekatan Intervensi Diferensial

Mengelompokkan desa berdasarkan tingkat capaian indeks dan memberikan intervensi yang spesifik (targeted policy), terutama bagi desa dengan capaian rendah.

3. Penguatan Kapasitas Berbasis Kompetensi

Mengembangkan program peningkatan kapasitas aparatur desa yang lebih aplikatif dan berbasis kebutuhan riil (problem-based capacity building).

4. Transformasi dari Input ke Outcome

Mengarahkan kebijakan dari sekadar penyerapan anggaran menuju pencapaian dampak nyata, termasuk melalui inovasi desa dan pemberdayaan ekonomi lokal.

5. Pengembangan Sistem Data Terintegrasi

Membangun dashboard kinerja desa yang terintegrasi sebagai alat monitoring dan evaluasi berbasis data secara real-time.

Keterkaitan Program dengan Peningkatan Indeks Desa

Secara konseptual, **Indeks Desa** (umumnya merujuk pada IDM) dibentuk oleh tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ini, keenam program yang dilaksanakan Pemerintah Daerah memiliki keterkaitan yang **saling menguatkan (interconnected)** dalam mendorong peningkatan skor pada dimensi sosial dan ekonomi.

Skema kebijakan yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Batu Bara berupa pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Program ini berkontribusi langsung terhadap **Dimensi Sosial**, melalui:

- Penguatan peran **RT/RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna** dalam pelayanan sosial dasar (kesehatan, pendidikan, ketertiban sosial).

- Meningkatkan modal sosial (social capital) berupa gotong royong, partisipasi, dan solidaritas masyarakat.
- Penguatan lembaga adat juga menjaga stabilitas sosial dan kearifan lokal.

Dampak terhadap Indeks Desa:

Meningkatnya kualitas layanan sosial dan kohesi masyarakat akan mendorong peningkatan indikator seperti akses pelayanan dasar, partisipasi masyarakat, dan ketahanan sosial.

2. Program Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Program ini berperan dalam memperkuat fungsi **check and balance** di tingkat desa:

- Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.
- Memastikan kebijakan desa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dampak terhadap Indeks Desa:

Tata kelola yang baik (*good governance*) akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas program, yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan sosial dan pembangunan ekonomi.

3. Program Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

Program ini mendukung aspek **akuntabilitas dan transparansi**, melalui:

- Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan desa.
- Penyediaan data yang lebih valid sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Dampak terhadap Indeks Desa:

Data yang akurat memungkinkan perencanaan yang lebih tepat sasaran, sehingga intervensi pembangunan sosial dan ekonomi menjadi lebih efektif.

4. Program Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa

Program ini menjadi fondasi bagi seluruh proses pembangunan desa:

- Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
- Mendorong integrasi antara RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

Dampak terhadap Indeks Desa:

Manajemen yang baik memastikan program sosial dan ekonomi berjalan optimal dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan skor indeks secara sistematis.

5. Program Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Program ini memiliki keterkaitan langsung dengan **Dimensi Ekonomi**, melalui:

- Optimalisasi pemanfaatan aset desa (tanah kas desa, bangunan, dll.) sebagai sumber pendapatan.
- Mendorong produktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

Dampak terhadap Indeks Desa:

Peningkatan pendapatan desa dan aktivitas ekonomi akan meningkatkan indikator ekonomi seperti ketahanan ekonomi dan diversifikasi usaha masyarakat.

6. Program Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Kerja Sama Antar Desa

Program ini merupakan **pengungkit utama Dimensi Ekonomi**, melalui:

- Pengembangan unit usaha produktif desa.
- Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- Penguatan kerja sama antar desa untuk skala ekonomi yang lebih besar.

Dampak terhadap Indeks Desa:

Meningkatnya aktivitas ekonomi lokal akan berdampak signifikan terhadap indikator kemandirian ekonomi desa.

Keenam program tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu ekosistem pembangunan desa:

- a. **Dimensi Sosial diperkuat** melalui kelembagaan masyarakat yang aktif, partisipatif, dan inklusif.
- b. **Dimensi Ekonomi didorong** melalui optimalisasi aset dan pengembangan usaha desa.
- c. **Tata kelola pemerintahan menjadi enabler**, yang memastikan seluruh intervensi berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Perubahan status desa dari *Berkembang* menjadi *Maju* mensyaratkan peningkatan signifikan pada indikator sosial dan ekonomi secara bersamaan. Keenam program ini mampu mendorong transformasi tersebut karena:

1. **Mengatasi Akar Permasalahan (Root Cause)**
Desa berkembang umumnya memiliki kelemahan pada kapasitas kelembagaan dan ekonomi. Program ini secara langsung menasar dua aspek tersebut.
2. **Menciptakan Efek Multiplikasi (Multiplier Effect)**

- Penguatan kelembagaan → peningkatan partisipasi → program lebih tepat sasaran
- BUM Desa berkembang → pendapatan meningkat → kesejahteraan naik
- Tata kelola baik → kepercayaan publik meningkat → kolaborasi menguat

3. Mendorong Kemandirian Desa (Self-Sustaining Growth)

Tidak hanya bergantung pada dana transfer, tetapi mampu menggerakkan potensi lokal secara mandiri.

4. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Secara Bersamaan

Desa tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga memiliki kohesi sosial yang kuat—ini merupakan karakter utama desa berstatus *Maju*.

Dengan demikian, implementasi program-program tersebut secara konsisten dan terintegrasi terbukti memiliki **daya ungkit tinggi (high leverage)** terhadap peningkatan Indeks Desa. Ke depan, tantangan utama bukan hanya mempertahankan capaian, tetapi memastikan bahwa intervensi yang dilakukan mampu menghasilkan **lompatan kinerja (performance leap)** guna mempercepat transformasi status desa dari *Berkembang* menjadi *Maju* secara berkelanjutan.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	-	-	-	61,00	61,90	101,48

Indikator kinerja sasaran ini diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (**iBangga**), yaitu indikator komposit yang menggambarkan kualitas keluarga berdasarkan dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Indikator ini bersifat lintas sektor (*cross cutting issue*) dan mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia berbasis keluarga.

Pada tahun 2025, target Indeks Pembangunan Keluarga ditetapkan sebesar **61,00**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **61,90**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **101,48%**. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan berhasil dicapai bahkan melampaui ekspektasi (*over achievement*). Selain

itu, indikator ini merupakan **indikator baru**, sehingga **baseline historis belum tersedia** sebagai pembanding tren.

Mengingat indikator ini merupakan indikator yang relatif baru dalam sistem pengukuran kinerja daerah, capaian tahun 2025 dapat dipandang sebagai **baseline awal yang representatif** dalam menggambarkan kondisi riil kualitas pembangunan keluarga di Kabupaten Batu Bara. Dengan demikian, capaian yang melebihi target tidak hanya menunjukkan keberhasilan kinerja, tetapi juga mengindikasikan bahwa pendekatan intervensi yang dilakukan telah berada pada arah yang tepat.

Secara evaluatif, capaian tersebut mencerminkan bahwa program pembangunan keluarga telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas keluarga, khususnya dalam aspek ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Namun demikian, sebagai indikator baru, capaian ini tetap perlu diinterpretasikan secara hati-hati, mengingat kemungkinan adanya penyesuaian metodologi, validitas data, serta konsistensi pengukuran pada tahun-tahun berikutnya.

Keberhasilan capaian kinerja ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung utama, antara lain:

1. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor (Bangga Kencana)

Pembangunan keluarga merupakan isu lintas sektor yang melibatkan OPD teknis, kecamatan, dan pemerintah desa. Sinergi ini memungkinkan intervensi yang lebih komprehensif, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga.

2. Peran Aktif Pemerintah Kecamatan dan Desa

Kecamatan berfungsi sebagai koordinator wilayah, sementara desa menjadi ujung tombak implementasi melalui kader PKK, Posyandu, dan kelompok kegiatan keluarga (BKB, BKR, BKL).

3. Pendekatan Berbasis Keluarga (Family-Based Development)

Intervensi langsung pada unit keluarga memungkinkan program lebih tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.

4. Dukungan Program Nasional

Integrasi dengan program nasional seperti penurunan stunting, ketahanan keluarga, dan perlindungan sosial memperkuat capaian pada dimensi iBangga.

Dalam perspektif evaluatif, terdapat beberapa permasalahan strategis yang perlu diperhatikan:

1. **Keterbatasan Sistem Data dan Pelaporan**

Belum tersedianya data iBangga menunjukkan bahwa sistem pengumpulan dan validasi data belum optimal, sehingga menghambat proses evaluasi kinerja berbasis bukti (*evidence-based evaluation*).

2. **Indikator Baru (Transisi Pengukuran)**

Sebagai indikator baru, terdapat potensi ketidaksiapan dalam metodologi pengukuran, pemahaman indikator, serta integrasi data antar perangkat daerah.

3. **Risiko Ketidaktepatan Penetapan Target**

Tanpa baseline yang jelas, penetapan target berpotensi tidak mencerminkan kondisi riil, baik terlalu rendah (*underestimated*) maupun terlalu tinggi (*overestimated*).

4. **Koordinasi Data yang Belum Terintegrasi**

Data pembangunan keluarga bersumber dari berbagai sektor (kesehatan, pendidikan, sosial), sehingga memerlukan integrasi yang kuat. Kelemahan integrasi dapat menyebabkan keterlambatan dan inkonsistensi data.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas pada tahun berikutnya, direkomendasikan:

1. **Penguatan Sistem Data**

- Membangun mekanisme pengumpulan data berbasis digital dan terintegrasi.
- Menetapkan jadwal pelaporan yang jelas hingga tingkat desa.
- Melakukan validasi data secara berjenjang.

2. **Penetapan Baseline dan Rekalibrasi Target**

- Menetapkan tahun 2025 sebagai baseline awal
- Menyusun target yang lebih realistis dan progresif berdasarkan hasil pengukuran awal

3. **Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Data**

- Melaksanakan pelatihan teknis terkait pengukuran iBangga

- Meningkatkan pemahaman indikator pada tingkat OPD, kecamatan, dan desa

4. **Penguatan Koordinasi Lintas Sektor**

- Membentuk forum koordinasi pembangunan keluarga
- Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas antar perangkat daerah

5. **Fokus pada Intervensi Outcome (Kualitas Keluarga)**

- Mengintegrasikan program ekonomi keluarga, kesehatan, dan pendidikan.
- Mendorong kemandirian keluarga sebagai outcome utama

Secara keseluruhan, capaian Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tingkat capaian di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan dan intervensi program pembangunan keluarga telah berjalan efektif. Namun demikian, ke depan diperlukan penguatan pada aspek sistem pengukuran, kualitas data, serta peningkatan target yang lebih progresif agar capaian kinerja dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh capaian angka iBangga, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun **sistem data yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan**, sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas keluarga berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu **Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian, dan Dimensi Kebahagiaan**. Peningkatan nilai iBangga sangat ditentukan oleh efektivitas intervensi program yang menysasar langsung unit keluarga sebagai basis pembangunan.

Empat program strategis, yaitu **Program Pembinaan Keluarga Berencana, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA),** serta **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**, memiliki hubungan kausal yang kuat dan saling terintegrasi dalam mendorong peningkatan ketiga dimensi iBangga.

Skema kebijakan yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Batu Bara berupa pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Hubungan Kausalitas:

Program ini berfungsi sebagai intervensi awal dalam membentuk struktur keluarga yang ideal melalui pengendalian kelahiran dan perencanaan keluarga.

Kontribusi terhadap Dimensi iBangga kaitannya dengan dimensi:

- **Ketentraman:**

Pengaturan jumlah dan jarak kelahiran mengurangi tekanan ekonomi dan psikologis, sehingga menciptakan stabilitas dalam rumah tangga.

- **Kemandirian:**

Keluarga dengan jumlah tanggungan yang terencana memiliki kapasitas lebih baik dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

- **Kebahagiaan:**

Beban keluarga yang proporsional meningkatkan kualitas interaksi antar anggota keluarga dan kepuasan hidup.

Makna Kausal:

Program KB menciptakan **fondasi keluarga berkualitas**, yang menjadi prasyarat bagi intervensi program lainnya.

2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Hubungan Kausalitas:

Program ini memperkuat dinamika internal keluarga melalui peningkatan kapasitas pengasuhan, komunikasi, dan ketahanan keluarga. Kontribusi terhadap Dimensi iBangga kaitannya dengan:

- **Ketentraman:**

Meningkatkan keharmonisan keluarga dan menurunkan potensi konflik domestik.

- **Kemandirian:**

Mendorong kemampuan keluarga dalam mengelola permasalahan secara mandiri dan adaptif.

- **Kebahagiaan:**

Keluarga yang harmonis dan komunikatif memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi.

Makna Kausal:

Program ini berperan dalam **menguatkan kualitas relasi internal keluarga**, sehingga meningkatkan stabilitas sosial pada level mikro.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Hubungan Kausalitas:

Program ini merupakan investasi jangka panjang melalui pemenuhan hak dasar anak, meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi. Kontribusi terhadap Dimensi iBangga kaitannya dengan:

- **Ketentraman:**

Lingkungan yang aman dan ramah anak menciptakan rasa aman dalam keluarga.

- **Kemandirian:**

Anak yang sehat dan berpendidikan akan tumbuh menjadi individu mandiri dan produktif.

- **Kebahagiaan:**

Terpenuhinya hak anak meningkatkan kesejahteraan psikologis keluarga secara keseluruhan.

Makna Kausal:

Program PHA memperkuat **kualitas generasi penerus**, yang menentukan keberlanjutan kualitas keluarga di masa depan.

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Hubungan Kausalitas:

Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi keluarga melalui pemberdayaan dan penguatan usaha produktif. Kontribusi terhadap Dimensi iBangga kaitannya dengan:

- **Ketentraman:**

Stabilitas ekonomi mengurangi kerentanan dan konflik dalam keluarga.

- **Kemandirian:**

Peningkatan pendapatan dan keterampilan usaha mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

- **Kebahagiaan:**

Kondisi ekonomi yang lebih baik meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan hidup.

Makna Kausal:

Program ini menjadi **pengungkit utama (key driver)** dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Keempat program tersebut membentuk suatu hubungan kausal yang berjenjang dan saling menguatkan:

1. **Pembinaan KB** → membentuk struktur keluarga yang ideal
2. **Peningkatan kualitas keluarga** → memperkuat relasi dan ketahanan internal
3. **Pemenuhan hak anak** → meningkatkan kualitas SDM keluarga
4. **Pemberdayaan ekonomi (KS)** → memperkuat kemandirian dan kesejahteraan

Keterpaduan ini menghasilkan:

- **Ketentraman meningkat** melalui stabilitas sosial dan ekonomi keluarga
- **Kemandirian meningkat** melalui kemampuan ekonomi dan kapasitas adaptif
- **Kebahagiaan meningkat** melalui kesejahteraan dan kualitas hubungan keluarga

Keempat program tersebut merupakan **intervensi kunci (key interventions)** karena:

1. **Berbasis pada Unit Terkecil Pembangunan (Keluarga)**

Peningkatan kualitas keluarga secara langsung mempengaruhi capaian pembangunan secara agregat.

2. **Menyasar Akar Permasalahan (Root Causes)**

Permasalahan pembangunan keluarga umumnya terkait dengan aspek kependudukan, kualitas relasi, pemenuhan hak dasar, dan ekonomi—seluruhnya diintervensi oleh program ini.

3. **Memiliki Efek Multiplikasi (Multiplier Effect)**

Perbaikan pada satu aspek keluarga akan berdampak pada aspek lainnya secara simultan.

4. **Bersifat Berkelanjutan (Sustainable Impact)**

Intervensi tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga membentuk kualitas generasi mendatang.

Dengan demikian, implementasi keempat program tersebut secara terintegrasi memiliki daya ungkit tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan

Keluarga, khususnya pada dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Keberhasilan peningkatan iBangga pada akhirnya mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun **keluarga yang tangguh, mandiri, dan sejahtera**, sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Capaian kinerja nyata dari sasaran **Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga** yang diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada tahun 2025 mencapai **101,48%** dengan predikat **sangat tinggi**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pembangunan keluarga telah berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas keluarga, khususnya dalam dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan kualitas intervensi serta penyempurnaan sistem pengukuran kinerja agar lebih akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Sasaran Menurunnya Ketimpangan Gender

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	-	-	-	93,5	0,37	-

Indikator kinerja sasaran ini diukur melalui Indeks Ketimpangan Gender (IKG), yang mencerminkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Pada tahun 2025, Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Batu Bara ditargetkan sebesar 0,37, namun hingga saat ini realisasi belum dapat disajikan karena indikator tersebut merupakan indikator baru dan data resmi dari kementerian terkait belum dirilis. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja belum dapat dihitung secara kuantitatif, sehingga evaluasi terhadap pencapaian target belum dapat dilakukan secara optimal.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,33, maka target tahun 2025 masih berada pada jalur penurunan yang

direncanakan secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa secara perencanaan, pemerintah daerah telah menetapkan arah kebijakan yang konsisten dalam upaya menurunkan ketimpangan gender, meskipun hasil capaian tahun berjalan belum dapat diukur secara numerik.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lain, analisis komparatif juga belum dapat dilakukan secara akurat karena keterbatasan ketersediaan data publik terkini. Namun demikian, secara umum daerah dengan tingkat pembangunan manusia yang lebih baik serta implementasi pengarusutamaan gender yang kuat cenderung memiliki nilai Indeks Ketimpangan Gender yang lebih rendah.

Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama pada tahun 2025 tidak hanya pada pencapaian kinerja, tetapi juga pada penguatan sistem data dan mekanisme pengukuran, sehingga pada tahun-tahun berikutnya evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih akurat, terukur, dan akuntabel.

Meskipun data capaian belum tersedia, terdapat beberapa faktor pendukung yang berpotensi mendorong penurunan ketimpangan gender, antara lain:

1. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor (Gender Mainstreaming)

Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang melibatkan berbagai perangkat daerah, kecamatan, dan desa.

2. Peran Kecamatan dan Desa sebagai Ujung Tombak

Kecamatan dan desa berperan dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

3. Integrasi Program Pemberdayaan Perempuan

Program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi perempuan mulai terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah.

4. Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan

Peran PKK dan kelompok perempuan dalam meningkatkan kesadaran gender di masyarakat.

Beberapa kendala yang berpotensi menghambat pencapaian target antara lain:

1. Keterbatasan Data dan Sistem Pengukuran

Belum tersedianya data realisasi menunjukkan bahwa sistem pengumpulan dan pelaporan data gender belum optimal.

2. Pemahaman Pengarusutamaan Gender yang Belum Merata

Implementasi PUG di tingkat OPD, kecamatan, dan desa masih belum seragam.

3. Kesenjangan Akses dan Partisipasi Perempuan

Perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan.

4. Budaya dan Norma Sosial

Faktor sosial budaya masih menjadi hambatan dalam mendorong kesetaraan gender.

Untuk meningkatkan kinerja pada sasaran ini, alternatif yang akan dilakukan adalah:

1. Penguatan Sistem Data Gender (Gender Statistics)

- Membangun sistem data terpilah gender yang terintegrasi
- Mempercepat proses pelaporan dan validasi data

2. Optimalisasi Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

- Meningkatkan kapasitas OPD dalam perencanaan responsif gender
- Mengintegrasikan analisis gender dalam program pembangunan

3. Peningkatan Akses dan Partisipasi Perempuan

- Mendorong keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan pengambilan keputusan.
- Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi perempuan

4. Penguatan Edukasi dan Perubahan Sosial

- Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kesetaraan gender
- Melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga lokal

5. Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor

- Memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah, kecamatan, dan desa
- Menetapkan indikator kinerja yang lebih terukur dan terintegrasi

Secara keseluruhan, kinerja pada sasaran *Menurunnya Ketimpangan Gender* belum dapat diukur secara kuantitatif akibat keterbatasan data. Oleh karena itu, fokus utama pada tahun berjalan adalah pada penguatan sistem pengukuran dan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender.

Keberhasilan penurunan ketimpangan gender sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan bersifat inklusif, responsif gender, dan berbasis data, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Keterkaitan Program terhadap Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan IPM

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Penurunan nilai IKG (semakin mendekati nol) menunjukkan semakin kecilnya ketimpangan gender.

Dalam konteks pembangunan daerah, IKG memiliki keterkaitan erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Semakin rendah ketimpangan gender, maka kontribusi perempuan terhadap pembangunan meningkat, yang pada akhirnya mendorong peningkatan IPM secara keseluruhan.

Dua program strategis, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Program Pengendalian Penduduk, merupakan intervensi kunci yang memiliki hubungan kausal langsung terhadap penurunan IKG. Hubungan keterkaitan tersebut adalah:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Hubungan Kausalitas:

Program ini berfokus pada integrasi perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan, serta peningkatan kapasitas dan peran perempuan dalam berbagai sektor. Kontribusi terhadap Aspek IKG:

- **Pemberdayaan:**

Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pendidikan, politik, dan pengambilan keputusan, sehingga mengurangi kesenjangan dalam aspek representasi dan akses terhadap sumber daya.

- **Partisipasi Ekonomi:**

Program pemberdayaan ekonomi perempuan (UMKM, pelatihan keterampilan, akses permodalan) mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan.

- Kesehatan Reproduksi (Tidak Langsung):

Perempuan yang lebih berdaya memiliki kemampuan lebih baik dalam mengambil keputusan terkait kesehatan dan perencanaan keluarga.

Keterkaitan dengan IPM:

- Meningkatkan rata-rata lama sekolah perempuan → dimensi pendidikan
- Meningkatkan pendapatan perempuan → dimensi standar hidup
- Meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan

Pengarusutamaan gender memastikan bahwa perempuan tidak lagi menjadi kelompok yang tertinggal dalam pembangunan, sehingga terjadi pemerataan akses dan manfaat pembangunan, yang secara langsung menurunkan ketimpangan gender.

2. Program Pengendalian Penduduk

Hubungan Kausalitas:

Program ini mengatur dinamika kependudukan melalui pengendalian kelahiran, peningkatan kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga.

Kontribusi terhadap Aspek IKG:

- Kesehatan Reproduksi:

Menurunkan angka kematian ibu, meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi, serta mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan.

- Pemberdayaan:

Perempuan memiliki kontrol lebih besar terhadap keputusan reproduksi, yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

- Partisipasi Ekonomi:

Dengan jumlah anak yang lebih terencana, perempuan memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan kegiatan ekonomi.

Keterkaitan dengan IPM:

- Meningkatkan angka harapan hidup melalui kesehatan ibu dan anak
- Meningkatkan kualitas pendidikan anak melalui keluarga yang lebih terencana
- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga

Pengendalian penduduk menjadi faktor kunci dalam menciptakan keluarga berkualitas, yang berdampak langsung pada peningkatan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Kedua program memiliki hubungan yang saling menguatkan, yaitu:

- Pengarusutamaan Gender → meningkatkan akses dan peran perempuan
- Pengendalian Penduduk → meningkatkan kualitas kesehatan dan perencanaan keluarga

Melalui intervensi kedua program, diharapkan:

- Aspek kesehatan reproduksi membaik → menurunkan angka kematian ibu
- Aspek pemberdayaan meningkat → meningkatkan keterlibatan perempuan
- Aspek ekonomi membaik → meningkatkan partisipasi kerja perempuan

Sehingga Nilai IKG akan menurun (mendekati nol), yang menunjukkan berkurangnya ketimpangan gender.

Penurunan IKG akan berdampak pada peningkatan IPM melalui:

- Dimensi kesehatan → peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak
- Dimensi pendidikan → peningkatan akses pendidikan perempuan
- Dimensi ekonomi → peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga

Dengan demikian IKG dan IPM memiliki hubungan yang saling memperkuat (mutually reinforcing relationship).

Implementasi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Program Pengendalian Penduduk merupakan intervensi strategis yang memiliki daya ungkit tinggi dalam menurunkan ketimpangan gender. Kedua program ini secara simultan memperkuat aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi perempuan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Keberhasilan penurunan Indeks Ketimpangan Gender sangat ditentukan oleh konsistensi dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh kebijakan pembangunan, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,00	59,86	84,31%	71,00	73,61	103,68%

Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara ditargetkan sebesar 71,00, dan realisasi yang dicapai sebesar 73,61, sehingga

tingkat capaian kinerja mencapai 103,68%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan berhasil dilampaui secara optimal.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 73,92, maka capaian tahun 2025 telah mendekati target tersebut dengan selisih sebesar 0,31 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup berada pada jalur yang sangat progresif, bahkan berpotensi mencapai target RPJMD lebih cepat dari waktu yang direncanakan.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian nasional tahun 2025 yang diproyeksikan sebesar 76,49, maka capaian Kabupaten Batu Bara masih berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih sebesar 2,88 poin. Sementara itu, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 sebesar 73,96, maka capaian Kabupaten Batu Bara tahun 2025 masih sedikit lebih rendah dengan selisih sebesar 0,35 poin.

Secara umum, daerah dengan pengendalian pencemaran yang baik, pengelolaan sampah yang efektif, serta tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap lingkungan cenderung memiliki nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang lebih tinggi. Oleh karena itu, capaian Kabupaten Batu Bara sebesar 73,61 menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup telah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan agar mampu sejajar dengan capaian nasional dan melampaui capaian provinsi secara berkelanjutan.

Berikut adalah perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dan nasional:

Tabel. 3.22. perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dan nasional

Wilayah	Tahun	IKLH
Kabupaten Batu Bara	2025	59,86
Provinsi Sumatera Utara	2024	73,94
Nasional	2025	76,49 (proyeksi capaian Tahun 2025)

Untuk Provinsi Sumatera Utara, data spesifik mengenai IKLH tahun 2025 belum tersedia dalam sumber yang ada. Namun, berdasarkan tren sebelumnya, IKLH Sumatera Utara menunjukkan peningkatan dari 72,80 poin

pada tahun 2023 menjadi 73,96 poin pada tahun 2042.

Berdasarkan data BPS, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 menunjukkan nilai sebagai berikut:

1. **Indeks Kualitas Air (IKA) – 78,91:** Nilai IKA sebesar 78,91 menempatkan kualitas air permukaan pada kategori Baik. Meskipun menunjukkan kondisi yang relatif terkendali, capaian ini mencerminkan adanya beban pencemaran (pollution load) yang bersifat fluktuatif. Penurunan kualitas di beberapa titik pantau diindikasikan berasal dari polutan antropogenik, terutama limbah domestik (grey water), limpasan (*run-off*) aktivitas pertanian yang membawa residu kimia, serta aktivitas industri skala kecil. Keterbatasan infrastruktur pengolahan air limbah (SPAL) dan sistem sanitasi terpadu menjadi faktor determinan yang memengaruhi stabilitas indeks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pengendalian pembuangan limbah ke badan air, peningkatan cakupan sanitasi layak, serta pemantauan kualitas air secara kontinu pada titik-titik rawan pencemaran.
2. **Indeks Kualitas Udara (IKU) – 75,60:** Nilai IKU sebesar 75,60 menunjukkan bahwa kualitas udara berada pada kategori Baik, yang mengindikasikan tingkat polutan di atmosfer masih berada di bawah ambang batas membahayakan. Kondisi ini didukung oleh masih luasnya area tutupan vegetasi dan volume kendaraan bermotor yang belum mencapai titik jenuh. Namun demikian, terdapat risiko degradasi kualitas udara yang dipicu oleh peningkatan emisi dari sektor transportasi lintas wilayah, aktivitas industri manufaktur, serta praktik pembakaran sampah terbuka (*open burning*). Sebagai langkah preventif, diperlukan penguatan sistem pemantauan kualitas udara ambien, uji emisi kendaraan secara berkala, serta pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai *air purifier* alami untuk menjaga stabilitas kualitas udara dalam jangka panjang.
3. **Indeks Kualitas Lahan (IKL) – 60,83:** Nilai IKL sebesar 60,83 menempatkan kondisi kualitas lahan pada kategori Sedang. Meskipun masih berada pada ambang batas yang cukup baik, angka ini mencerminkan adanya tekanan terhadap daya dukung lingkungan akibat laju alih fungsi lahan dan praktik penggunaan lahan yang belum sepenuhnya mengikuti kaidah konservasi. Kondisi ini menuntut penguatan dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan

percepatan rehabilitasi lahan kritis guna mencegah penurunan produktivitas lahan serta meminimalkan risiko bencana ekologis di masa depan.

Berikut data perbandingan IKA, IKU dan IKL tahun 2024 dengan tahun 2025:

Tabel. 3.23. Perbandingan IKA, IKU dan IKL tahun 2024 dengan tahun 2025

Indikator	Tahun	
	2024	2025
Indeks Kualitas Air (IKA)	50	78,91
Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,71	75,60
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	25,27	60,83

Berdasarkan tabel diatas, Pemerintah daerah perlu mempertahankan momentum perbaikan IKA dan IKL melalui kebijakan konservasi, sembari melakukan langkah preventif pada sektor udara agar tren penurunan IKU tidak berlanjut di tahun mendatang.

Berdasarkan evaluasi capaian tahun 2025, meskipun terjadi tren peningkatan indeks, terdapat beberapa faktor yang tetap menjadi hambatan dan tantangan ke depan:

1. **Residu Polusi dan Tantangan Sanitasi Domestik:** Meskipun Indeks Kualitas Air (IKA) meningkat, tekanan dari limbah domestik dan *grey water* yang belum terkelola secara komunal tetap menjadi ancaman fluktuasi kualitas air. Keterbatasan akses sanitasi layak di beberapa titik pemukiman padat masih menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas angka IKA.
2. **Tekanan Alih Fungsi Lahan:** Walaupun Indeks Kualitas Lahan (IKL) mengalami lonjakan positif, praktik konversi lahan menjadi area terbangun dan perkebunan tanpa kaidah konservasi tetap menjadi risiko degradasi jangka panjang. Hal ini berpotensi memicu erosi dan penurunan kesuburan tanah jika tidak diimbangi dengan pengawasan tata ruang yang ketat.
3. **Kesenjangan Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan:** Belum meratanya fasilitas pengolahan sampah terpadu (TPST), sistem drainase primer, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menghambat upaya akselerasi peningkatan kualitas lingkungan hidup yang lebih masif.

4. **Optimalisasi Penegakan Regulasi Lingkungan:** Masih terdapat celah dalam konsistensi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan limbah serta pembakaran lahan terbuka (*open burning*). Lemahnya sanksi bagi pelanggar menyebabkan potensi praktik perusakan lingkungan tetap ada.

Peningkatan signifikan pada Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) di tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis berikut:

1. **Intensifikasi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran** Keberhasilan menaikkan IKA dari **50,00 ke 78,91** didorong oleh penguatan pengawasan terhadap pembuangan limbah industri dan usaha skala besar. Penerapan sanksi administratif yang tegas serta pembinaan rutin terhadap pelaku usaha mengenai instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terbukti efektif menurunkan beban pencemaran pada badan air permukaan.
2. **Akselerasi Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan Masif** Lonjakan IKL dari **25,27 ke 60,83** merupakan dampak langsung dari program rehabilitasi lahan kritis dan penanaman vegetasi permanen yang dilakukan secara kolaboratif. Peningkatan luas tutupan hijau ini secara drastis memperbaiki fungsi hidrologis dan menahan laju degradasi lahan di wilayah-wilayah rawan erosi.
3. **Optimalisasi Program Sanitasi dan Drainase Terpadu** Pembangunan infrastruktur sanitasi pemukiman yang lebih merata dan perbaikan sistem drainase primer di tingkat kecamatan berkontribusi pada penurunan polutan domestik yang masuk ke aliran sungai. Hal ini secara langsung memperbaiki parameter kimia dan biologi air yang diuji pada titik pantau.
4. **Peningkatan Kesadaran Kolektif dan Partisipasi Masyarakat** Keberhasilan ini juga didukung oleh meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dan pengurangan praktik pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Sinergi antara pemerintah daerah, komunitas lingkungan, dan sektor swasta menciptakan ekosistem yang lebih mendukung pelestarian lingkungan.

PEMETAAN PROGRAM TERHADAP IKA, IKU, IKL

No	Nama Program	Berpengaruh Dominan Pada	Alasan/Kaitan Logis
1	Pengelolaan &	IKA (Air)	Mengurangi ketergantungan pada air tanah

No	Nama Program	Berpengaruh Dominan Pada	Alasan/Kaitan Logis
	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		dangkal yang tercemar dan memastikan pengelolaan sumber air baku terjaga kualitasnya.
2	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah	IKA (Air)	Berpengaruh sangat besar karena mencegah limbah domestik (<i>grey water/black water</i>) langsung masuk ke sungai/badan air.
3	Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup	IKA, IKU, IKL	Program ini bersifat lintas sektor. Mengawasi limbah industri (IKA), memantau emisi (IKU), dan rehabilitasi lahan kritis (IKL).
4	Program Kawasan Permukiman	IKA & IKL	Penataan kawasan kumuh memperbaiki sanitasi (IKA) dan menata ruang terbuka hijau di pemukiman (IKL).
5	Program Pengelolaan Persampahan	IKA & IKL	Mencegah sampah dibuang ke sungai (IKA) dan mencegah pencemaran tanah akibat sampah yang tidak terkelola di TPA (IKL).
6	Pengembangan Kawasan Permukiman	IKL	Terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di area baru yang sedang dikembangkan.

Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup sebesar **103,68%** dengan predikat **Sangat Tinggi** mencerminkan efektivitas integrasi program rehabilitasi lahan dan pengendalian pencemaran air. Melampauinya target ini menjadi fondasi kuat untuk memperketat pengawasan emisi udara dan konsistensi perlindungan ekosistem, guna memastikan pembangunan daerah tetap selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan. Upaya perlindungan lingkungan hidup terbukti dilaksanakan secara optimal. Tantangan berikutnya adalah menjaga stabilitas indeks melalui penguatan regulasi dan inovasi tata kelola limbah, guna menjamin keberlanjutan kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Ketahanan Pangan

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	-	-	-	78,45	69,31	88,35

Indikator kinerja sasaran ini diukur melalui Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang merupakan komposit dari tiga pilar utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Pada tahun 2025, target IKP ditetapkan sebesar 78,45, dengan realisasi sebesar 69,31. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja fisik mencapai 88,35%, yang secara kategori masuk dalam predikat Tinggi. Meskipun sasaran ini belum mencapai target operasional 100%, angka 69,31 mencerminkan kondisi ketahanan pangan daerah yang tetap berada pada level stabil di tengah dinamika ekonomi global.

Terdapat selisih sebesar 9,14 poin antara target dan realisasi. Deviasi ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam distribusi pangan dan fluktuasi harga komoditas strategis yang memengaruhi daya beli masyarakat. Capaian ini menjadi dasar bagi Kabupaten Batu Bara untuk memperkuat strategi pengamanan cadangan pangan daerah dan optimalisasi rantai pasok dari produsen ke konsumen.

Secara teknis, guna mengejar ketertinggalan poin tersebut di tahun mendatang, diperlukan intervensi khusus pada aspek infrastruktur distribusi dan diversifikasi pangan lokal guna memastikan akses pangan masyarakat tetap terjaga di seluruh wilayah.

Analisis Hubungan Program terhadap Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan hasil komposit dari efektivitas tiga program utama yang saling terintegrasi:

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan:

Berfokus pada intervensi langsung di wilayah zona merah (rentan pangan) untuk memitigasi risiko kelaparan dan kerentanan akut.

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat:

Berfokus pada kemandirian pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan penganeekaragaman konsumsi agar masyarakat tidak bergantung pada satu jenis komoditas utama (beras).

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan:

Berfokus pada penjaminan standar kualitas pangan yang beredar agar layak dikonsumsi dan bebas dari cemaran berbahaya.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan suatu daerah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan. Secara konseptual, IKP tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan beberapa aspek utama berikut:

1. Ketersediaan (*Availability*):

Program Diversifikasi memastikan pasokan pangan tidak hanya bergantung pada produksi gabah, tetapi juga komoditas alternatif. Hal ini memperkuat stok pangan daerah melalui optimalisasi lahan pekarangan dan lumbung pangan desa.

2. Keterjangkauan (*Access*):

Program Penanganan Kerawanan Pangan melalui bantuan stimulan dan pengendalian harga memastikan kelompok masyarakat berpendapatan rendah tetap memiliki akses ekonomi terhadap pangan di tengah fluktuasi pasar.

3. Pemanfaatan (*Utilization*):

Program Pengawasan Keamanan Pangan menjamin bahwa pangan yang tersedia memiliki kualitas gizi yang baik dan aman secara biologis/kimiawi, sehingga nutrisi dapat terserap optimal oleh tubuh.

4. Stabilitas (*Stability*):

Integrasi ketiga program ini menciptakan jaring pengaman yang menjaga ketahanan pangan tetap konsisten, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi gangguan distribusi atau gagal panen.

Indeks Ketahanan Pangan juga sangat erat kaitannya dengan:

1. Aspek Ekonomi: Pendapatan dan Kemiskinan

Ketahanan pangan memiliki korelasi linear dengan angka kemiskinan. Program pemberdayaan pangan (seperti KRPL/P2L) mampu menekan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dapur hingga 15-20%, yang secara tidak langsung meningkatkan *disposable income* (pendapatan yang siap dibelanjakan). Hal ini menjadi instrumen strategis dalam menjaga daya beli masyarakat miskin agar tidak jatuh ke dalam kategori rawan pangan kronis.

2. Aspek Pertanian: Produktivitas dan Ketersediaan

Program diversifikasi mendorong petani untuk tidak melakukan monokultur. Peningkatan produktivitas berbagai jenis komoditas lokal (ubi, jagung, sayuran) meningkatkan ketahanan pangan dari sisi hulu. Keberlanjutan produksi dipastikan melalui penguatan kelembagaan cadangan pangan yang mampu menyangga kebutuhan daerah saat musim paceklik.

3. Aspek Infrastruktur: Distribusi dan Akses

Infrastruktur logistik yang mendukung (jalan usaha tani dan gudang penyimpanan) adalah kunci stabilitas IKP. Program penanganan kerawanan pangan seringkali terhambat oleh aksesibilitas wilayah. Oleh karena itu, konektivitas antar wilayah produksi ke wilayah konsumsi sangat menentukan skor keterjangkauan fisik dalam indeks.

4. Aspek Kesehatan: Gizi, Stunting, dan Kualitas Konsumsi

Ketahanan pangan adalah *leading sector* dalam penanganan Stunting. Melalui diversifikasi pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman), kualitas konsumsi keluarga meningkat. Pengawasan keamanan pangan memastikan masyarakat terhindar dari penyakit bawaan pangan (*foodborne diseases*) yang dapat memperburuk status gizi balita dan ibu hamil.

5. Aspek Sosial: Kerentanan Kelompok Masyarakat

Analisis sosial menunjukkan bahwa kelompok rentan (lansia, buruh tani, dan keluarga prasejahtera) adalah yang paling terdampak saat terjadi gejolak pangan. Program Penanganan Kerawanan Pangan berfungsi sebagai *social safety net* yang mencegah terjadinya gejolak sosial akibat kelangkaan atau lonjakan harga pangan di tingkat lokal.

Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Ketahanan Pangan sebesar **88,35% (Predikat Tinggi)** menunjukkan bahwa fondasi ketahanan pangan daerah telah berada pada jalur yang tepat. Namun, untuk menutup celah kinerja (*performance gap*) sebesar 11,65%, diperlukan **akselerasi transformasi** pada rantai pasok produksi, efisiensi jalur distribusi, serta penguatan daya beli masyarakat. Langkah ini krusial untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan berkelanjutan sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Sasaran Menurunnya Resiko Bencana

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	-	-	-	143,20	143,20	100%

Pada tahun 2025, target **Indeks Risiko Bencana (IRB)** Kabupaten Batu Bara ditetapkan sebesar **143,20**, dan realisasi yang dicapai juga sebesar **143,20**,

sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100%**. Secara kuantitatif, capaian ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan berhasil dipenuhi (*on target performance*).

Namun demikian, perlu dipahami bahwa IRB merupakan **unfavorable index**, dimana semakin rendah nilai indeks menunjukkan kinerja yang semakin baik dalam pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, capaian yang tepat pada target tidak serta-merta mencerminkan penurunan risiko yang signifikan, melainkan menunjukkan bahwa kondisi risiko masih berada pada tingkat yang relatif sama dengan yang telah diproyeksikan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **138,92**, maka capaian tahun 2025 masih terdapat **gap sebesar 4,28 poin**. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam sisa periode perencanaan, diperlukan upaya percepatan yang lebih terarah dan sistematis untuk menurunkan tingkat risiko bencana secara lebih optimal.

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 sebesar **73,96**, terlihat adanya disparitas yang cukup signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah Kabupaten Batu Bara yang memiliki tingkat paparan (*exposure*) tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan pasang air laut, serta masih terbatasnya infrastruktur mitigasi yang bersifat struktural.

Secara substantif, nilai IRB sebesar **143,20** menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Batu Bara masih berada pada kategori yang memerlukan perhatian serius dan intervensi berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa upaya mitigasi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), maupun meningkatkan kapasitas (*capacity*) secara signifikan.

Dengan demikian, meskipun capaian kinerja tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan, tantangan utama ke depan adalah mendorong **penurunan nilai indeks secara progresif**, sehingga tidak hanya mencapai target tahunan, tetapi juga mampu memenuhi target jangka menengah RPJMD serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko bencana secara berkelanjutan.

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator komposit yang mengukur tingkat kerentanan wilayah berdasarkan formulasi:

$$Risiko = \frac{Bahaya \times Kerentanan}{Kapasitas}$$

Dalam rangka pencapaian target sasaran, Program Penanggulangan Bencana, Program Penanganan Bencana, dan Program Pengendalian Bencana Pertanian diintegrasikan sebagai intervensi multidimensi untuk menekan variabel pembilang (Bahaya & Kerentanan) sekaligus memperkuat variabel pembagi (Kapasitas).

Analisis Kontribusi Program terhadap Komponen IRB

1. Program Penanggulangan Bencana (Fokus: Preventif-Struktural)

Hubungan Kausalitas: Berperan sebagai instrumen Mitigasi dan Kesiapsiagaan prabencana. Kontribusi teknis terhadap komponen IRB:

- Bahaya/Ancaman: Mereduksi *exposure* ancaman melalui normalisasi saluran, rehabilitasi mangrove (untuk abrasi), dan zonasi wilayah rawan.
- Kapasitas: Memperkuat infrastruktur data melalui Kajian Risiko Bencana (KRB) dan sistem peringatan dini (*Early Warning System*).
- Argumen Kunci: Program ini merupakan investasi strategis untuk meminimalkan potensi kerugian sebelum bencana terjadi (*Ex-ante mitigation*).

2. Program Penanganan Bencana (Fokus: Responsif-Kuratif)

Hubungan Kausalitas: Berfungsi sebagai Buffer System (sistem penyangga) saat terjadi kedaruratan. Kontribusi teknis terhadap komponen IRB:

- Kerentanan: Memitigasi perluasan dampak sosial-ekonomi melalui evakuasi cepat dan pemenuhan logistik dasar, sehingga mencegah masyarakat jatuh ke ambang kemiskinan pascabencana.
- Kapasitas: Menguji efektivitas standar operasional prosedur (SOP) dan kecepatan respon (*lead time*) aparaturnya.
- Argumen Kunci: Penanganan yang efektif menjamin stabilitas sosial dan mencegah eskalasi risiko dari skala lokal menjadi krisis daerah.

3. Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian (Fokus: Sektoral-Ekonomi)

Hubungan Kausalitas: Berfokus pada perlindungan Sektor Basis ekonomi daerah. Kontribusi teknis terhadap komponen IRB:

- Kerentanan: Melindungi aset produktif masyarakat (lahan pertanian) melalui asuransi pertanian dan bantuan benih tahan genangan.
- Kapasitas: Meningkatkan daya lenting (*resilience*) petani melalui penerapan teknologi adaptasi iklim.

Program ini memastikan bahwa guncangan bencana tidak melumpuhkan ketahanan pangan dan pertumbuhan PDRB sektor pertanian.

Disaster Risk Management



Sinergi ketiga program ini menghasilkan dampak kolektif terhadap beberapa sektor pembangunan daerah seperti:

1. Sektor Infrastruktur:

Mendorong terciptanya *Disaster-Resilient Infrastructure* (Infrastruktur Tangguh Bencana) yang memiliki usia pakai lebih panjang.

2. Sektor Lingkungan:

Menjamin keberlanjutan ekosistem sebagai benteng alami dalam mereduksi daya rusak bencana.

3. Sektor Ekonomi & Sosial:

Menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir defisit anggaran yang seringkali tersedot untuk pemulihan bencana (*Disaster recovery*).

4. Tata Kelola: Memperkuat koordinasi *Pentahelix* (Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Bisnis, Media) dalam tata kelola kebencanaan yang akuntabel.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penurunan IRB melalui ketiga program tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan upaya pengelolaan risiko secara sistematis. Intervensi ini tidak hanya berfungsi

sebagai pelindung keselamatan jiwa, tetapi juga sebagai pengaman investasi pembangunan daerah.

Oleh karena itu, strategi ke depan perlu difokuskan pada:

1. **Penguatan kapasitas daerah (capacity building)**, khususnya melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan penanggulangan bencana;
2. **Pengembangan infrastruktur mitigasi bencana**, terutama pada wilayah rawan banjir dan pesisir;
3. **Pengurangan kerentanan masyarakat**, melalui penguatan tata ruang berbasis risiko dan perlindungan kelompok rentan;
4. **Integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan**, agar pembangunan daerah lebih tangguh (*disaster-resilient development*).

Capaian kinerja sasaran **Menurunnya Risiko Bencana** sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi** menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 berhasil dicapai secara optimal. Namun demikian, mengingat Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan **indikator yang bersifat unfavorable**, dimana nilai yang lebih rendah menunjukkan kondisi yang lebih baik, maka capaian tersebut perlu dimaknai secara lebih substantif.

Realisasi indeks yang masih berada pada tingkat **143,20** mengindikasikan bahwa risiko bencana di Kabupaten Batu Bara relatif masih tinggi dan memerlukan upaya penanganan yang lebih intensif. Dengan demikian, capaian 100% lebih mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, namun belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan tingkat risiko secara signifikan.

Ke depan, diperlukan akselerasi upaya pengurangan risiko bencana melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta integrasi (*mainstreaming*) penanggulangan bencana ke dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini penting untuk mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang lebih tangguh, adaptif, dan responsif terhadap berbagai potensi ancaman bencana di masa mendatang.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,83	72,97	100,2	73,30	73,40	100,14

Sasaran Kualitas kesehatan masyarakat adalah fondasi utama yang menentukan kesejahteraan dan produktivitas bangsa. Dengan menyediakan akses layanan kesehatan yang merata, inovatif, dan berfokus pada pencegahan, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Indikator Usia Harapan Hidup merupakan IKU strategis untuk mengukur sasaran ini, untuk melihat capaian kinerja tahun 2025, dapat dilihat sebagaimana di bawah ini:

Usia Harapan Hidup

Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, indikator usia harapan hidup menjadi tolok ukur penting yang mencerminkan dampak langsung dari kebijakan kesehatan. Pada periode 2025, capaian kinerja nyata usia harapan hidup sebesar 100,14 didapat dari target yang telah ditetapkan adalah 73,30 tahun, sedangkan realisasi menunjukkan pencapaian sebesar 73,40 tahun. Meskipun perbedaannya hanya sebesar +0,1 tahun, hal ini merupakan bukti bahwa program-program peningkatan kesehatan telah berjalan dengan baik dan menghasilkan kemajuan positif. Usia harapan hidup Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 sebesar 72,97, mengalami peningkatan sebesar 0,43 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2024. Dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 74,31 tahun pencapaian tahun 2025 hanya selisih 0,7 tahun.

Usia Harapan Hidup Kabupaten Batu Bara tahun 2025 jika dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten sekitar seperti, Tanjung Balai, Asahan dan Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel, 3.24.

Usia harapan hidup Kabupaten Batu Bara dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten Tetangga Tahun 2025

No	Nama Provinsi/Kabupaten	Usia Harapan Hidup (Tahun)
1	Provinsi Sumatera Utara	74,19
2	Tebing Tinggi	74,58
3	Tanjung Balai	74,40
4	Asahan	73,93
5	Batu Bara	73,40

Dari tabel diatas dapat dilihat, Usia Harapan Hidup Kabupaten Batu Bara masih terhitung rendah dan masih dibawah provinsi dan 3 (tiga) kabupaten tetangga lainnya. Perbedaan antara Kabupaten Batu Bara (73,40 tahun) dengan rata-rata Provinsi Sumut (74,19 tahun) dan kabupaten tetangga seperti Tanjung Balai (74,40 tahun) dan Tebing Tinggi (74,58 tahun) menunjukkan adanya peluang peningkatan di Batu Bara. Berdasarkan analisis, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan ini antara lain:

1. Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan:

Wilayah dengan usia harapan hidup lebih tinggi kemungkinan memiliki akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan dan layanan medis berkualitas.

2. Infrastruktur dan Kebijakan Kesehatan:

Investasi dalam infrastruktur kesehatan serta penerapan program pencegahan penyakit yang efektif dapat meningkatkan usia harapan hidup.

3. Kondisi Sosial Ekonomi:

Faktor ekonomi dan lingkungan sosial juga memainkan peran penting; wilayah dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki indikator kesehatan yang lebih optimal.

Dengan demikian, meskipun Kabupaten Batu Bara telah menunjukkan kemajuan, peningkatan lebih lanjut dalam layanan kesehatan dan faktor pendukung lainnya diharapkan dapat mendorong angka usia harapan hidup mendekati atau bahkan melampaui rata-rata provinsi dan kabupaten tetangga.

Selain itu Penunjang Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 didukung beberapa hal seperti:

Faktor Penunjang	Capaian
Usia Harapan Hidup	99,55
Prevalensi Balita Stunting	30,59
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	31,31
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran	27,73
Angka Keberhasilan pengobatan TB (%)	98,44
Cakupan imunisasi bayi lengkap	74,21
Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	101,25
Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	37,81
Persentase Fasilitas Kesehatan dengan akreditasi Paripurna	100
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan	94,96

Faktor Penunjang	Capaian
kesehatan	
Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi Per 1000 Penduduk	92,85
Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	76,88
Persentase Desa/Kelurahan mencapai target STBM	78,54
Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 Tahun	147,9
Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	144,4
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr)	124,3
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	422,63
Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	314,21
Total Fertility Rate (TFR)	4,53

Rancangan Kebijakan Dalam Mendorong Peningkatan Indikator Usia Harapan Hidup Dilaksanakan Melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dalam upaya peningkatan promosi kesehatan didukung dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Keseluruhan skema kebijakan tersebut merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan PPKB.

Keberhasilan dalam meningkatkan usia harapan hidup ditentukan oleh serangkaian faktor yang saling berkaitan. Berikut analisis faktor-faktor keberhasilan yang mendukung peningkatan usia harapan hidup:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Fasilitas dan Infrastruktur Kesehatan:

Peningkatan fasilitas kesehatan terakreditasi utama seperti rumah sakit, klinik, dan pusat layanan kesehatan yang modern serta pemerataan fasilitas di wilayah terpencil sangat membantu dalam meningkatkan deteksi dini, pengobatan, dan pencegahan penyakit.

2. Tersedianya anggaran untuk masyarakat yang kurang mampu/miskin menjadi

Peserta Bantuan Iuran (PBI) baik itu dari anggaran APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN.

3. Kebijakan Kesehatan yang Terpadu dan Efektif:

- Program Pencegahan Penyakit:

Pelaksanaan program imunisasi, skrining kesehatan, dan edukasi tentang gaya hidup sehat berperan besar dalam menekan angka kematian akibat penyakit menular maupun tidak menular.

- Koordinasi Antar Sektor:

Sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur memungkinkan penyusunan kebijakan yang menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terdapat kordinasi antar sektor dalam penanganan stunting dan lain-lain.

Dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup, menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensi. Beberapa di antaranya adalah:

1. Kondisi Sosial Ekonomi:

Tingkat kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, dan kurangnya akses terhadap gizi yang seimbang mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

2. Faktor Budaya di kelompok masyarakat tertentu, termasuk peran Perempuan atau Ibu hamil dalam pengambilan keputusan yang masih rendah serta masih kuatnya kepercayaan sebagian masyarakat dengan dukun/parajis sehingga persalinan tidak di fasilitas kesehatan.

3. Kesadaran dan Edukasi Kesehatan:

Rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat, seperti pola makan yang seimbang, olahraga teratur, dan pencegahan penyakit, turut mempengaruhi usia harapan hidup.

4. Investasi dan Inovasi Teknologi Kesehatan:

Keterbatasan dana dan investasi dalam riset serta penerapan teknologi kesehatan yang modern juga berdampak pada kemampuan sistem kesehatan dalam memberikan layanan yang optimal.

Kendala-kendala ini harus ditangani secara holistik melalui pendekatan lintas sektor, peningkatan infrastruktur, edukasi masyarakat, serta kebijakan yang mendukung agar upaya peningkatan usia harapan hidup dapat berjalan secara

berkelanjutan.

Capaian kinerja nyata sasaran Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat sebesar 100,14 dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,75	8,51	97,25	8,68	8,71	100,35%
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,31	13,12	98,57	13,17	13,13	99,70%

Mewujudkan Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Batu Bara secara Global. Terdapat 2 (dua) indikator yaitu berupa Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) dan Harapan Lama Sekolah (AHLS). ARLS menunjukkan tingkat lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas, sedangkan AHLS digunakan untuk mengestimasi harapan lama sekolah dimasa depan yang bisa dienyam dengan melihat rata-rata proporsi setiap kelompok umur yang bersekolah pada saat ini. BPS memiliki formula penghitungan dan rentang nilai/ skor untuk masing-masing indikator (ARLS 0 – 15 Tahun; AHLS 0 – 18 Tahun). Untuk melihat capaian kinerja dari sasaran ini, dapat dilihat sebagaimana penjelasan di bawah ini.

Target Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara tahun 2025, ditunjukkan dari ARLS dan AHLS, capaian kedua indikator adalah 100,03%. Pada tahun 2025, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batu Bara ditargetkan sebesar **8,68 tahun**, dan realisasi yang dicapai sebesar **8,71 tahun**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100,35%**. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan **berhasil dilampaui**, meskipun dengan selisih yang relatif terbatas.

Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, terjadi peningkatan sebesar **0,03 tahun**, yang menunjukkan adanya perbaikan akses dan kualitas pendidikan, namun peningkatan tersebut masih bersifat incremental dan belum mencerminkan percepatan yang signifikan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **9,00 tahun**, maka capaian tahun 2025 masih terdapat *gap* sebesar **0,29 tahun**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target tahunan telah tercapai, namun masih diperlukan upaya percepatan untuk mencapai target jangka menengah.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan capaian nasional sebesar **9,07 tahun**, maka capaian Kabupaten Batu Bara masih berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih sebesar **0,36 tahun**. Sementara itu, dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar **10,08 tahun**, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan yaitu sebesar **1,37 tahun**.

Secara umum, daerah dengan akses pendidikan yang merata, tingkat partisipasi sekolah yang tinggi, serta keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah dan tinggi cenderung memiliki nilai RLS yang lebih tinggi. Oleh karena itu, capaian Kabupaten Batu Bara sebesar **8,71 tahun** menunjukkan bahwa **kualitas pendidikan telah mengalami perbaikan, namun masih memerlukan penguatan untuk mengejar ketertinggalan dari capaian nasional dan provinsi**.

Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan **rata-rata lama pendidikan yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke atas di masa mendatang**, sehingga mencerminkan akses dan peluang pendidikan jangka panjang.

Pada tahun 2025, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batu Bara ditargetkan sebesar **13,17 tahun**, namun realisasi yang dicapai sebesar **13,13 tahun**, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada **99,70%**. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan **hampir tercapai, namun belum sepenuhnya berhasil dipenuhi**.

Jika dibandingkan antara target dan realisasi, terdapat selisih sebesar **0,04 tahun**, yang menunjukkan bahwa akses pendidikan yang diharapkan masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **13,47 tahun**, maka capaian tahun 2025 masih terdapat *gap* sebesar **0,34 tahun**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sisa periode RPJMD, diperlukan upaya percepatan yang lebih terarah untuk meningkatkan harapan lama sekolah masyarakat.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan capaian nasional sebesar **13,30 tahun**, maka capaian Kabupaten Batu Bara masih berada di bawah rata-rata

nasional dengan selisih sebesar **0,17 tahun**. Sementara itu, dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar **13,50 tahun**, terdapat kesenjangan sebesar **0,37 tahun**.

Secara umum, daerah dengan akses pendidikan yang merata, ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, serta tingkat partisipasi sekolah yang tinggi cenderung memiliki nilai HLS yang lebih tinggi. Oleh karena itu, capaian Kabupaten Batu Bara sebesar **13,13 tahun** menunjukkan bahwa **akses pendidikan telah berkembang cukup baik, namun masih memerlukan penguatan untuk meningkatkan peluang pendidikan jangka panjang masyarakat**.

Kemudahan Akses pendidikan menjadi kunci untuk pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan, seperti juga indikator pendidikan lain yang penting seperti angka melek huruf. Hal ini karena berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak terpenuhi. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.

Beberapa faktor yang telah mendukung pencapaian mendekati target di Kabupaten Batu Bara antara lain:

1. Peningkatan Akses Pendidikan:

Perluasan jaringan sekolah dan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah, terutama di wilayah pedesaan, memungkinkan lebih banyak anak untuk mendapatkan akses pendidikan formal.

2. Peningkatan Mutu Guru dan Kesejahteraan Guru:

Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik telah berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran, yang berdampak pada peningkatan rata-rata lama sekolah. Dalam Hal peningkatan kesejahteraan guru Pemerintah Kabupaten memiliki skema kebijakan pemberian bantuan sosial kepada guru MDA.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah:

Komitmen dan dukungan kebijakan yang terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, termasuk program beasiswa bagi S1 dan Pemberian BOP kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) bagi penduduk usia diatas 21 tahun,

serta peningkatan partisipasi masyarakat (CSR), turut mendorong capaian indikator ini.

Selain itu beberapa kebijakan penunjang capaian RTLS dan AHLS Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 berfokus pada hal seperti:

No		Faktor Penunjang	%
1	1.1	Angka Melek Huruf pada Usia 15 - 24 Tahun	99
	1.2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pendidikan Dasar	94
	1.3	Angka lulusan (AL) SD/MI/PAKET A	100
	1.4	Angka lulusan (AL) SMP/MTs/PAKET B	100
	1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	100
	1.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	98
	1.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	128
	1.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	98
	1.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	76
	1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97
	1.11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	88
	1.12	Angka melanjutkan sekolah dari non formal ke SD	100
	1.13	Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs	100
2	2.1	Rasio Ruang Kelas Baik SD/MI	96
	2.2	Rasio Ruang Kelas Baik SMP/MTs	90
	2.3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar (SD)	101
	2.4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah pertama (SMP)	94
	2.5	Rasio guru terhadap murid pada SD/MI	100
	2.6	Rasio guru terhadap murid pada SMP/MTs	100
3	3.1	Presentase guru SD/MI yg memiliki kualifikasi D4/S1	93
	3.2	Presentase guru SMP/MTs yang memiliki kualifikasi D4/S1	100
	3.3	Presentase guru yang memiliki kualifikasi S2	97
	3.4	Jumlah guru yang akan memperoleh sertifikasi profesi (komulatif)	98

Rumusan Kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan menyusun langkah-langkah dan Program Kerja sebagai berikut :

1. Pembinaan Sekolah Dasar (SD).

a. Upaya pemerataan pendidikan sekolah dasar dengan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan-kegiatan:

- Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru untuk

jenjang Pendidikan SD.

- Membangun Unit Sekolah Baru jenjang SD.
 - Memberikan subsidi pendidikan dalam bentuk Imbal swadaya/blockgrant bagi SD Negeri dan Swasta, agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat luas.
 - Melaksanakan revitalisasi serta penggabungan sekolah dasar agar tercapai efisiensi dan efektifitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai.
 - Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi atau dari keluarga yang tidak mampu dengan mempertimbangkan peserta didik laki-laki dan perempuan secara proporsional.
- b. Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar.
- Pengembangan dan penyempurnaan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah.
 - Pembangunan SD Percontohan.
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.
 - Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan, serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif.
 - Penyelenggaraan supervisi terhadap seluruh aspek kegiatan SD.
 - Melaksanakan berbagai kegiatan lomba bagi siswa maupun tenaga edukatif, baik lomba bidang studi, ketrampilan siswa, lomba karya ilmiah dan lain sebagainya.
- c. Upaya memperbaiki Manajemen Bidang Pembinaan Pendidikan SD
- Melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan sekolah dasar.
 - Mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - Mengembangkan sistem akreditasi secara adil dan merata.
 - Meninjau kembali semua produk hukum di bidang pendidikan.

- Merintis pembentukan Badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah.

2. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

- a. Upaya pemerataan pendidikan sekolah menengah pertama akan dilaksanakan, dengan kegiatan-kegiatan:
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru untuk jenjang Pendidikan SMP.
 - Membangun Unit Sekolah Baru jenjang SMP.
 - Memberikan subsidi pendidikan dalam bentuk Imbal swadaya/blockgrant bagi SMP Negeri dan Swasta, agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat luas.
 - Melaksanakan revitalisasi serta penggabungan sekolah dasar agar tercapai efisiensi dan efektifitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai.
 - Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi atau dari keluarga yang tidak mampu dengan mempertimbangkan peserta didik laki-laki dan perempuan secara proporsional.
- b. Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - Pengembangan dan penyempurnaan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah.
 - Pembangunan SMP Percontohan.
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.
 - Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan, serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif.
 - Penyelenggaraan supervisi terhadap seluruh aspek kegiatan SMP.
 - Melaksanakan berbagai kegiatan lomba bagi siswa maupun tenaga edukatif, baik lomba bidang studi, ketrampilan siswa, lomba karya ilmiah dan lain sebagainya.
- c. Upaya memperbaiki Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

- Melaksanakan desentralisasi Bidang Pembinaan Pendidikan SMP.
- Mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Mengembangkan sistem akreditasi secara adil dan merata.
- Meninjau kembali semua produk hukum di bidang pendidikan.
- Merintis pembentukan Badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah.

3. Pendidikan PAUD dan Non Formal (PPNF).

- a. Upaya untuk perluasan dan pemerataan Pendidikan PAUD dan Non Formal:
 - Perluasan pemerataan dan jangkauan Pendidikan taman kanak-kanak dan Anak Dini Usia.
 - Melakukan pemerataan Taman Kanak-Kanak melalui Partisipasi Masyarakat.
 - Penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak satu atap dengan SD/MI.
 - Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan kualitas pelayanan Kejar Paket A Setara SD dan Paket B setara SLTP.
 - Penuntasan Buta Aksara melalui Program Keaksaraan Fungsional terutama bagi penduduk Buta Aksara usia 10 - 44 Tahun.
 - Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan.
- b. Upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan.
 - Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan PAUD.
 - Meningkatkan mutu sarana prasarana yang dapat memperluas pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar.
 - Meningkatkan pelaksanaan program kendali mutu yang dilakukan melalui penetapan standar kompetensi, pengembangan standarisasi.
 - Meningkatkan kemitraan dengan pihak yang berkepentingan (Stake

holder).

- Melaksanakan penelitian kesesuaian program-program PPNF.
- c. Upaya peningkatan manajemen Pendidikan PAUD dan Non Formal.
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
 - Pembinaan kelembagaan Pendidikan Non Formal.
 - Pemanfaatan potensi masyarakat.
 - Mengembangkan komunikasi dan informasi di bidang Pendidikan Non Formal.

3. Pembinaan Ketenagaan.

- a. Upaya untuk perluasan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan pada Pendidikan dasar, pendidikan Luar Sekolah :
 - Perluasan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal,
 - Perluasan kebutuhan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - Menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- b. Upaya peningkatan kualitas dan relevansi tenaga pendidik dan kependidikan.
 - Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesionalise Guru, Kepala Sekolah, Pengawas sekolah secara merata.
 - Meningkatkan kemampuan profesionalisme Instruktur melalui kegiatan TOT, Lokakarya.
 - Pengembangan kompetensi, program sertifikasi, peningkatan kualifikasi pendidikan Tutor PAUD, guru TK, SD dan SMP.
- c. Upaya peningkatan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan pada Pendidikan dasar, pendidikan Luar Sekolah.
 - Mengembangkan sistem insentif guru berprestasi untuk mendorong kompetisi yang sehat.
 - Perumusan kebijakan pengembangan kompetensi, program

sertifikasi, peningkatan kualifikasi pendidikan Tutor PAUD, guru TK, SD dan SMP

- Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan;
- Penyiapan Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Guru TK, SD dan SMP, SLB, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Formal dan Non Formal;

Selain itu skema kebijakan anggaran dalam mendorong peningkatan indikator rata-rata lama sekolah dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Keseluruhan skema kebijakan tersebut merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan.

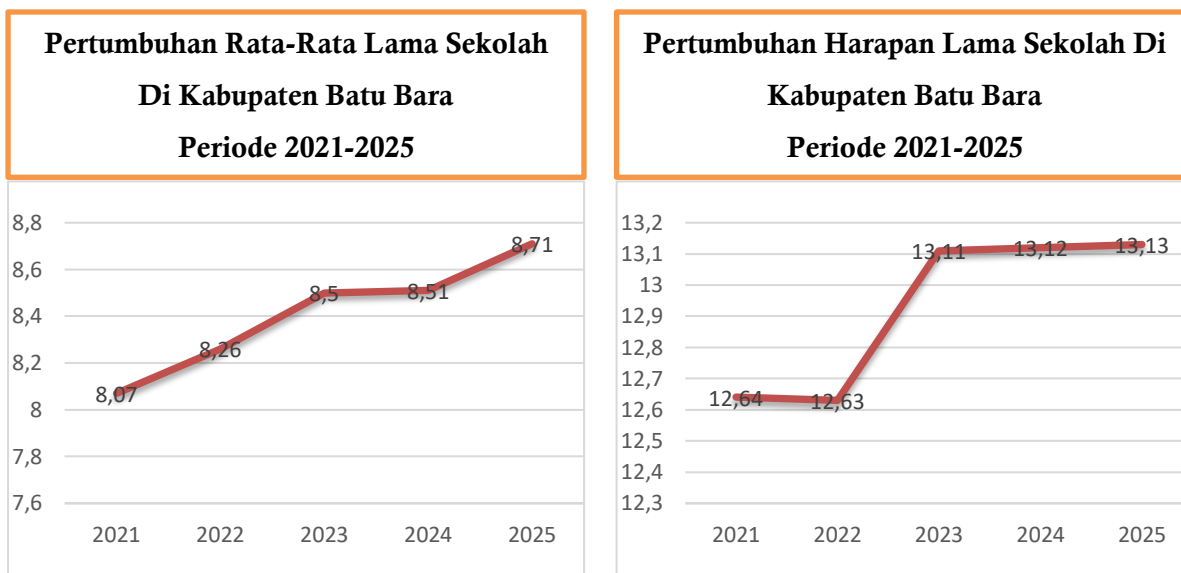
Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara telah menetapkan indikator rata-rata lama sekolah sebagai penanda perluasan akses pendidikan. Rata-rata lama sekolah ini menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini merupakan indikator makro yang hasil pengukurannya merupakan hasil dari pengukuran BPS Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan data BPS, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan AHLIS di Batu Bara tumbuh 0,2 dan 0,01 selama periode 2024 hingga 2025. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Batu Bara yang lebih baik. Pada tahun 2024, lama sekolah penduduk Batu Bara usia 25 tahun ke atas secara rata-rata mencapai 8,71 tahun, atau telah menamatkan pendidikan hingga bangku kelas II atau kelas VIII tingkat SLTP.

Peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Batu Bara ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Batu Bara semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Batu Bara periode 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.11.

Pertumbuhan RTLS dan HLS Tahun 2021-2025



Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat memiliki skema intervensi yang sangat komprehensif. Selain unsur manajemen, terdapat beberapa aspek yang memiliki kontribusi terhadap kualitas pendidikan. Empat diantaranya yang paling utama dan menjadi tugas Dinas Pendidikan adalah Pengelolaan Pendidikan SD, SMP, Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Unsur pendukung lainnya yang tidak kalah penting adalah program peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, program pengembangan kebudayaan, program pengembangan kesenian tradisional, pengelolaan museum. Terdapat juga upaya pendukung yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dalam mencapai pengembangan budaya literasi dengan program pembinaan kualitas perpustakaan, pembinaan perpustakaan ini di lakukan hampir diseluruh sekolah tingkat pertama dan disetiap kelurahan. Selain itu untuk mempermudah masyarakat mendapat bahan bacaan, terdapat perpustakaan keliling dan perpustakaan online yang dengan mudah dapat diakses masyarakat.

Walaupun terdapat upaya signifikan, beberapa hambatan masih mengganggu peningkatan RTLS dan AHLS, antara lain:

4. Kendala Sosial Ekonomi:

Faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung

seringkali menyebabkan anak-anak harus berhenti sekolah untuk membantu perekonomian keluarga.

5. Tingkat Drop-Out yang Masih Ada:

Masih terdapat sejumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan mereka hingga tingkat yang lebih tinggi, yang secara langsung mempengaruhi rata-rata lama sekolah.

6. Distribusi Mutu Sekolah yang Tidak Merata:

Kualitas fasilitas dan tenaga pengajar yang bervariasi antar wilayah menyebabkan disparitas dalam pencapaian pendidikan.

7. Keterbatasan Infrastruktur Digital:

Di era transformasi digital, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di sekolah-sekolah juga membatasi peningkatan proses pembelajaran.

Untuk mengatasi hambatan dan mendorong pencapaian RTLS dan HLS yang lebih tinggi, beberapa solusi alternatif dapat diterapkan:

1. Memberikan dukungan finansial serta insentif kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan ekonomi.
2. Menyediakan program bimbingan dan pendampingan khusus bagi siswa yang berisiko putus sekolah agar mereka dapat mengejar ketertinggalan dalam pendidikan.
3. Mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran melalui program e-learning, terutama di daerah terpencil, untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan.
4. Mendorong kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam penyediaan pelatihan kejuruan yang relevan guna menambah daya tarik pendidikan formal bagi siswa.

Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat yang berasal dari dua indikator jika digabungkan, maka capaian rata-rata sebesar 100,03% dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran Meningkatnya Literasi Masyarakat

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	-	-	-	75,50	9,89	-

A. Analisis Transisi Metodologi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

1. Transformasi Struktur Instrumen dan Paradigma Pengukuran

Pada periode sebelumnya (2024), pengukuran IPLM bersifat akumulatif melalui 7 Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang didominasi oleh pendekatan *input-based* (ketersediaan fisik) dan pendataan administratif melalui aplikasi *WeSurvey*.

Memasuki tahun 2025, berdasarkan **Peraturan Kepala Perpustnas Nomor 7 Tahun 2025**, terjadi transformasi radikal menjadi dua dimensi utama:

- **Dimensi Kinerja (Bobot 70%):** Menggeser dominasi data sensus ke arah pengukuran nyata atas efektivitas layanan dan dampak kemanfaatan perpustakaan bagi kesejahteraan masyarakat.
- **Dimensi Kepatuhan/Fisik (Bobot 30%):** Menyederhanakan aspek sarana prasarana menjadi indikator pemenuhan standar administratif minimal.

2. Pergeseran Mekanisme Verifikasi Data dan Validitas Terdapat perubahan fundamental dalam aspek validitas data:

- **Era Pasca-2024:** Menanggalkan metode *self-assessment* daerah yang cenderung subjektif.
- **Era 2025:** Verifikasi data menjadi lebih ketat, objektif, dan berbasis substansi kinerja. Fokus pengukuran beralih dari sekadar kuantitas anggota atau kunjungan, menjadi kualitas interaksi literasi dan dampak inklusi sosial.

B. Evaluasi Capaian Kinerja dan Justifikasi Metodologis

Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Batu Bara ditargetkan sebesar **75,50**, dengan realisasi sebesar **9,89**, atau secara matematis mencapai **13,10%** dari target. Secara nominal, angka ini menunjukkan *gap* capaian yang signifikan.

Namun demikian, rendahnya persentase tersebut **tidak dapat diinterpretasikan sebagai penurunan kinerja operasional**, melainkan akibat terjadinya **Asimetri Metodologi**. Hal ini ditegaskan dalam **Surat Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor: B.844/4/APB.00.02/II.2026** yang menyatakan:

1. **Ketidaksesuaian Instrumen:** Target 75,50 disusun dengan asumsi metodologi lama (berbasis ketersediaan sarana), sedangkan realisasi 9,89 diukur dengan instrumen baru (berbasis kinerja/dampak).
2. **Nilai Basis Baru (*New Baseline*):** Capaian 9,89 merupakan titik uji baru yang lebih substantif dan jujur dalam memotret kondisi literasi di daerah. Perubahan ini mengakibatkan target yang ada di RPJMD menjadi tidak relevan (*obsolete*) untuk disandingkan dengan hasil pengukuran terbaru.

C. Analisis Komparatif dan Posisi Strategis

Jika dibandingkan dengan capaian Nasional (**40,60**) dan Provinsi Sumatera Utara (**40,54**), realisasi Kabupaten Batu Bara menunjukkan adanya jarak capaian. Namun, perbedaan ini perlu dicermati sebagai variasi tingkat kesiapan infrastruktur data antar daerah dalam mengimplementasikan transisi metodologi terbaru.

Bagi Kabupaten Batu Bara, angka **9,89** mencerminkan tantangan riil bahwa pembangunan literasi kini tidak lagi terbatas pada penyediaan buku dan gedung, melainkan pada optimalisasi pemanfaatan layanan yang mampu mengubah perilaku masyarakat.

D. Rekomendasi Akselerasi Kinerja

Guna menghindari distorsi penilaian kinerja di masa mendatang dan meningkatkan nilai IPLM pada paradigma baru, direkomendasikan langkah strategis sebagai berikut:

1. **Penyesuaian Dokumen Perencanaan:** Segera melakukan revisi target indikator IPLM dalam perubahan RPJMD/Renstra agar selaras dengan *baseline* metodologi Perka Perpustakaan No. 7 Tahun 2025.
2. **Peningkatan Bobot Dimensi Kinerja:** Mengoptimalkan program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) melalui kegiatan pelatihan keterampilan yang terdokumentasi dengan baik, guna mengejar bobot 70% pada dimensi kinerja.
3. **Penguatan Kepatuhan Standar (SNP):** Mendorong akreditasi perpustakaan sekolah dan desa untuk mengamankan poin pada dimensi kepatuhan/fisik (30%).
4. **Integrasi Data SiPuspa:** Memastikan seluruh data satuan perpustakaan tervalidasi dalam sistem nasional untuk menjamin keakuratan input data pada periode berikutnya.

Penegasan Evaluatif:

"Meskipun secara persentase angka mencapai 13,10%, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menegaskan komitmennya bahwa angka 9,89 adalah langkah awal menuju pembangunan literasi yang lebih berkualitas, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat, melampaui sekadar pemenuhan administratif semata."

E. Analisis Hubungan Program terhadap Peningkatan IPLM dan TKM

Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana literasi, tetapi sangat bergantung pada kinerja layanan, kualitas interaksi literasi, serta keterlibatan aktif masyarakat. Dalam konteks tersebut, Program Pembinaan Perpustakaan serta Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno merupakan intervensi strategis yang memiliki hubungan kausal langsung terhadap peningkatan kedua indikator tersebut. Hubungan Kausalitas terhadap IPLM, yaitu:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini berperan langsung dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan perpustakaan, sehingga berdampak pada:

- a. Dimensi Kinerja (70%)
 - Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan (jam layanan, inovasi layanan, digitalisasi)
 - Mendorong peningkatan kunjungan, peminjaman, dan aktivitas literasi
 - Memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat (*community learning center*)

Hal ini memberikan dampak kausal, yaitu: "Semakin baik pembinaan, semakin tinggi pemanfaatan layanan → skor dimensi kinerja meningkat"

- b. Dimensi Kepatuhan/Fisik (30%)
 - Meningkatkan kesesuaian perpustakaan dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP);
 - Menjamin ketersediaan sarana, koleksi, dan tenaga perpustakaan

Hal ini memberikan dampak kausal: "Pemenuhan standar → meningkatkan skor

kepatuhan → memperkuat nilai IPLM secara struktural”

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini berkontribusi pada penguatan identitas literasi dan keberagaman sumber bacaan:

- a. Dimensi Kinerja (70%)
 - Menambah daya tarik koleksi perpustakaan berbasis kearifan lokal
 - Mendorong minat baca melalui konten yang kontekstual dan historis
 - Menghidupkan aktivitas literasi berbasis budaya
- b. Dimensi Kepatuhan/Fisik (30%)
 - Memenuhi aspek pengelolaan koleksi sesuai standar
 - Menambah kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan

Hal ini memberikan dampak kausal: “Koleksi yang relevan dan bernilai tinggi → meningkatkan minat dan keterlibatan → mendorong kinerja literasi”

Hubungan Kausalitas terhadap TKM

1. Program Pembinaan Perpustakaan

- a. Fase Pra-Membaca
 - Sosialisasi, kampanye literasi, dan penyediaan akses bacaan
 - Meningkatkan kesadaran dan minat awal masyarakat
- b. Fase Saat Membaca
 - Penyediaan ruang baca yang nyaman dan layanan yang menarik
 - Pendampingan kegiatan membaca (pojok baca, komunitas literasi)
- c. Fase Pasca-Membaca
 - Diskusi, resensi buku, dan kegiatan literasi lanjutan
 - Mendorong internalisasi pengetahuan dan budaya literasi

sehingga dalam implementasinya memberikan dampak: “Siklus membaca terbentuk secara utuh → meningkatkan kegemaran membaca masyarakat”

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

- a. Fase Pra-Membaca
 - Membangun rasa ingin tahu melalui warisan budaya lokal
- b. Fase Saat Membaca
 - Menyediakan bahan bacaan unik dan bernilai sejarah
- c. Fase Pasca-Membaca
 - Mendorong refleksi, diskusi, dan pelestarian nilai budaya

dalam implementasinya memberikan dampak: “Literasi tidak hanya membaca, tetapi juga memahami identitas dan nilai budaya”

Kedua program tersebut juga berkontribusi dalam:

- Digitalisasi koleksi (termasuk naskah kuno)
- Pengembangan perpustakaan digital
- Akses literasi berbasis teknologi
- Peningkatan literasi digital masyarakat

Dampak yang dicapai: “Perpustakaan tidak lagi berbasis fisik semata, tetapi menjadi platform literasi digital yang inklusif dan adaptif”

Dengan diberlakukannya metodologi baru (IPLM berbasis kinerja 70% dan TKM berbasis siklus membaca), maka kedua program tersebut menjadi intervensi kunci yang secara langsung mempengaruhi variabel pengukuran baru, hal ini karena:

- Program pembinaan → meningkatkan kinerja layanan (core indikator baru)
- Program pelestarian → meningkatkan kualitas dan relevansi literasi (engagement masyarakat)

Dengan demikian, Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno memiliki hubungan kausal yang kuat terhadap peningkatan IPLM dan TKM, baik pada aspek kinerja, kepatuhan, maupun perilaku literasi masyarakat. Intervensi pada kedua program tersebut secara substantif mampu memperkuat kualitas layanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong transformasi digital literasi.

Oleh karena itu, meskipun terjadi perubahan metodologi pengukuran secara nasional, kedua program ini tetap relevan dan strategis dalam meningkatkan profil literasi daerah, karena secara langsung menyanggar dimensi utama yang menjadi dasar penilaian indikator terbaru.

Capaian kinerja nyata dari sasaran *Meningkatnya Literasi Masyarakat* sebesar 13,10%, ketidaktercapaian target tahun 2025 tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja, melainkan merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap standar pengukuran yang lebih tinggi, objektif, dan berbasis dampak (impact-oriented measurement). Oleh karena itu, capaian tahun 2025 lebih tepat diposisikan sebagai **baseline baru** dalam kerangka pengukuran yang lebih substantif.

2. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang menuntut instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Dalam konteks ini, **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** yang disusun dalam kerangka **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** memiliki peran yang sangat penting.

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024
Pendapatan Daerah	1.306.085.688.695,00	1.296.632.482.535,11	1.315.878.509.380,63
Belanja Operasi	990.364.043.875,00	933.765.231.656,64	921.062.880.290,43
Belanja Modal	120.005.722.308,00	116.846.540.743,55	155.752.728.512,00
Belanja Tidak Terduga	2.103.392.527,00	710.164.191,00	0,00
Belanja Transfer	211.804.824.390,00	189.481.677.188,00	209.872.260.415,00
Jumlah Belanja	1.324.277.983.100,00	1.240.803.613.779,19	1.286.687.869.217,43
Surplus/Defisit	(18.192.294.405,00)	55.828.868.755,92	29.190.640.163,20
Penerimaan Pembiayaan	31.104.578.877,00	31.104.578.877,76	14.826.223.186,56
Pengeluaran Pembiayaan	12.912.284.472,00	12.912.284.472,00	12.912.284.472,00
Pembiayaan Netto	18.192.294.405,00	18.192.294.405,76	1.913.938.714,56
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	74.021.163.161,68	31.104.578.877,76

Evaluasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Batu Bara tahun 2025 memberikan gambaran objektif mengenai kesehatan fiskal daerah. Berdasarkan perbandingan data realisasi tahun 2025 terhadap tahun 2024, dapat disimpulkan poin-poin strategis sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.296.632.482.535,11 atau mencapai 99,28% dari target anggaran. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (Rp1.315.878.509.380,63), terjadi penurunan nominal (kontraksi) sebesar kurang lebih Rp19,2 miliar. Hal ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan laju pertumbuhan pendapatan yang memerlukan strategi intensifikasi sumber-sumber pendapatan baru pada periode mendatang.

2. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp933.765.231.656,64 (94,29%). Secara nominal, komponen ini mengalami kenaikan dibandingkan

tahun 2024 (Rp921,06 miliar). Peningkatan ini mencerminkan adanya ekspansi biaya dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat dan kebutuhan operasional birokrasi yang terus tumbuh.

3. Belanja Modal

Catatan kritis terdapat pada Belanja Modal. Meskipun realisasi 2025 mencapai 97,36% dari pagu anggaran, secara nominal angka Rp116.846.540.743,55 menunjukkan penurunan tajam sebesar 25% dibandingkan realisasi tahun 2024 (Rp155,75 miliar). Penurunan investasi fisik ini perlu menjadi atensi serius karena berdampak langsung pada akselerasi penyediaan infrastruktur daerah jangka panjang.

4. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Berbeda dengan tahun 2024 yang nihil (Rp0), pada tahun 2025 terdapat realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp710.164.191,00. Hal ini mengindikasikan adanya penanganan keadaan darurat atau mendesak di lapangan yang berhasil difasilitasi melalui instrumen anggaran ini.

5. Belanja Transfer

Belanja Transfer tahun 2025 terealisasi sebesar Rp189.481.677.188,00. Terdapat penurunan nominal dibandingkan tahun 2024 (Rp209,87 miliar), yang mengindikasikan adanya efisiensi dalam penyaluran transfer atau penyesuaian porsi bagi hasil/bantuan keuangan sesuai dengan regulasi terbaru.

6. Surplus Anggaran

Satu capaian fiskal yang sangat positif adalah perolehan Surplus sebesar Rp55.828.868.755,92. Angka ini menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat (91,25%) dibandingkan surplus tahun 2024 (Rp29,19 miliar). Peningkatan surplus di tengah penurunan pendapatan membuktikan adanya kebijakan pengetatan dan pengendalian belanja yang sangat efektif di tingkat pemerintah kabupaten.

7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Tahun 2025 ditutup dengan SiLPA sebesar Rp74.021.163.161,68, naik signifikan dibandingkan SiLPA 2024 (Rp31,10 miliar). Meski mencerminkan kesehatan kas daerah, angka SiLPA yang tinggi ini juga menjadi sinyal perlunya optimalisasi penyerapan anggaran pada program-program pembangunan agar dana tidak mengendap dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara

lebih cepat.

Secara agregat, kinerja keuangan Kabupaten Batu Bara tahun 2025 berhasil menjaga stabilitas dengan **peningkatan surplus yang signifikan**. Namun, terdapat dua hal yang memerlukan evaluasi mendalam:

1. **Strategi Pemulihan Pendapatan:**

Mengingat adanya penurunan nominal pendapatan dibandingkan tahun lalu.

2. **Reprioritasi Belanja Modal:**

Agar penurunan belanja modal (25%) tidak berlanjut, yang berpotensi menghambat pemenuhan standar pelayanan minimal infrastruktur.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) pada hakikatnya merupakan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berlandaskan prinsip-prinsip **transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum, kesetaraan, serta efektivitas dan efisiensi**. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, yang ditandai dengan semakin kuatnya kontrol masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, sekaligus sebagai instrumen evaluasi dalam mengukur tingkat pencapaian sasaran dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai perwujudan dari Visi, Misi, serta Tujuan dan Sasaran Strategis daerah, yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

LKIP Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja serta hasil evaluasi terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga memuat analisis kinerja yang mengidentifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyadari masih terdapat kelemahan dan keterbatasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi penting dan sekaligus motivasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batu Bara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan akuntabel mengenai kinerja pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan

(*stakeholders*), serta menjadi media evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini disusun. Diharapkan laporan ini dapat menjadi **instrumen pengendalian, evaluasi, dan peningkatan kinerja** dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented government*), serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.



Lima Puluh, 13 April 2026

Bupati Batu Bara

Baharudin Siagian